

# **PERKEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN PROVINSI JAWA BARAT**

**Triwulan IV - 2005**

**Kantor Bank Indonesia  
Bandung**

Kantor Bank Indonesia Bandung  
Jl. Braga No. 108  
Tlp. 022-4230223  
Fax.022-4214326

**Visi Bank Indonesia**

Menjadi lembaga Bank Sentral yang dapat dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

**Misi Bank Indonesia**

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan jangka panjang negara Indonesia yang berkesinambungan.

**Nilai-nilai Strategi Organisasi Bank Indonesia**

Nilai-nilai yang menjadi dasar organisasi, manajemen dan pegawai untuk bertindak atau berperilaku yaitu kompetensi, integritas, transparansi, akuntabilitas dan kebersamaan.

**Visi Kantor Bank Indonesia Bandung**

Mewujudkan Kantor Bank Indonesia yang dapat dipercaya melalui peningkatan perannya sebagai economic intelligence dan unit penelitian.

**Misi Kantor Bank Indonesia Bandung**

Berperan secara aktif dalam pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pelaksanaan kegiatan operasional di bidang ekonomi moneter, perbankan, sistem pembayaran secara efektif dan efisien dan peningkatan kajian ekonomi regional serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan perkenanNya sehingga penyusunan buku Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Provinsi Jawa Barat Triwulan IV-2005 dapat diselesaikan. Kajian triwulanan ini kami susun guna memenuhi kebutuhan internal Bank Indonesia, sekaligus sebagai laporan kepada stakeholder mengenai berbagai informasi yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Buku ini memuat pula hal-hal yang terkait dengan tugas Bank Indonesia, antara lain mengenai perkembangan ekonomi daerah secara umum.

Data dan informasi yang kami sajikan dalam buku ini berasal dari Bank Indonesia, termasuk laporan perbankan dan perusahaan-perusahaan, serta hasil-hasil survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Disamping itu, data dan informasi juga kami peroleh dari berbagai pihak, diantaranya Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dinas-dinas terkait, Badan Pusat Statistik, serta Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan buku ini, baik dalam penyediaan data dan informasi yang diperlukan, maupun dalam pembahasannya. Dengan segala keterbatasan yang ada, kami menyadari bahwa isi buku ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan dengan sepenuh hati untuk menerima segala kritik dan saran membangun guna meningkatkan kualitas isi buku tersebut.

Akhir kata, kami berharap semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan kerjasama yang ada selama ini dapat lebih ditingkatkan.

Bandung, Maret 2006

M.D. Soegiarto  
Pemimpin

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vi
Keterangan dan Sumber Data	x
Indikator Ekonomi dan Moneter Provinsi Jawa Barat	xi
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB 1 PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO	7
1. Kondisi Umum	7
2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat	8
Boks 1. Program Pendanaan Kompetisi (PPK): Akselerasi Peningkatan IPM Jawa Barat	10
3. Sisi Produksi	12
3.1. Sektor Ekonomi Dominan	13
3.1.1. Sektor Industri Pengolahan (Nonmigas)	13
Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)	14
3.1.2. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	15
3.1.3. Sektor Pertanian	17
3.2. Sektor-sektor Lain	18
4. Sisi Pengeluaran	19
4.1. Konsumsi	19
4.2. Investasi	21
4.3. Ekspor dan Impor	22
5. Ketenagakerjaan	26
6. Keuangan Daerah	28
BAB 2 PERKEMBANGAN INFLASI	31
1. Kondisi Umum	31
2. Perkembangan Inflasi di Jawa Barat	32
Boks 2. Perkembangan Inflasi di Jawa Barat Tahun 2005	33
Disagregasi Inflasi Inti, Inflasi Volatile Food, Inflasi Administered Price	34
Survei Kegiatan Dunia Usaha	35
Survei Konsumen	37
Survei Penjualan Eceran	37
2.1. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa	38
a. Kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan	39

b.	Kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar	41
c.	Kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau	42
d.	kelompok bahan makanan	43
	Boks 3. Kenaikan Harga Bahan Makanan dan Makanan Jadi di Kota dan Kabupaten Bandung	44
	Boks 4. Dampak Kenaikan Harga BBM Terhadap Industri Makanan Jadi di Jawa Barat	45
e.	Kelompok sandang	46
f.	Kelompok kesehatan	47
g.	Kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga	47
2.2.	Inflasi di Tujuh Kota	49
a.	Kota Bandung	50
b.	Kota Bekasi	52
c.	Kota Bogor	54
d.	Kota Sukabumi	55
e.	Kota Cirebon	57
f.	Kota Tasikmalaya	58
g.	Kota Banjar	60
<b>BAB 3</b>	<b>PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN</b>	<b>63</b>
1.	Kondisi Umum	63
1.1.	Bank Umum	64
1.1.1.	Dana Pihak Ketiga	65
1.1.2.	Penyaluran Kredit	68
1.1.2.1.	Penyaluran Kredit Bank Pelapor	68
	Boks 5. Perkembangan Penyaluran Kredit ke Sektor Pertanian di Jawa Barat	71
1.1.2.2.	Penyaluran Kredit Berdasarkan Lokasi Proyek	73
1.1.2.3.	Persetujuan Kredit Baru	74
1.1.3.	Rasio Kredit Bermasalah/NPLs	75
1.1.4.	Kredit UMKM	76
	Boks 6. Upaya Pengembangan UMKM	78
1.1.5.	Kredit Ekspor	78
1.2.	Kinerja Bank Umum yang Berkantor Pusat di Bandung	80
1.3.	Bank Umum Syariah	81
1.4.	Bank Asing dan Campuran	83
1.5.	Bank Perkreditan Rakyat	84
	Boks 7. Program Sertifikasi Profesional Direktur Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	85
2.	Perkembangan Sistem Pembayaran	85

2.1.	Pengedaran Uang Kartal	86
2.2.	Penyediaan Uang Kartal Layak Edar	87
2.3.	Penukaran Uang Pecahan Kecil	88
2.4.	Lalu Lintas Pembayaran Non Tunai	88
2.5.	Uang Palsu	89
2.6.	Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing oleh Pedagang Valuta Asing	89
BAB 4	PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH	91
1.	Prospek Ekonomi Makro	91
2.	Perkiraan Inflasi	93
3.	Prospek Perbankan dan Sistem Pembayaran	94
LAMPIRAN		98

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	PDRB Jawa Barat dari Sisi Produksi (Rp Miliar)	12
Tabel 1.2.	Nilai Ekspor Beberapa Komoditas Agro Utama (USD Juta)	17
Tabel 1.3.	Nilai Ekspor Nonmigas Jawa Barat Berdasarkan Kelompok SITC (USD Juta)	23
Tabel 1.4.	Nilai Impor Nonmigas Jawa Barat Berdasarkan Kelompok SITC (USD Juta)	23
Tabel 1.5.	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Rp Miliar)	28
Tabel 2.1.	Perkembangan Inflasi Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa (%)	38
Tabel 2.2.	Inflasi Triwulanan Tujuh Kota di Jawa Barat dan Gabungannya Menurut Kelompok Barang dan Jasa Triwulan IV-2005	49
Tabel 3.1.	Lima Wilayah Kabupaten/Kota dengan NPL Tertinggi	75
Tabel 3.2.	Lima Wilayah Kabupaten/Kota dengan NPL Terendah	75
Tabel 3.3.	Perkembangan Outflow Uang Kertas dan Uang Logam di Wilker KBI Bandung	87
Tabel 3.4.	Perkembangan Penyelesaian Transaksi Pembayaran Melalui Kliring Lokal dan RTGS di Jawa Barat Triwulan IV-2005 (Rp Triliun)	89



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Jawa Barat Triwulan IV-2005	13
Grafik 1.2.	Perkembangan Indeks Penjualan Perdagangan Eceran Hasil SPE	16
Grafik 1.3.	Kontribusi Subsektor Terhadap Sektor Pertanian	17
Grafik 1.4.	Perkembangan Nilai Ekspor Kumulatif Beberapa Komoditas Agro Utama di Jawa Barat (USD Juta)	18
Grafik 1.5.	Pangsa Terhadap PDRB Triwulan IV-2005 (%)	19
Grafik 1.6.	Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen	20
Grafik 1.7.	Realisasi Investasi (Ijin Usaha Tetap) PMA di Jawa Barat (USD Juta)	21
Grafik 1.8.	Realisasi Investasi (Ijin Usaha Tetap) PMDN di Jawa Barat ( Rp Miliar)	21
Grafik 1.9.	Realisasi Investasi Hasil SKDU Triwulan IV-2005	22
Grafik 1.10.	Perkembangan Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta)	24
Grafik 1.11.	Perkembangan Nilai Impor Nonmigas (USD Juta)	25
Grafik 1.12.	Perkembangan Nilai Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan (USD Juta)	25
Grafik1.13.	Distribusi Nilai Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Asal (%)	26
Grafik 1.14.	Distribusi Nilai Impor Nonmigas Berdasarkan Negara Asal (%)	26
Grafik 1.15.	Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja pada Triwulan IV-2005 (Saldo Bersih)	27
Grafik 1.16.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Rp Miliar)	29
Grafik 2.1.	Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat dan Nasional Tahun 2005	32
Grafik 2.2.	Perkembangan Inflasi Bulanan di Jawa Barat Tahun 2005	33
Grafik 2.3.	Disagregasi Inflasi Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Tahun 2005	33
Grafik 2.4.	Disagregasi Inflasi Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Triwulan IV-2005	34
Grafik 2.5.	Pergerakan Inflasi Inti, Administered Price, dan Volatile Food Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Triwulanan (qtq) Tahun 2005	34
Grafik 2.6.	Perkembangan Harga Berdasarkan Hasil SKDU dan Perkembangan Inflasi Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat	36
Grafik 2.7.	Perkembangan Ekspektasi Pelaku Usaha Terhadap Inflasi Tahun 2005 dan Perkembangan Inflasi Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat	36
Grafik 2.8.	Perkembangan Ekspektasi Konsumen Terhadap Harga	37
Grafik 2.9.	Perkembangan Ekspektasi Penjual Eceran Terhadap Harga dan Perkembangan Inflasi Bulanan Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat	37
Grafik 2.10.	Inflasi Triwulanan (qtq) Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa Triwulan IV-2005	38
Grafik 2.11.	Pembentukan Inflasi di Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa Triwulan IV-2005	38
Grafik 2.12.	Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) Gabungan Tujuh Kota	

di Jawa Barat Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	39
Grafik 2.13. Pembentukan Inflasi Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan Menurut Subkelompok Triwulan IV-2005	39
Grafik 2.14. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	41
Grafik 2.15. Pembentukan Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Menurut Subkelompok Triwulan IV-2005	41
Grafik 2.16. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	42
Grafik 2.17. Pembentukan Inflasi Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau Menurut Subkelompok Triwulan IV-2005	42
Grafik 2.18. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Kelompok Bahan Makanan	43
Grafik 2.19. Pembentukan Inflasi Kelompok Bahan Makanan Menurut Subkelompok Triwulan IV-2005	43
Grafik 2.20. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Kelompok Sandang	46
Grafik 2.21. Pembentukan Inflasi Kelompok Sandang Menurut Subkelompok Triwulan IV-2005	46
Grafik 2.22. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Kelompok Kesehatan	47
Grafik 2.23. Pembentukan Inflasi Kelompok Kesehatan Menurut Subkelompok Triwulan IV-2005	47
Grafik 2.24. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	48
Grafik 2.25. Pembentukan Inflasi Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga Menurut Subkelompok Triwulan IV-2005	48
Grafik 2.26. Inflasi Triwulanan di Tujuh Kota di Jawa Barat dan Gabungannya Triwulan IV-2005	49
Grafik 2.27. Pembentukan Inflasi Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Berdasarkan Andil Inflasi Per Kota Triwulan IV-2005	50
Grafik 2.28. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) di Kota Bandung	50
Grafik 2.29. Andil Inflasi di Kota Bandung Per Kelompok Barang dan Jasa (qtq) Triwulan IV-2005	51
Grafik 2.30. Disagregasi Inflasi di Kota Bandung Triwulan IV-2005	51
Grafik 2.31. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) di Kota Bekasi	52
Grafik 2.32. Andil Inflasi di Kota Bekasi Per Kelompok Barang dan Jasa (qtq) Triwulan IV-2005	53
Grafik 2.33. Disagregasi Inflasi di Kota Bekasi Triwulan IV-2005	53
Grafik 2.34. Perkembangan Inflasi Bulanan di Kota Bogor	54
Grafik 2.35. Andil Inflasi di Kota Bogor Per Kelompok Barang dan Jasa (qtq)	

Triwulan IV-2005	54
Grafik 2.36. Disagregasi Inflasi di Kota Bogor Triwulan IV-2005	54
Grafik 2.37. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) di Kota Sukabumi	55
Grafik 2.38. Andil Inflasi di Kota Sukabumi Per Kelompok Barang dan Jasa (qtq) Triwulan IV-2005	56
Grafik 2.39. Disagregasi Inflasi di Kota Sukabumi Triwulan IV-2005	56
Grafik 2.40. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) di Kota Cirebon	57
Grafik 2.41. Andil Inflasi di Kota Cirebon Per Kelompok Barang dan Jasa (qtq) Triwulan IV-2005	57
Grafik 2.42. Disagregasi Inflasi di Kota Cirebon Triwulan IV-2005	57
Grafik 2.43. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) di Kota Tasikmalaya	58
Grafik 2.44. Andil Inflasi di Kota Tasikmalaya Per Kelompok Barang dan Jasa (qtq) Triwulan IV-2005	59
Grafik 2.45. Disagregasi inflasi di Kota Tasikmalaya Triwulan IV-2005	59
Grafik 2.46. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) di Kota Banjar	60
Grafik 2.47. Andil Inflasi di Kota Banjar Per Kelompok Barang dan Jasa (qtq) Triwulan IV-2005	60
Grafik 2.48. Disagregasi Inflasi di Kota Banjar Triwulan IV-2005	60
Grafik 3.1. Komposisi Aset Perbankan di Jawa Barat, Posisi Triwulan IV-2005	63
Grafik 3.2. Perkembangan Aset Perbankan di Jawa Barat	63
Grafik 3.3. Komposisi DPK Perbankan di Jawa Barat, Posisi Triwulan IV-2005	64
Grafik 3.4. Perkembangan DPK Perbankan di Jawa Barat	64
Grafik 3.5. Perkembangan DPK dan Kredit	65
Grafik 3.6. Perkembangan LDR dan NPL	65
Grafik 3.7. Penghimpunan DPK	66
Grafik 3.8. Pangsa Penghimpunan DPK Berdasarkan Kelompok Bank, Triwulan IV-2005	66
Grafik 3.9. Pangsa DPK Berdasarkan Golongan Pemilik, Triwulan IV-2005	67
Grafik 3.10. Perkembangan Posisi DPK Berdasarkan Golongan Pemilik	67
Grafik 3.11. Penghimpunan DPK Bank Umum dalam Rupiah dan Valas	67
Grafik 3.12. Distribusi Kredit Bank Umum Konvensional Berdasarkan Jenis Penggunaan, Posisi Triwulan IV-2005	69
Grafik 3.13. Perkembangan Kredit Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Jenis Penggunaan (Rp Juta)	69
Grafik 3.14. Lima Sektor Ekonomi Penyerap Terbesar Kredit Bank Umum, Posisi Akhir Triwulan IV-2005	69
Grafik 3.15. Perkembangan Lima Sektor Ekonomi Penyerap Kredit Bank Umum Terbesar (Rp Juta)	69
Grafik3.16. Perkembangan Kredit Bank Pelapor dan Lokasi Proyek	73
Grafik 3.17. Pangsa Kredit Lokasi Proyek Berdasarkan Jenis Penggunaan	73
Grafik 3.18. Sektor Dominan Penyerap Kredit Lokasi Proyek	74

Grafik 3.19.	Perkembangan Persetujuan Kredit Baru	74
Grafik 3.20.	Perkembangan Kredit UMKM Bank Umum dan Total Kredit Bank Umum (Rp Triliun)	76
Grafik 3.21.	Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha yang Dibiayai (Rp Triliun)	76
Grafik 3.22.	Perkembangan NPL Kredit Bank Umum dan NPL Kredit UMKM	77
Grafik 3.23.	Sektor Ekonomi dengan Pangsa Terbesar dalam Penyerapan Kredit Ekspor	79
Grafik 3.24.	Pangsa Posisi Penyaluran Kredit Ekspor per Kabupaten/Kota	79
Grafik 3.25.	Perkembangan Kinerja Keuangan Bank Umum yang Berkantor Pusat di Bandung	80
Grafik3.26.	Perkembangan Kegiatan Intermediasi Bank Umum Syariah di Jawa Barat (Rp Juta)	82
Grafik 3.27.	Perkembangan Inflow dan Outflow Uang Kartal di Wilker KBI Bandung	86
Grafik3.28.	Perkembangan PTTB di KBI Bandung	88
Grafik 4.1.	Perkembangan Perkiraan Kegiatan Usaha Triwulan I-2006 Hasil SKDU	91
Grafik 4.2.	Perkembangan Harga Berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha dan Inflasi Aktual Tahunan di Jawa Barat	93
Grafik 4.3.	Perkembangan Ekspektasi Konsumen Terhadap Harga	94
Grafik 4.4.	Perkembangan Ekspektasi Pedagang Eceran Terhadap Harga dan Perkembangan Inflasi Bulanan Aktual Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat	94

## KETERANGAN DAN SUMBER DATA

Buku Kajian Triwulanan Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Provinsi Jawa Barat berisi kajian mengenai perkembangan ekonomi Jawa Barat pada triwulan berjalan, diterbitkan secara berkala oleh Kantor Bank Indonesia (KBI) Bandung.

Bab I Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan angka perkiraan atas dasar tahun 1993 hasil penghitungan dengan menggunakan dua pendekatan. PDRB dari sisi produksi, diestimasi berdasarkan perolehan nilai tambah pada setiap sektor. PDRB dari sisi pengeluaran diestimasi berdasarkan prediksi pengeluaran setiap komponen. Penghitungan dilakukan dengan menggunakan data historis bersumber dari data BPS dan peranan PDRB Jawa Barat terhadap PDB.

Survei dilakukan untuk memperoleh data/informasi pendukung dengan mengambil sampel dari sektor produksi (310 responden) dan konsumen (300 responden) yang lokasinya tersebar di Jawa Barat. Untuk kepraktisan, beberapa nama sektor dan subsektor disingkat sesuai kelaziman.

Bab II Perkembangan inflasi regional dari pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kota Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Bekasi, Bogor, Sukabumi dan Banjar. Data IHK bersumber dari BPS Provinsi Jawa Barat, diolah lebih lanjut untuk keperluan analisis.

Khusus data ekspor dan impor nonmigas Jawa Barat, bersumber dari Dokumen Pemberitahuan Ekspor/Impor Barang yang diolah Bagian PDIE-Direktorat Statistik Ekonomi & Moneter, Bank Indonesia, yang tercantum pula pada buku Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (SEKDA) Jawa Barat.

Bab III Data perbankan bersumber dari Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) bank-bank yang berlokasi di wilayah Jawa Barat, khusus untuk data penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek bersumber dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (SEKDA) Jawa Barat.

Data sistem pembayaran merupakan data di wilayah kerja KBI Bandung yang meliputi wilayah Bandung, Cianjur, Sukabumi, Purwakarta, Subang, Sumedang dan Garut, kecuali angka transaksi pembayaran melalui kliring dan Real Time Gross Settlement (RTGS).

Bab IV Prospek perekonomian regional dibuat atas dasar perkembangan indikator ekonomi dan moneter dengan didukung oleh hasil survei yang dilakukan KBI Bandung.

Buku ini diterbitkan pada akhir periode triwulan laporan sehingga angka dalam triwulan dimaksud sebagian merupakan angka sementara hasil estimasi. Selanjutnya, adakalanya angka yang menunjukkan penjumlahan tidak selalu sama besarnya dengan penjumlahan angka-angka yang bersangkutan karena pembulatan.

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

# INDIKATOR EKONOMI DAN MONETER

## Provinsi Jawa Barat

INDIKATOR	2004				2004	2005				2005
	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4		Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4	
<b>MAKRO</b>										
Laju Inflasi Tahunan Tiga Kota (yoy) (%)	5.17	6.16	5.29	5.81	5.81	8.59	7.51	8.78	19.43	19.43
Laju Inflasi Tahunan Tujuh Kota (yoy) (%)	n.a.	n.a.	n.a.	7.41	7.41	9.05	8.56	9.69	18.51	18.51
Laju Inflasi Triwulanan Tujuh Kota (qtq) (%)	1.95	1.74	0.82	2.71		3.51	1.26	1.86	10.97	--
- Bahan Makanan (%)	0.16	2.12	-2.86	7.61		1.49	1.72	2.66	7.91	14.37
- Makanan Jadi (%)	5.28	0.23	0.47	0.75		2.02	2.31	1.59	11.87	18.61
- Perumahan (%)	1.90	2.09	1.21	2.38		3.09	0.66	0.59	9.67	14.48
- Sandang (%)	3.41	1.33	2.22	1.26		0.52	0.87	2.41	2.22	16.15
- Kesehatan (%)	2.07	0.37	1.38	0.70		0.72	1.79	3.36	2.61	8.73
- Pendidikan (%)	0.25	0.79	9.81	0.62		0.16	0.78	5.24	1.39	7.71
- Transport (%)	0.17	3.88	1.78	0.68		14.08	0.52	1.13	27.10	47.40
Pertumbuhan PDRB (qtq) (%)	0.51	-1.33	1.88	2.20	5.08	2.36	0.07	0.88	0.53	5.31
Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta)	3,577	3,556	3,890	3,189	14,211	3,683	3,755	3,849	3811*	15,098
Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton)	2,367	2,313	2,399	1,973	9,052	2,218	2,074	2,124	2029*	8,445
Nilai Impor Nonmigas (USD Juta)	186	114	140	223	664	187	325	308	247*	1,083
Volume Impor Nonmigas (ribu ton)	60	27	42	74	203	80	125	111	79*	409
<b>PERBANKAN</b>										
<b>Bank umum konvensional:</b>										
Total Aset (Rp Triliun)	82.93	87.11	87.40	92.06	92.06	91.14	95.73	99.77	103.41	103.41
DPK (Rp Triliun)	68.77	71.19	70.47	72.31	72.31	70.89	74.90	79.32	83.54	83.54
- Tabungan (Rp Triliun)	23.81	24.88	25.55	27.67	27.67	26.74	31.93	26.86	26.50	26.50
- Giro (Rp Triliun)	13.28	14.11	14.42	14.66	14.66	14.72	15.84	16.83	16.04	16.04
- Deposito (Rp Triliun)	31.68	32.20	30.50	29.98	29.98	29.43	27.13	35.63	41.00	41.00
Kredit (Rp Triliun)	33.77	35.65	37.79	40.70	40.70	41.86	45.45	48.94	50.52	50.52
Suku Bunga Kredit (%)	16.48	16.11	16.00	14.66	14.66	14.63	14.52	15.51	16.36	16.36
Suku Bunga Deposito (%)	5.67	5.40	5.25	5.19	5.19	6.07	5.62	6.73	8.44	8.44
Rasio NPL Gross (%)	4.56	4.15	3.68	3.25	3.25	3.54	4.12	4.95	4.91	4.91
Rasio NPL Net (%)						1.84	2.23	2.97	2.73	2.73
LDR	49.11	50.08	53.63	56.22	56.22	59.05	60.68	61.69	60.48	60.48
<b>Bank Syariah:</b>										
- Aset bank syariah (Rp Triliun)	0.98	1.36	1.69	1.93	1.93	2.00	2.44	2.67	2.70	2.70
- Simpanan dalam bank syariah (Rp Triliun)	0.69	0.92	1.10	1.36	1.36	1.35	1.71	1.70	1.78	1.78
- Pembiayaan dalam syariah (Rp Triliun)	0.67	1.02	1.23	1.36	1.36	1.51	1.75	1.98	2.03	2.03
- Rasio NPF (%)	4.06	3.53	3.82	2.92	2.92	2.89	2.80	3.58	3.39	3.39
- FDR (%)	97.39	110.33	111.82	100.00	100.00	111.56	101.87	116.51	113.74	113.74
<b>SISTEM PEMBAYARAN</b>										
Posisi Kas Gabungan (Rp Triliun)	3.30	3.38	7.89	5.12		5.17	4.81	5.44	4.87	4.87
Inflow (Rp Triliun)	4.66	4.57	4.55	5.26		4.93	4.67	6.38	6.23	6.23
Outflow (Rp Triliun)	2.95	3.63	3.18	4.26		3.17	3.75	4.35	5.17	5.17
PTTB (Rp Triliun)	1.72	1.94	1.18	1.35		1.90	1.55	0.75	1.17	1.17
Nominal Kliring (Rp Triliun)	26.77	28.11	30.99	32.83		30.92	32.29	24.49	21.85	21.85
Volume Kliring (Juta Warkat)	1.88	1.96	2.13	2.08		2.04	2.16	1.58	1.18	1.18
Surplus (defisit)	104	439	119	-1,163				662.00		

Keterangan:

- Angka pertumbuhan PDRB triwulanan merupakan angka perkiraan

\* Angka perkiraan dengan data s.d. bulan November 2005

# RINGKASAN EKSEKUTIF

## KAJIAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

### PROVINSI JAWA BARAT

#### TRIWULAN IV - 2005

#### PERKEMBANGAN EKONOMI

Pada triwulan IV-2005 nilai PDRB Jawa Barat atas dasar harga konstan tahun 1993 diperkirakan tumbuh 0,53% (qtq). Pertumbuhan ini terutama didorong oleh konsumsi yang meningkat karena faktor musiman yakni hari raya keagamaan dan libur serta sektor-sektor ekonomi yang meningkat karena kegiatan-kegiatan musiman seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh konsumsi

Kenaikan harga bahan bakar minyak yang terjadi pada awal triwulan IV-2005 menurunkan pendapatan riil masyarakat sebagai akibat tingginya laju inflasi. Namun, faktor musiman masih cukup signifikan berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat sehingga meningkatkan nilai konsumsi secara keseluruhan pada triwulan ini. Hal ini didukung pula oleh adanya tambahan pendapatan bagi sebagian masyarakat berupa tunjangan hari raya dan dukungan pendanaan dari lembaga pembiayaan. Di sisi produksi, pertumbuhan ekonomi pada triwulan ini didorong oleh sektor ekonomi dominan, yakni sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) serta sektor industri pengolahan.

Pertumbuhan ekonomi didorong pula oleh peningkatan kegiatan PHR dan industri

Sektor PHR tumbuh didorong oleh peningkatan subsektor perdagangan, khususnya perdagangan eceran sehubungan dengan faktor musiman hari raya keagamaan. Sektor industri pengolahan tumbuh didorong oleh peningkatan industri alat angkutan, mesin dan peralatannya serta industri makanan jadi.

Di sisi tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah tidak dapat mendorong penyerapan tenaga kerja. Bahkan adanya kenaikan harga BBM telah mendorong meningkatnya biaya produksi dan memicu tingginya inflasi, serta mendorong tenaga kerja untuk menuntut kenaikan upah. Hal ini berdampak pada kemampuan sektor riil dalam menyerap tenaga kerja, sehingga terjadi penurunan tenaga kerja di beberapa sektor ekonomi.

Penyerapan tenaga kerja menurun.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Inflasi di Jawa Barat triwulan IV-2005 meningkat signifikan.

Kenaikan harga BBM dan meningkatnya permintaan sehubungan hari raya merupakan

Inflasi administered price mendominasi laju inflasi di Jawa Barat.

Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok transpor, komunikasi, dan jasa

Inflasi secara tahunan masih disebabkan oleh kenaikan harga

Realisasi pendapatan mengalami penurunan, realisasi

### INFLASI

Inflasi gabungan tujuh kota di Jawa Barat pada triwulan IV-2005 meningkat sangat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 1,86% (qtq) menjadi 10,97% (qtq).

Faktor determinan inflasi di Jawa Barat pada triwulan ini dari sisi penawaran adalah kenaikan harga BBM pada awal Oktober 2005, sementara dari sisi permintaan adalah meningkatnya konsumsi masyarakat sehubungan faktor musiman yaitu masa hari raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru.

Inflasi didominasi oleh pergerakan inflasi administered prices, yang mencapai 25,87% (qtq). Andil inflasi administered prices mencapai 5,64% (qtq) terhadap inflasi di Jawa Barat pada triwulan ini.

Kelompok barang dan jasa yang mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 27,10% (qtq); kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 11,87% (qtq); kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 9,67% (qtq); serta kelompok bahan makanan sebesar 7,91% (qtq). Di antara tujuh kota, Kota Bandung mengalami inflasi tertinggi, yaitu 12,56% (qtq).

Selama periode Januari sampai dengan Desember 2005, inflasi tahunan gabungan tujuh kota di Jawa Barat mencapai 18,51% (yoy), lebih tinggi daripada inflasi nasional (17,12%). Penyebab utama inflasi selama periode tersebut adalah kenaikan harga BBM pada bulan Maret dan Oktober 2005. Kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan merupakan kelompok dengan inflasi tertinggi selama periode tersebut, yakni mencapai 47,40% (yoy). Dibandingkan enam kota lainnya di Jawa Barat, selama tahun 2005 inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kota Banjar, yaitu sebesar 22,04% (yoy).

### KEUANGAN DAERAH

Secara umum, keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa dikatakan relatif baik karena seluruh belanja pemerintah dapat dibiayai dari sumber internal.

Secara triwulanan, realisasi pendapatan mengalami penurunan, sebaliknya realisasi belanja mengalami peningkatan. Realisasi pendapatan



menurun sekitar 25% (qtq) disebabkan oleh relatif rendahnya pemasukan dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Realisasi belanja meningkat 28% disebabkan oleh tingginya belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.

### PERBANKAN

Perkembangan makro ekonomi pada triwulan IV-2005 yang ditandai dengan kenaikan inflasi, akibat kenaikan harga BBM sejak awal Oktober 2005, dan meningkatnya suku bunga telah menimbulkan dampak yang kurang menggembirakan terhadap kinerja dunia usaha, termasuk perbankan di Jawa Barat. Hal ini antara lain dapat dilihat dari melambatnya pertumbuhan penyaluran kredit, penurunan profitabilitas dan meningkatnya beban biaya operasional, dibandingkan periode sebelumnya. Meskipun demikian, indikator perbankan lainnya masih menunjukkan perkembangan positif, seperti kenaikan DPK yang dihimpun perbankan, penurunan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) bank umum dan rasio pembiayaan bermasalah (non-performing finance/NPF) bank umum syariah, serta peningkatan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) bank-bank umum yang berkantor pusat di Bandung. Demikian halnya dengan aset perbankan, juga mengalami kenaikan, terutama didorong oleh peningkatan penyaluran kredit dan pembiayaan bank umum konvensional dan syariah.

Meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan III-2005, penyaluran kredit bank umum di Jawa Barat pada triwulan IV-2005 masih tumbuh sebesar 3,24% (qtq). Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan penyerapan kredit di sektor PHR, sektor pertanian dan sektor industri pengolahan.

Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) bank umum di Jawa Barat pada triwulan IV-2005 mencapai 5,32% (qtq), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit pada triwulan sebelumnya. Kenaikan DPK bank umum diperkirakan terjadi seiring dengan peningkatan suku bunga simpanan yang ditawarkan perbankan. Pada periode laporan pertumbuhan signifikan terjadi pada jenis simpanan Deposito, terutama didorong oleh pertumbuhan penghimpunan yang tinggi pada kelompok bank umum pemerintah (BUP),

Kinerja perbankan di Jawa Barat pada triwulan IV-2005 secara umum relatif masih stabil.

Penyaluran kredit bank umum di Jawa Barat pada triwulan IV-2005 tumbuh 3,24% (qtq).

Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) bank umum di Jawa Barat pada triwulan IV-2005 mencapai 5,32% (qtq).

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Rasio kredit bermasalah (NPL) membaik, pendapatan bunga bersih (NIM) tujuh bank umum yang berkantor pusat positif, profitabilitas menurun dan beban operasional meningkat.

diikuti kemudian oleh kelompok bank umum swasta nasional (BUSN) dan kelompok bank asing dan campuran (BAC).

Walaupun kondisi makro ekonomi pada triwulan IV-2005 memberi tekanan yang cukup berat, kualitas kredit dari ketujuh bank umum yang berkantor pusat di Bandung tidak mengalami penurunan, bahkan meningkat, sebagaimana ditunjukkan oleh penurunan rasio NPL ketujuh bank umum tersebut dari 1,02% pada triwulan III-2005 menjadi 0,82% pada triwulan IV-2005. Demikian halnya dengan pendapatan bunga bersih/net interest margin (NIM), meskipun ada tekanan penurunan pendapatan bunga, NIM dari ketujuh bank umum yang berkantor pusat di Bandung tetap mengalami peningkatan, dari 7,24% pada triwulan III-2005 menjadi 9,99% pada triwulan IV-2005.

Meskipun rasio NPL mengalami penurunan dan NIM mengalami kenaikan, profitabilitas dari ketujuh bank umum yang berkantor pusat di Bandung menunjukkan perkembangan yang sebaliknya. Tingginya beban bunga operasional belakangan ini, sementara jumlah pendapatan relatif tidak berubah, menyebabkan tingkat profitabilitas ketujuh bank umum tersebut mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan return on asset (ROA)-nya, yang menurun dari posisi rata-rata 2,30% pada triwulan III-2005 menjadi 2,14% pada triwulan IV-2005. Perkembangan yang sama terjadi pula pada tingkat efisiensi dari ketujuh bank umum tersebut, yang mengalami penurunan sebagaimana ditunjukkan oleh kenaikan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dari rata-rata sebesar 75,51% menjadi 78,71% pada triwulan IV-2005.

### PROSPEK EKONOMI

Memasuki tahun 2006, perekonomian Jawa Barat diperkirakan masih menghadapi permasalahan lanjutan sebagai dampak kebijakan ekonomi tahun 2005. Harga barang yang secara umum meningkat sejak awal triwulan IV-2005, akan memberatkan daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan tetap. Harapan perbaikan daya beli hanya akan bertumpu kepada upaya Pemerintah melalui pemberian bantuan

langsung tunai dan penyesuaian gaji atau upah karyawan.

Pada triwulan I-2006 mendatang, perekonomian diperkirakan masih akan tumbuh positif didorong sektor pertanian yang mengalami panen raya produk tabama, yaitu padi. Kegiatan yang berlangsung dalam rangka masa panen ini selanjutnya akan mempengaruhi kegiatan lain yang terkait, seperti kegiatan di sektor perdagangan dan sektor pengangkutan.

Laju inflasi gabungan tujuh kota di Jawa Barat pada triwulan I-2006 secara triwulanan diperkirakan lebih rendah dibandingkan inflasi pada triwulan IV-2005. Perlambatan disebabkan oleh mulai meredanya dampak kenaikan harga BBM tahun 2005 terhadap kenaikan harga barang dan jasa serta turunnya harga bahan makanan khususnya beras yang mengalami panen raya. Resiko tekanan inflasi diperkirakan dari sisi penawaran seperti gangguan pasokan dan distribusi serta ekspektasi terhadap inflasi yang dipengaruhi kekuatiran antara lain kenaikan kembali BBM dan rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik.

Fungsi intermediasi diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring dengan perbaikan kondisi makro ekonomi. Sektor yang diperkirakan mendapat perhatian perbankan adalah sektor UMKM khususnya yang bergerak di bidang perdagangan. Namun demikian, di triwulan I-2006, penyaluran kredit diperkirakan akan melambat, terutama di bulan pertama karena masih tingginya suku bunga. Resiko yang perlu diperhatikan perbankan adalah memburuknya kualitas kredit dampak dari menurunnya kemampuan membayar kembali debitur

PDRB pada triwulan mendatang diperkirakan masih tumbuh positif.

Laju inflasi triwulan I-2006 diperkirakan melambat. Resiko diperkirakan didorong oleh ekspektasi rencana kenaikan TDL.

Sektor perbankan kembali berkiprah mendukung geliat perekonomian

Halaman ini sengaja dikosongkan  
This page is intentionally blank

# BAB 1

## PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

### 1. KONDISI UMUM

Kondisi perekonomian yang kurang kondusif setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada awal triwulan IV-2005 menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian Jawa Barat. Meskipun demikian, perekonomian Jawa Barat mampu tumbuh 0,53% (qtq), terutama karena konsumsi yang meningkat sehubungan dengan perayaan hari besar keagamaan (Ramadhan, Idul Fitri, Natal dan tahun baru) dan liburan. Meningkatnya konsumsi ini didorong pula oleh adanya tambahan pendapatan bagi sebagian masyarakat berupa tunjangan hari raya, dan dukungan pendanaan dari lembaga pembiayaan.

Di sisi produksi, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2005 didorong oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) dan industri pengolahan. Beberapa sektor lain mengalami perlambatan, bahkan sebagian diantaranya mengalami pertumbuhan negatif, seperti sektor pertanian dan sektor pertambangan. Pertumbuhan positif sektor PHR pada triwulan IV-2005 disebabkan oleh meningkatnya kegiatan di subsektor perdagangan eceran, sehubungan dengan meningkatnya konsumsi masyarakat. Pertumbuhan positif sektor industri pengolahan disebabkan oleh meningkatnya produksi di beberapa industri yang memiliki kontribusi besar, seperti industri makanan jadi dan industri alat angkutan khususnya kendaraan bermotor.

Di sisi pengeluaran, selain rumah tangga, konsumsi pemerintah turut menggairahkan kegiatan perekonomian melalui peningkatan belanja pemerintah di semua komponen (belanja aparatur dan belanja publik). Investasi melalui pembentukan modal tetap bruto (PMTB) meningkat didorong oleh adanya penambahan barang modal dan peningkatan kapasitas produksi, khususnya pada industri otomotif.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah belum memberikan pengaruh yang berarti dalam mendorong penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan SKDU triwulan IV-2005, dari sembilan sektor ekonomi, hanya dua sektor ekonomi yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja, yakni sektor bangunan/konstruksi, serta sektor

## PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Namun, daya serap tenaga kerja di kedua sektor ini relatif kecil dan tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja secara keseluruhan.

### 2. INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kondisi ekonomi makro selama tahun 2005 berperan dalam menentukan kondisi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Hal ini tercermin dari pencapaian indikator-indikator kesejahteraan yang telah ditetapkan sebagai target yang akan dicapai Pemerintah Daerah seperti Indeks Pembangunan Manusia tergambar dari indeks daya beli, kesehatan dan pendidikan. Masalah utama yang dihadapi umumnya bermula dari sulitnya peningkatan daya beli karena pengaruh kondisi perekonomian. Oleh karena itu, untuk mendorong peningkatan IPM Jawa Barat, masalah-masalah yang menjadi penghambat perkembangan daya beli masyarakat perlu lebih dicermati, dengan tetap memperhatikan permasalahan pada aspek pendidikan dan kesehatan.

Permasalahan daya beli sampai dengan triwulan ini bertambah berat sehubungan dengan naiknya harga barang secara umum (laju inflasi 18,51% (yoy)) relatif tanpa diikuti dengan peningkatan pendapatan riil. Penurunan pendapatan riil ini lebih signifikan pengaruhnya terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memang sebelumnya sudah sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Masalah dalam aspek pendidikan adalah rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan karena kendala pendanaan dan kendala geografis. Lokasi sekolah yang relatif jauh dari rumah, khususnya untuk wilayah pedesaan, mengakibatkan tingginya biaya transportasi sehingga mengurangi kemampuan masyarakat untuk biaya pendidikan. Menurunnya daya beli riil masyarakat sehubungan dengan kenaikan biaya pendidikan sebagaimana tercermin dari inflasi jasa pendidikan pada tahun 2005 yang mencapai 7,37% (yoy), menyebabkan semakin banyak warga yang mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikan. Berkaitan dengan masalah ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, terutama melalui program bantuan operasional sekolah (BOS) guna membantu masyarakat kurang mampu dalam melanjutkan pendidikannya.

Sementara itu, masalah yang dihadapi dalam aspek kesehatan adalah akses penduduk miskin terhadap layanan kesehatan dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perilaku hidup sehat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dengan inflasi jasa kesehatan yang pada tahun ini 11,63% (yoy), alokasi pengeluaran masyarakat untuk keperluan kesehatan akan semakin berkurang.

Dalam rangka pencapaian target IPM, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengembangkan berbagai program kegiatan yang lebih efektif guna meningkatkan kualitas variabel-variabel yang menjadi penentu perkembangan indeks-indeks pembentuk IPM, terutama Program Pendanaan Kompetisi (PPK) Akselerasi Peningkatan IPM Jawa Barat. Program ini bertujuan untuk memacu motivasi dan inovasi pemerintah daerah bersama masyarakat kabupaten/kota dalam menjalankan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian target IPM tersebut, khususnya dengan mengakselerasi pencapaian IPM di setiap kabupaten/kota. Melalui program ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan insentif kepada pemerintah kabupaten/kota, yang dinilai unggul dalam programnya. Total dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk program tersebut adalah sekitar Rp190 miliar untuk tahun anggaran 2006 (Lihat Boks 1. Program Pendanaan

### BOKS 1. PROGRAM PENDANAAN KOMPETISI (PPK): AKSELERASI PENINGKATAN IPM JAWA BARAT<sup>1</sup>

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki komitmen yang kuat untuk mengakselerasi pencapaian kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dengan target IPM 80 di tahun 2010. Untuk menjalankan misi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan Program Pendanaan Kompetisi (PPK Akselerasi Peningkatan IPM Jawa Barat selanjutnya disingkat dengan “PPK”) yang fokus pada kompetisi kinerja kabupaten/kota di dalam menggalang sinergi dengan pemerintah provinsi, masyarakat, swasta, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan setempat.

PPK memiliki karakteristik yang berbeda dengan pendanaan reguler, yaitu merupakan pendanaan untuk program dan kegiatan yang berdampak kepada akselerasi peningkatan IPM Jawa Barat secara berkelanjutan karena melibatkan kepentingan berbagai stakeholder terkait.

Karakteristik berikutnya adalah bahwa pendanaan program tersebut berbasis aktivitas (activity based) sesuai dengan kebutuhan nyata dengan indikator keberhasilan terukur, inovatif, dan dikelola dengan akuntabilitas tinggi. Selanjutnya, pendanaan disusun dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, swasta, dan komunitas perguruan tinggi setempat. Kemudian, karakteristik lain adalah pendanaannya bersifat on top diluar pendanaan bantuan reguler dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terakhir, PPK merupakan pendanaan yang dikompetisikan berbasis keunggulan kinerja kabupaten/kota dan memenuhi kriteria seleksi PPK.



Untuk menyandingkan suatu kabupaten/kota pada posisi yang seimbang dan adil dalam berkompetisi dengan kabupaten/kota lainnya, maka dilakukan pengelompokan kabupaten/kota yang berkompetisi berdasarkan parameter tertentu, yang dinamakan kluster. Masing-masing kluster mempunyai misi pendanaan tertentu yang tidak sama, sesuai dengan tingkat pencapaian IPM-nya. Masing-masing pendanaan dikemas dalam bentuk PPK1 (PPK untuk kluster 1), PPK2 (PPK untuk kluster 2), dan PPK3 (PPK untuk kluster 3). Basis peng-klusteran PPK adalah:

1. Pencapaian IPM oleh kabupaten/kota pada tahun 2003 (40%)
2. Peningkatan IPM yang dicapai oleh kabupaten/kota selama 1999 sampai dengan tahun 2003 (30%) (kecuali untuk Kota Banjar, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Depok menggunakan data kabupaten/kota induknya)
3. Pencapaian IPM kabupaten/kota saat ini terhadap target IPM kabupaten/kota yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (30%).

Dengan data tersebut dilakukan perhitungan berbasis Analisis Kluster (Cluster Analysis Metoda K-Means), maka wilayah Jawa Barat dibagi atas tiga kluster sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini.

Fokus umum PPK adalah program yang berbasis pada partisipasi masyarakat untuk mengakselerasi peningkatan IPM, khususnya program yang mampu mendongkrak Indeks Daya Beli. Program tersebut berbasis pada aktivitas yang berkelanjutan, tidak semata-mata melakukan investasi fisik, dan manfaatnya terutama dirasakan oleh masyarakat miskin. Hal lain yang menjadi fokus adalah



Kluster	Kabupaten/Kota	Keterangan
Kluster 1	Kota Bandung, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Banjar, Kab. Bekasi, Kab. Ciamis.	 3 pemenang, masing-masing Rp25 Miliar.
Kluster 2	Kota Tasikmalaya, Kab. Sumedang, Kab. Purwakarta, Kab. Bogor, Kab. Bandung, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kab. Sukabumi, Kab. Subang, Kab. Tasikmalaya, Kab. Cianjur, Kab. Garut.	 5 pemenang, masing-masing Rp20 Miliar
Kluster 3	Kab. Karawang, Kab. Cirebon, Kab. Indramayu	

program pembangunan individu pada setiap tingkat sumber daya manusia, mulai dari rumah tangga, RT, RW, dan program pembangunan kapasitas (capacity building) mulai tingkat kelurahan, kecamatan, sampai pada tingkat kabupaten/kota.

Mekanisme seleksi adalah masing-masing daerah menyampaikan proposal evaluasi diri (PED) sebagai bentuk seleksi tahap pertama. Untuk menilai PED, ditetapkan lima kriteria, yaitu PED harus membuat jабaran terhadap kondisi lingkungan yang berpengaruh. Harus membuat analisis SWOT yang komprehensif, dan basis data yang lengkap dan akurat. Menampilkan akar masalah yang fokus dan jelas, serta membuat rumusan solusi yang relevan. Hasil seleksi pertama diputuskan 17 kabupaten/kota yang lolos seleksi.

Pada tahap kedua, daerah yang lolos kembali diminta untuk menyusun dan menyampaikan proposal komprehensif (PK) dan proposal implementasi PPK (PIPPK). Kedua proposal ini menjabarkan lebih detail dan fokus tentang program yang diusulkan terkait peningkatan IPM di daerah tersebut. Pada seleksi tahap kedua, dari 17 kabupaten/kota yang lolos seleksi, dikompetisikan menjadi 12 kabupaten/kota yang lolos seleksi ke tahap ketiga untuk dilakukan pengecekan ke lapangan.

Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk penilaian akhir, dimana dari 12 kabupaten/kota yang ikut seleksi, hanya sembilan daerah yang dinyatakan sebagai pemenang PPK. Saat ini, daerah pemenang PPK di kluster I adalah Kota Sukabumi, Kota Cirebon, dan Kab. Ciamis. Di kluster II adalah Kab. Subang, Kab. Bandung, Kota Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya dan Kab. Cianjur. Sedangkan di kluster III yaitu Kab. Indramayu.

Meski sembilan daerah telah dinyatakan lolos sebagai pemenang PPK, tahap berikutnya adalah pendampingan dalam merumuskan program atau kegiatan untuk peningkatan IPM yang lebih tajam. Masing-masing daerah kembali menyampaikan rumusan program untuk dikaji apakah program yang diusulkan kreatif, inovatif dan bisa mendorong partisipasi masyarakat.

<sup>1</sup> Program Pendanaan Kompetisi (PPK) Akselerasi Peningkatan IPM Jawa Barat: Panduan Penyusunan Proposal PPK Tahun 2006, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2005.

## PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

Kompetisi (PPK): Akselerasi Peningkatan IPM Jawa Barat).

### 3. SISI PRODUKSI

Pada triwulan IV-2005, pertumbuhan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di Jawa Barat mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni dari 0,88% pada triwulan III-2005 menjadi 0,53% (qtq) dengan nilai produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 1993 sebesar Rp17,67triliun. Melambatnya pertumbuhan ini, disebabkan oleh menurunnya ekspansi usaha untuk meningkatkan produksi sehubungan dengan meningkatnya beban produksi karena tekanan kenaikan harga BBM. Bahkan, peningkatan nilai tambah produk bruto di beberapa sektor

Tabel 1.1. PDRB Jawa Barat dari Sisi Produksi (Rp Miliar)

NAMA SEKTOR	2004*		2005*				
	Tw. 3	Tw. 4	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4	Total
1. Pertanian	2,107	2,068	2,283	2,102	2,115	2,099	8,599
2. Pertambangan	728	741	731	737	737	734	2,940
3. Industri Pengolahan	6,414	6,576	6,646	6,757	6,764	6,806	26,973
4. Listrik, Gas, Air Bersih	574	582	573	561	562	570	2,267
5. Bangunan/Konstruksi	593	608	621	647	650	651	2,568
6. PHR	2,804	2,894	3,003	3,034	3,102	3,129	12,268
7. Pengangkutan & Kom.	1,002	1,042	1,018	1,025	1,031	1,051	4,125
8. Keuangan	817	844	851	852	883	873	3,459
9. Jasa - Jasa	1,607	1,658	1,688	1,712	1,735	1,759	6,894
<b>PDRB</b>	<b>16,646</b>	<b>17,013</b>	<b>17,414</b>	<b>17,427</b>	<b>17,579</b>	<b>17,672</b>	<b>70,092</b>

Keterangan:

\* Angka perkiraan, atas dasar harga konstan 1993.

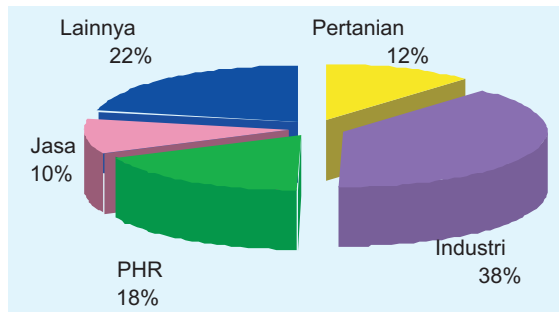
Nama sektor disingkat untuk kepraktisan.

ekonomi, seperti di sektor pertanian dan pertambangan, mengalami pertumbuhan negatif.

Pertumbuhan pada triwulan ini, terutama didorong oleh adanya peningkatan nilai tambah produk bruto pada sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR), serta sektor industri pengolahan, yang selama ini menjadi leading sector perekonomian Jawa Barat (lihat Tabel 1.1). Pertumbuhan nilai tambah produk bruto di sektor PHR didorong oleh meningkatnya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang diproduksi/diperdagangkan oleh sektor tersebut, sementara di sektor industri pengolahan terutama didorong oleh meningkatnya produksi pada industri makanan jadi dan industri alat angkutan, mesin, dan peralatannya.

Pertumbuhan positif PDRB Jawa Barat pada triwulan IV-2005, sejalan dengan hasil

Grafik 1.1. Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Jawa Barat Triwulan IV-2005



Sumber: BPS, diolah

SKDU di Jawa Barat, yang mengindikasikan adanya peningkatan produksi dan penjualan, khususnya pada sektor PHR dan industri pengolahan.

Berdasarkan pangsaanya terhadap PDRB Jawa Barat, kontribusi setiap sektor

ekonomi tidak mengalami perubahan yang berarti. Sektor penyumbang terbesar PDRB sampai dengan triwulan IV-2005 masih didominasi oleh sektor industri pengolahan, sektor PHR, dan sektor pertanian (lihat Grafik 1.1).

### 3.1. SEKTOR EKONOMI DOMINAN

#### 3.1.1. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN (NONMIGAS)

Sektor industri pengolahan pada triwulan IV-2005 masih dapat tumbuh 0,6% (qto), meskipun menghadapi tekanan yang berat dengan adanya kenaikan harga BBM yang sangat tinggi pada awal triwulan. Sebagaimana pada triwulan-triwulan sebelumnya, sektor industri pengolahan masih didominasi oleh industri-industri utama di Jawa Barat, seperti industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki, industri alat angkutan, mesin dan peralatannya, serta industri makanan jadi. Kontribusi nilai tambah bruto industri pengolahan terhadap pertumbuhan PDRB Jawa Barat mencapai 0,28%, yang pada triwulan ini terutama disumbang oleh peningkatan produksi pada industri alat angkutan, mesin, dan peralatannya, serta industri makanan.

Peningkatan produksi di industri alat angkutan, mesin, dan peralatannya seiring dengan adanya investasi di industri otomotif dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi, baik untuk produksi motor maupun mobil. Investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi ini didorong oleh meningkatnya permintaan baik dari dalam maupun luar negeri.

Dampak kenaikan harga BBM pada 1 Oktober 2005 terhadap penjualan kendaraan bermotor, diperkirakan lebih banyak berpengaruh terhadap penjualan mobil di dalam negeri. Sementara untuk penjualan sepeda motor yang lebih irit bahan bakar diperkirakan tidak banyak terpengaruh, karena kebutuhan masyarakat terhadap jenis kendaraan ini di dalam

## PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

negeri masih sangat tinggi. Penjualan produk kendaraan di dalam negeri pada triwulan IV-2005, khususnya sepeda motor mengalami kenaikan, didorong oleh meningkatnya permintaan masyarakat terhadap kendaraan baru/kebutuhan transportasi pada masa hari raya keagamaan. Sementara itu, penjualan produk otomotif di pasar internasional diperkirakan relatif stabil dengan kecenderungan meningkat, karena masih banyaknya permintaan yang belum terpenuhi oleh industri mobil dalam negeri.

### INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)

Berbeda dengan perkembangan yang terjadi pada industri alat angkutan, mesin, dan peralatannya; industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki pada triwulan ini menunjukkan penurunan produksi. Penurunan tersebut terutama terjadi pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT), yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagian sesungguhnya merupakan permasalahan lama, seperti kemampuan mesin yang semakin menurun dan melemahnya daya saing terhadap produk-produk sejenis dari luar negeri.

Kegiatan produksi di industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki sedikit dipengaruhi oleh adanya tambahan hari libur selama triwulan IV-2005, dimana terdapat kebiasaan sebagian besar pekerja untuk mengambil cuti dalam rangka merayakan hari raya keagamaan di daerah asalnya. Khusus industri tekstil, untuk memenuhi permintaan terhadap produk tekstil pada triwulan ini, sebagian perusahaan telah mempersiapkannya dengan menggunakan sebagian hasil produksi pada triwulan sebelumnya.

Industri TPT sangat besar peranannya dalam mendorong perkembangan industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki di Jawa Barat. Disamping itu, industri ini merupakan salah satu industri yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya untuk mendorong perkembangan industri tersebut. Dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk TPT Jawa Barat, khususnya untuk perdagangan internasional, saat ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat mendorong industri TPT untuk meningkatkan produk-produk fashion garment, karena nilai tambah ekspor produk tersebut lebih tinggi daripada ekspor tekstil lembaran. Hal ini didukung pula oleh struktur industri TPT di Jawa Barat yang saat ini sudah memiliki prasarana cukup memadai untuk meningkatkan produknya menjadi produk fashion. Selain memiliki pabrik tekstil dan garmen yang relatif bagus, bahan baku untuk fashion,

seperti sutra dan poliester juga tersedia di dalam negeri. Untuk itu, dengan dukungan lembaga penelitian dan pengembangan TPT diharapkan dapat melakukan inovasi dan meningkatkan produktivitasnya, terutama mengenai desain dan mutu produk.

Disamping mendorong industri TPT untuk meningkatkan produk-produk fashion, pemerintah daerah juga berupaya untuk mengembangkan sentra industri tekstil Majalaya, dengan menggunakan pola pendekatan pengembangan kluster (sentra-sentra produksi), antara lain melalui peningkatan kerja sama perdagangan dengan provinsi lain. Sejalan dengan upaya tersebut, dengan dukungan pemerintah, perbankan, dan pihak-pihak terkait lainnya, diharapkan dapat melakukan restrukturisasi mesin untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, terutama melalui penggantian mesin-mesin tekstil yang sudah tua (obsolete), serta pengembangan sarana pendukung, seperti pusat perdagangan, informasi, outlet, sampai tempat pertemuan.

Sementara itu, industri lainnya yang juga memiliki peran dominan dalam sektor industri, yakni industri makanan, minuman dan tembakau (mamin), masih terus mengalami peningkatan produksi sebagaimana terjadi pada triwulan-triwulan sebelumnya. Peningkatan produksi terutama didorong oleh meningkatnya permintaan masyarakat, sehubungan dengan kebiasaan masyarakat dalam merayakan hari besar keagamaan yang berlangsung pada triwulan ini, yaitu hari raya Idul Fitri, Natal, dan tahun baru. Hal ini diindikasikan pula oleh hasil SKDU, yang menunjukkan adanya peningkatan volume produksi dan penjualan industri mamin pada triwulan ini.

Industri rotan yang merupakan salah satu industri andalan di Jawa Barat, khususnya di wilayah Cirebon, pada triwulan ini belum menunjukkan adanya peningkatan produksi. Dalam beberapa triwulan terakhir, perkembangan industri rotan Jawa Barat terhambat berbagai kendala, terutama terkait dengan meningkatnya biaya bahan baku dan menurunnya daya saing produk jadi rotan di pasar internasional. Berkaitan dengan masalah bahan baku, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berupaya mengadakan kerjasama dengan daerah penghasil bahan baku rotan guna menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pasokan bahan baku bagi industri rotan Jawa Barat.

### 3.1.2. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN

Pada triwulan IV-2005, sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) mengalami pertumbuhan 0,86% (qtq). Kenaikan produksi/penjualan yang mendorong pertumbuhan

## PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

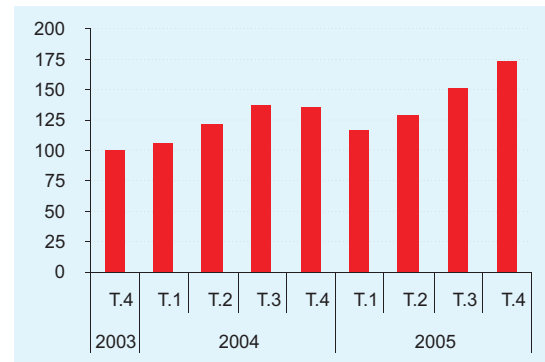
tersebut terjadi di semua subsektornya. Subsektor yang memberikan kontribusi terbesar masih merupakan subsektor perdagangan besar dan eceran, diikuti oleh restoran, dan hotel.

Subsektor perdagangan besar dan eceran pada triwulan ini tumbuh 0,98% (qtq), didorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat dalam rangka perayaan hari raya, terutama untuk produk-produk perlengkapan

rumah tangga dan pakaian, serta kendaraan bermotor. Hasil Survei Penjualan Eceran yang dilakukan oleh KBI Bandung selama triwulan IV-2005 mengindikasikan bahwa pada awal triwulan terjadi penurunan penjualan pada sebagian besar produk sebagai dampak dari kenaikan harga BBM yang memicu inflasi pada bulan Oktober. Namun demikian, pada awal triwulan tersebut penjualan produk perlengkapan rumah tangga, seperti mebel dan produk elektronik, serta sepeda motor masih mengalami peningkatan. Peningkatan ini diperkirakan karena belum besarnya dampak kenaikan harga BBM terhadap harga jual untuk produk-produk tersebut, yang sebagian diantaranya merupakan produksi dari triwulan sebelumnya. Pada bulan November, penjualan kendaraan bermotor dan produk perlengkapan rumah tangga menunjukkan penurunan, dan kembali meningkat pada bulan Desember, sehingga secara keseluruhan, nilai penjualan pada triwulan IV-2005 mengalami pertumbuhan yang positif.

Pertumbuhan pada subsektor hotel dan restoran pada triwulan IV-2005 didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap jasa hotel dan restoran, khususnya di perkotaan dan daerah tujuan wisata di Jawa Barat, sehubungan dengan adanya tambahan hari libur pada saat hari raya Idul Fitri dan liburan menjelang akhir tahun. Adanya peledakan bom di Bali pada awal triwulan IV-2005 diperkirakan telah mempengaruhi keputusan sejumlah

Grafik 1.2. Perkembangan Indeks Penjualan Perdagangan Eceran Hasil SPE

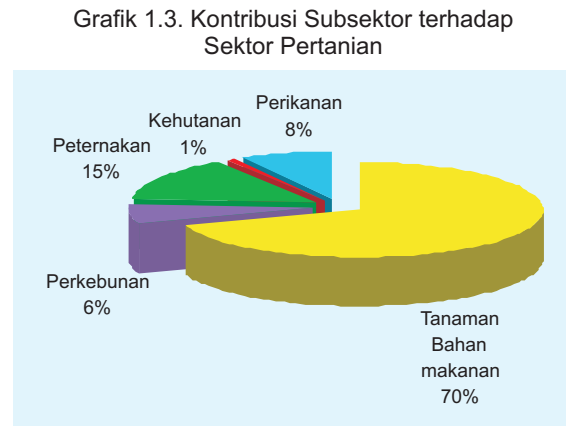


Sumber: Bank Indonesia Bandung

wisatawan domestik untuk mengalihkan kunjungannya ke wilayah Jawa Barat. Hal ini berdampak positif terhadap perkembangan subsektor perdagangan, khususnya perdagangan eceran untuk produk pakaian, aksesoris dan barang konsumsi lainnya.

3.1.3 SEKTOR PERTANIAN

Sektor pertanian pada triwulan IV-2005 tumbuh negatif, terutama disebabkan oleh penurunan subsektor tanaman bahan makanan (tabama), khususnya padi, yang



Sumber: BPS, diolah

merupakan produk dominan dengan pangsa sekitar 70%. Penurunan produksi yang terjadi ini terutama dipengaruhi oleh berlangsungnya musim tanam dan faktor cuaca (musim hujan). Terjadinya curah hujan yang tinggi di beberapa daerah sentra produksi tabama menyebabkan sebagian produk pertanian mengalami gagal panen atau penurunan kualitas. Selain itu, penurunan produksi di subsektor tabama dipengaruhi pula dengan adanya gangguan hama/penyakit. Faktor cuaca dan penyakit ini mempengaruhi pula penurunan produksi di subsektor lainnya, seperti perkebunan dan perikanan.

Sementara itu, perkembangan industri agro sebagai salah satu industri lanjutan di sektor pertanian menunjukkan arah yang positif. Secara triwulanan, nilai ekspor beberapa

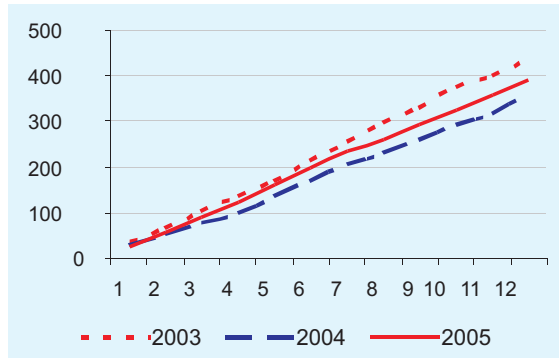
Tabel 1.2. Nilai Ekspor Beberapa Komoditas Agro Utama (USD Juta)

NAMA KOMODITAS	2004			2005				
	Tw. 3	Tw. 4	Total	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4	Total
Hasil susu dan telur	2.03	3.14	10.75	2.44	2.19	3.53	3.46	11.61
Ikan, kerang, moluska dan olahannya	7.50	7.71	24.10	5.96	6.53	5.98	5.99	24.46
Gandum dan olahan gandum	15.26	13.99	60.76	14.14	21.78	16.38	14.70	67.01
Buah-buahan dan sayur-sayuran	1.80	2.94	9.18	1.57	1.87	2.24	3.05	8.73
Gula, olahan gula dan madu	10.12	9.22	39.14	9.50	11.56	7.46	8.17	36.69
Kopi, teh, coklat rempah-rempah	41.65	48.00	159.49	40.87	44.23	42.27	41.26	168.64
Hasil olahan makanan lainnya	7.13	8.25	27.25	9.26	11.28	9.79	13.85	44.18
Kayu dan gabus	2.48	1.95	12.91	2.83	2.97	3.20	3.10	12.10
Bahan nabati dan hewani lainnya	4.11	3.91	16.54	4.70	4.28	4.02	4.24	17.24
Jumlah	92.08	99.11	360.11	91.27	106.69	94.87	97.82	390.65

Keterangan: \* Perkiraan untuk bulan Desember, atas dasar data sampai bulan November  
 Sumber : SEKDA KBI Bandung

## PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

Grafik 1.4. Perkembangan Nilai Ekspor Kumulatif Beberapa Komoditas Agro Utama di Jawa Barat (USD Juta)



Sumber: SEKDA KBI Bandung, diolah

komoditas agro utama pada triwulan IV-2005 mengalami peningkatan. Peningkatan nilai ekspor ini didorong oleh peningkatan ekspor komoditas buah-buahan dan sayur-sayuran serta hasil olahan makanan lainnya, yang masing-masing tumbuh lebih dari 30% (Tabel 1.2).

Peningkatan nilai ekspor komoditas agro, tidak diikuti dengan kenaikan volume ekspor seluruh komoditas. Sebagian komoditas mengalami kenaikan volume, sementara sebagian lainnya mengalami penurunan, sehingga secara keseluruhan, volume ekspor komoditas agro utama relatif tetap. Komoditas yang mengalami kenaikan volume ekspor relatif tinggi adalah komoditas hasil susu dan telur, komoditas buah dan sayuran, serta komoditas gandum dan olahan gandum.

### 3.2. SEKTOR-SEKTOR LAIN

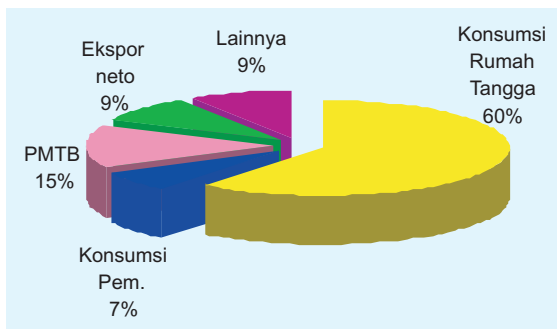
Pada triwulan IV-2005, terdapat empat sektor lain yang tumbuh positif, yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor listrik, gas dan air bersih (LGA), sektor jasa-jasa serta sektor bangunan/konstruksi. Khusus untuk sektor pengangkutan/komunikasi, pertumbuhan yang terjadi pada triwulan ini bersifat musiman, didorong oleh meningkatnya penggunaan jasa transportasi oleh masyarakat dalam rangka hari raya keagamaan/tahun baru, baik transportasi darat (bus dan kereta api) maupun transportasi udara.

Sektor bangunan/konstruksi masih terus mengalami pertumbuhan positif meskipun mengalami perlambatan, didukung oleh meningkatnya pembangunan properti di beberapa daerah, antara lain di Kota Bandung dan Kabupaten Bogor. Hasil survei penjualan eceran (SPE) yang dilakukan oleh KBI Bandung menunjukkan bahwa pada triwulan IV-2005 masih



terjadi peningkatan penjualan perlengkapan konstruksi. Demikian halnya dengan hasil SKDU dan hasil survei properti residensial (SHPR) yang dilakukan oleh KBI Bandung, yang masing-masing menunjukkan adanya peningkatan kegiatan di sektor bangunan/konstruksi dan penjualan rumah tinggal.

Grafik 1.5. Pangsa Terhadap PDRB Triwulan IV-2005 (%)



Sumber: BPS, diolah

#### 4. SISI PENGELUARAN

Di sisi pengeluaran, perekonomian Jawa Barat masih didukung oleh besarnya konsumsi rumah tangga (Grafik 1.5). Dibandingkan triwulan sebelumnya, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pembentukan PDRB menunjukkan kecenderungan meningkat.

Peranan konsumsi pemerintah dan investasi terhadap PDRB Jawa Barat juga mengalami peningkatan. Konsumsi pemerintah pada triwulan ini merupakan konsumsi yang tertinggi, sebagaimana tercermin dari belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini sama dengan pola belanja pemerintah, pada tahun-tahun sebelumnya, dimana belanja pemerintah mengalami peningkatan pada triwulan terakhir.

Sementara itu, dari sisi perdagangan luar negeri, kegiatan ekspor dan impor pada triwulan ini mengalami penurunan. Namun demikian, penurunan yang terjadi pada impor lebih besar dibandingkan ekspor, sehingga kegiatan perdagangan luar negeri Provinsi Jawa Barat masih mengalami surplus (net ekspor).

##### 4.1. KONSUMSI

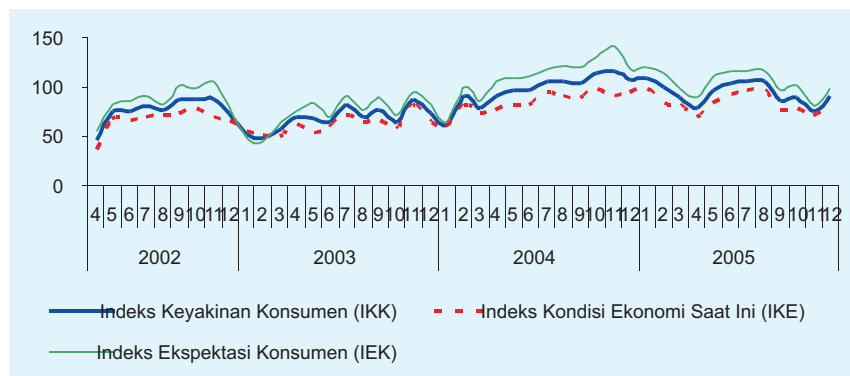
Kenaikan harga BBM yang terjadi pada awal triwulan telah mendorong peningkatan laju inflasi selama triwulan IV-2005, terutama pada bulan Oktober dan November. Hal ini berdampak pada menurunnya pendapatan riil masyarakat. Namun demikian, konsumsi rumah tangga masih mengalami pertumbuhan, baik secara triwulanan (2,91%) maupun tahunan (3,57%). Peningkatan konsumsi rumah tangga yang terjadi pada triwulan ini

## PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

disebabkan oleh faktor musiman, yaitu meningkatnya konsumsi masyarakat pada hari besar keagamaan yang terjadi pada bulan November (Idul Fitri) dan Desember (Natal, tahun baru). Menjelang hari raya, masyarakat meningkatkan pengeluarannya terutama untuk pembelian barang seperti pakaian dan makanan jadi. Peningkatan pengeluaran konsumsi pada triwulan IV-2005 didukung oleh adanya bonus atau tunjangan hari raya serta pembiayaan dari sektor keuangan.

Peningkatan konsumsi rumah tangga tercermin pula dari peningkatan nilai penjualan produk kendaraan bermotor, bahan bakar dan peralatan rumah tangga sebagaimana ditunjukkan oleh hasil Survei Penjualan Eceran di Kota Bandung dan sekitarnya, serta dari peningkatan penyaluran kredit konsumsi. Baki debit kredit konsumsi yang disalurkan oleh bank-bank umum di Jawa Barat meningkat 2,4% dibandingkan triwulan sebelumnya, atau

Grafik 1.6. Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen



Sumber: Bank Indonesia Bandung

sebesar Rp579 miliar.

Berdasarkan hasil Survei Konsumen yang dilakukan Kantor Bank Indonesia Bandung pada triwulan ini, terlihat bahwa keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi Jawa Barat pada triwulan IV-2005 berfluktuasi. Pada bulan Oktober, optimisme konsumen mengalami peningkatan, namun kemudian menurun pada bulan November terkait dengan dampak kenaikan harga BBM, dan meningkat kembali pada bulan Desember.

Pada bulan Oktober 2005, Indeks keyakinan konsumen (IKK) mencapai 90,11, sedikit meningkat dibandingkan bulan lalu (86,06), didorong oleh peningkatan penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu dan peningkatan ekspektasi penghasilan 6 bulan yang akan

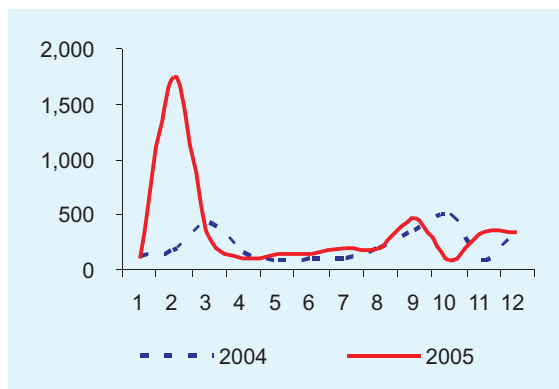
datang. Pada bulan November, IKK mencapai 75,44, menurun dibandingkan bulan sebelumnya (90,11), disebabkan oleh penurunan rencana konsumsi saat ini serta penurunan kondisi ekonomi Indonesia dan ketersediaan lapangan kerja 6 bulan yang akan datang. Pada bulan Desember, IKK sebesar 90,44, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya (75,44), terutama disebabkan oleh peningkatan rencana konsumsi saat ini dan peningkatan ketersediaan lapangan kerja 6 bulan yang akan datang.

Secara umum, ekspektasi konsumen mengalami kondisi paling buruk pada bulan November 2005, dipengaruhi oleh terjadinya kenaikan harga BBM pada bulan sebelumnya. Meskipun demikian, pada saat itu konsumen masih optimis bahwa penghasilan mereka akan meningkat terkait dengan perolehan tunjangan hari raya dan rencana kenaikan upah/gaji merespon kenaikan harga BBM sehingga ekspektasi konsumen pun mengalami kecenderungan meningkat kembali pada bulan berikutnya.

#### 4.2. INVESTASI

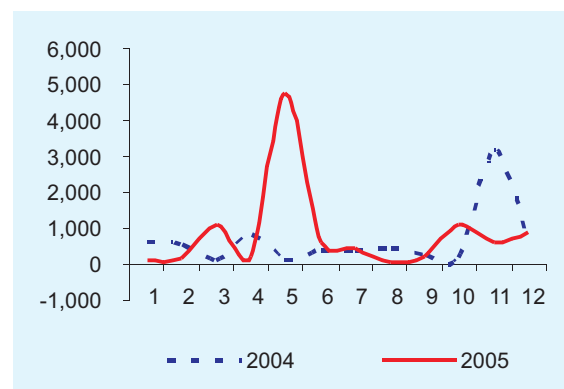
Berdasarkan pembentukan modal tetap bruto, investasi pada triwulan ini diperkirakan

Grafik 1.7. Realisasi Investasi (Ijin Usaha Tetap) PMA di Jawa Barat (USD Juta)



Sumber: Website BKPM, diolah.

Grafik 1.8. Realisasi Investasi (Ijin Usaha Tetap) PMDN di Jawa Barat (Rp Miliar)



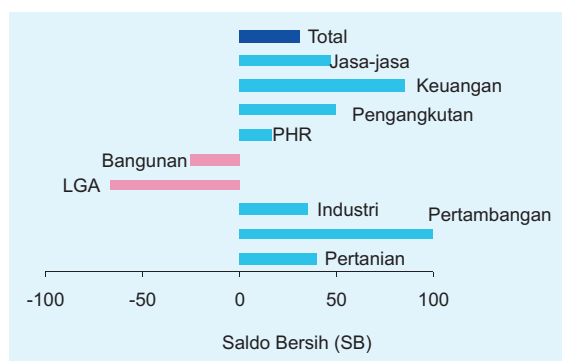
Sumber: Website BKPM, diolah.

tumbuh 1,55% (qtq), didorong oleh adanya penambahan barang modal dan kapasitas produksi, terutama pada industri otomotif. Pertumbuhan investasi ini tercermin pula dari peningkatan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), serta peningkatan kredit investasi yang disalurkan oleh perbankan. Baki debit kredit investasi yang disalurkan oleh bank-bank umum di Jawa Barat meningkat

## PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

2,2% dibandingkan triwulan sebelumnya, atau sebesar Rp109 miliar (Grafik 1.7 dan 1.8).

Grafik 1.9. Realisasi Investasi Hasil SKDU  
Triwulan IV-2005



Sumber: Bank Indonesia

investasi PMDN pada triwulan ini mencapai Rp709,2 miliar, naik 15% dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp616,5 miliar. Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan investasi pada industri makanan.

Peningkatan investasi tersebut tercermin pula pada hasil SKDU yang menunjukkan bahwa dunia usaha melakukan penambahan barang modal antara lain berupa bangunan, kendaraan dan peralatan pada beberapa industri dalam rangka penambahan kapasitas produksi dan investasi. Sebagian besar bentuk investasi tersebut berupa pembelian alat angkut, mesin dan peralatannya (Grafik 1.9).

Secara keseluruhan, realisasi inventasi yang dilakukan dunia usaha pada triwulan ini menunjukkan arah yang positif, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai saldo bersih (SB). Perkembangan investasi yang positif ini terjadi hampir pada seluruh sektor, kecuali sektor bangunan dan LGA.

### 4.3. EKSPOR DAN IMPOR

Berdasarkan dokumen pemberitahuan ekspor/impor barang<sup>1</sup>, nilai dan volume ekspor nonmigas Jawa Barat mengalami penurunan bila dibandingkan triwulan sebelumnya, begitu pula dengan impor nonmigas Jawa Barat dengan penurunan nilai ekspor nonmigas yang

<sup>1</sup> Sumber data: Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia, dari Dokumen Pemberitahuan Ekspor/Impor Barang. Angka triwulan IV-2005 merupakan angka sementara.

## PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

Tabel 1.3. Nilai Ekspor Nonmigas Jawa Barat Berdasarkan Kelompok SITC (USD Juta)

Nama kelompok	2004			2005				
	Tw. 3	Tw. 4	Total	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4*	Total
0 Makanan dan binatang hidup	87	93	335	84	100	94	91	369
1 Minuman dan Tembakau	2	1	5	2	2	2	2	7
2 Bahan Mentah	71	71	257	73	72	69	78	293
3 Bahan bakar dan minyak bumi	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Minyak dan lemak hewani dan nabati	12	12	46	11	12	10	12	45
5 Kimia	206	211	929	253	233	212	235	934
6 Barang-barang pabrik	1,056	965	4,049	1,089	1,088	1,075	1,056	4,309
7 Mesin dan peralatan transportasi	1,562	1,111	5,398	1,385	1,465	1,528	1,581	5,959
8 Macam-macam hasil pabrik	895	725	3,187	785	782	860	755	3,182
9 Komoditi dan transaksi	0	0	5	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>3,890</b>	<b>3,189</b>	<b>14,211</b>	<b>3,683</b>	<b>3,755</b>	<b>3,849</b>	<b>3,811</b>	<b>15,098</b>

Sumber data: SEKDA KBI Bandung.  
Keterangan: \* Angka sementara.

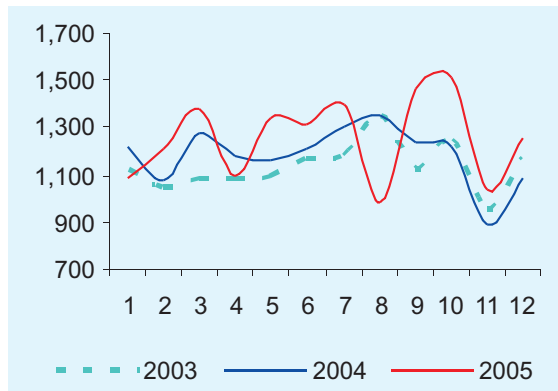
Tabel 1.4. Nilai Impor Nonmigas Jawa Barat Berdasarkan Kelompok SITC (USD Juta)

Nama Kelompok	2004			2005				
	Tw. 3	Tw. 4	Total	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4	Total
0 Makanan dan binatang hidup	0	0	0	0	0	0	1	1
1 Minuman dan Tembakau	0	0	0	0	0	0	0	1
2 Bahan Mentah	7	11	30	8	14	26	13	61
3 Bahan bakar dan minyak bumi	0	0	0	0	0	0	1	2
4 Minyak dan lemak hewani dan nabati	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Kimia	3	10	20	7	9	11	38	65
6 Barang-barang pabrik	7	19	42	17	35	18	17	87
7 Mesin dan peralatan transportasi	120	174	537	151	260	264	165	840
8 Macam-macam hasil pabrik	3	9	34	3	5	5	13	26
9 Komoditi dan transaksi	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>140</b>	<b>223</b>	<b>664</b>	<b>187</b>	<b>325</b>	<b>323</b>	<b>247</b>	<b>1,083</b>

Sumber data: SEKDA KBI Bandung

## PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

Grafik 1.10. Perkembangan Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta)



Sumber: SEKDA KBI Bandung

lebih kecil sehingga terjadi peningkatan nilai net ekspor. Pada triwulan IV-2005, nilai ekspor nonmigas mencapai USD3,81 miliar dengan volume sebesar 2,03 juta ton, sementara nilai impor nonmigas mencapai USD247 juta dengan volume sebesar 79 ribu ton.

Penurunan nilai ekspor nonmigas terutama disebabkan oleh penurunan nilai ekspor produk TPT yang mencapai 9%, dimana nilai ekspor produk ini merupakan 37% dari total nilai ekspor nonmigas.

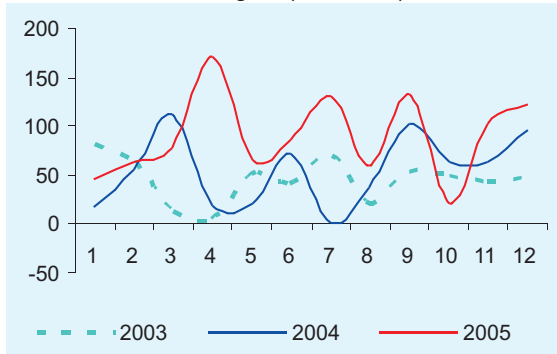
Sementara itu, penurunan nilai impor nonmigas disebabkan oleh penurunan impor barang-barang modal, antara lain kendaraan bermotor untuk jalan raya, serta mesin listrik, aparat dan alat-alatnya, dimana nilai impor ketiga komoditas ini mencapai 53% dari total nilai impor nonmigas (Tabel 1.3 dan 1.4).

Meskipun secara keseluruhan nilai ekspor nonmigas mengalami penurunan, namun terdapat kenaikan nilai ekspor pada beberapa kelompok komoditas<sup>2</sup>. Nilai ekspor nonmigas terbesar masih pada kelompok mesin dan peralatan transportasi<sup>3</sup> yang mencapai USD1,58 miliar atau 41,5% dari nilai total ekspor nonmigas. Nilai ini meningkat USD53 juta dibandingkan triwulan sebelumnya atau tumbuh 3,47% (qtq). Peningkatan nilai ekspor kelompok mesin dan peralatan transportasi disebabkan oleh peningkatan nilai ekspor produk unggulan, seperti alat telekomunikasi, mesin kantor dan pengolah data, serta mesin listrik, aparat dan alat-alatnya.

<sup>2</sup> Klasifikasi barang menurut Standard International Trading Classification (SITC)

<sup>3</sup> Kode Klasifikasi 7 (Machinery & Transport Equipment)

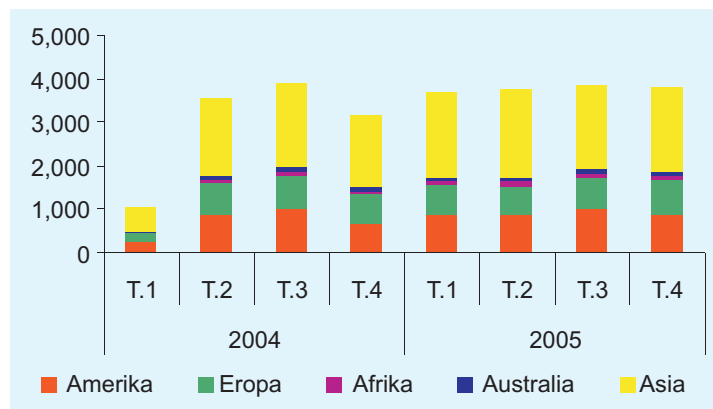
Grafik 1.11. Perkembangan Nilai Impor Nonmigas (USD Juta)



Sumber: SEKDA KBI Bandung

Di lain pihak, nilai ekspor produk unggulan lainnya, yaitu produk TPT, justru mengalami penurunan. Pada triwulan IV-2005, nilai ekspor produk TPT sebesar USD964 juta atau turun 9% dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar USD1,06 miliar. Penurunan produk TPT ini terutama disebabkan oleh penurunan ekspor produk tekstil (benang tenun, kain tekstil dan hasil-hasilnya) serta produk pakaian masing-masing sebesar 5% dan 15%, sementara

Grafik 1.12. Perkembangan Nilai Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan (USD Juta)



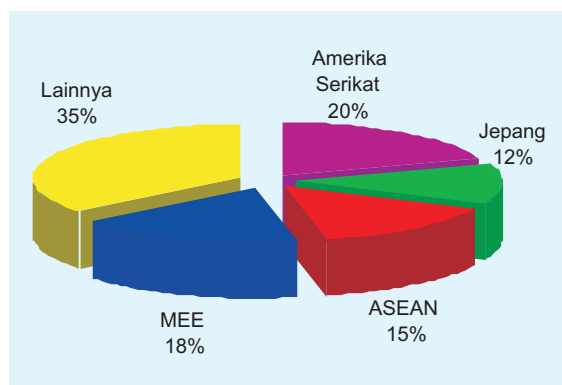
Sumber: SEKDA KBI Bandung

produk alas kaki (sepatu & peralatan kaki lainnya) justru mengalami peningkatan (20%).

Sebagaimana halnya dengan nilai ekspor nonmigas, volume ekspor nonmigas juga mengalami penurunan disebabkan oleh penurunan volume ekspor produk unggulan, yaitu produk TPT dan produk mesin/elektronik. Volume ekspor produk TPT turun 8%, sementara volume ekspor produk mesin dan elektronik turun 6%.

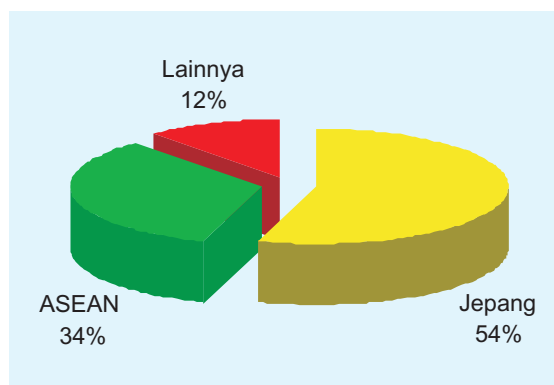
## PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

Grafik 1.13. Distribusi Nilai Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Asal (%)



Sumber: SEKDA KBI Bandung

Grafik 1.14. Distribusi Nilai Impor Nonmigas Berdasarkan Negara Asal (%)



Sumber: SEKDA KBI Bandung

Pada triwulan IV-2005, nilai impor nonmigas mengalami penurunan 24%, disebabkan oleh penurunan impor produk utama, yaitu barang modal. Nilai impor barang modal turun menjadi USD157 juta dari USD255 juta pada triwulan sebelumnya atau turun 38% (Grafik 1.11).

Hal serupa terjadi pula pada volume impor nonmigas dimana terjadi penurunan 37% disebabkan oleh penurunan volume impor barang modal yang mencapai 28%.

Ekspor nonmigas pada triwulan IV-2005, terutama diserap oleh pasar Asia (52%), selanjutnya Amerika (24%) dan pasar Eropa (19%). Berdasarkan negara tujuan, ekspor nonmigas terbesar adalah ke Amerika Serikat dan Jepang, masing-masing dengan pangsa 20% dan 12%, sementara negara lainnya memiliki kontribusi kurang dari 7%. Bila digabungkan, ekspor ke kelompok negara-negara yang tergabung dalam MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa) dan ASEAN juga relatif besar, yakni mencapai 18% dan 15% (Grafik 1.13).

Sementara itu, nilai impor nonmigas terbesar berasal dari negara Jepang yang mencapai 54% dari total nilai impor nonmigas, kemudian impor dari kelompok negara ASEAN dengan kontribusi sebesar 34%, khususnya Thailand dan Singapura, masing-masing dengan kontribusi 20% dan 7%. Nilai impor dari negara-negara lainnya relatif kecil, yakni kurang dari 3% (Grafik 1.14).

## 5. KETENAGAKERJAAN

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, relatif rendahnya pertumbuhan ekonomi menyebabkan rendahnya peningkatan penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan



pertumbuhan angkatan kerja. Kondisi ini menyebabkan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani masalah ketenagakerjaan masih cukup

berat. Hal ini terutama, diakibatkan oleh ketimpangan laju pertumbuhan angkatan kerja (rata-rata dari tahun 2000-2004 sebesar 1,7% per tahun) yang relatif tinggi dibandingkan tingkat kesempatan kerja (rata-rata dari tahun 2000-2004 sebesar 1,3% per tahun).

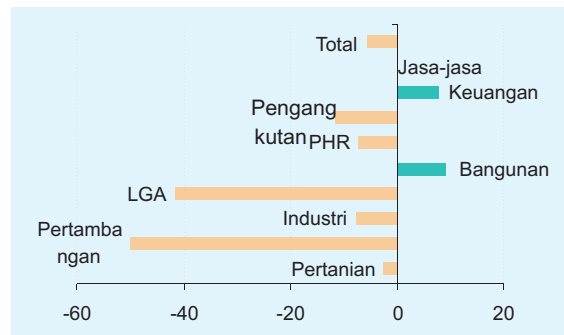
Dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2005 yang mencapai 5,3%, kesempatan kerja diharapkan dapat meningkat pula. Namun

demikian, penambahan kesempatan kerja ini diperkirakan masih belum mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran pada tahun 2005 (hasil Suseda 2005 yang dipublikasikan pada bulan September 2005) sebesar 11,9%, hanya sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 12,25% (tingkat pengangguran tersebut masih belum memperhitungkan dampak kenaikan harga BBM pada triwulan IV-2005 yang diperkirakan akan meningkatkan jumlah pengangguran terbuka).

Rendahnya tingkat permintaan akan tenaga kerja hingga saat ini disebabkan oleh daya serap tenaga kerja oleh sektor-sektor ekonomi dominan, khususnya sektor pertanian dan industri di Jawa Barat belum menunjukkan adanya peningkatan yang memadai. Berdasarkan hasil SKDU triwulan IV-2005, jumlah tenaga kerja yang terserap oleh sektor-sektor ekonomi di Jawa Barat pada triwulan ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang terserap pada triwulan sebelumnya. Hanya dua sektor yang mengalami peningkatan tenaga kerja, yaitu sektor keuangan dan sektor bangunan, sementara sektor lainnya menurun atau tetap. Meskipun demikian, terdapat beberapa subsektor atau industri yang mengalami peningkatan tenaga kerja, seperti subsektor hotel dan industri alat angkutan, mesin, dan peralatannya (Grafik 1.15).

Sementara itu, penanganan masalah pengangguran di Jawa Barat sampai saat ini masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Berbagai upaya yang dilakukan untuk menangani masalah tersebut belum terlaksana secara komprehensif, yang meliputi permasalahan di sektor kependudukan, sektor pendidikan dan sektor ekonomi.

Grafik 1.15. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja pada Triwulan IV-2005 (Saldo Bersih)



Sumber: Bank Indonesia Bandung

## PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

Permasalahan di sektor kependudukan terkait dengan tingginya pertumbuhan penduduk yang mendorong kenaikan jumlah angkatan kerja baru, di mana untuk sektor pendidikan, terkait dengan relatif rendahnya kualitas keterampilan angkatan kerja yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, sementara di sektor ekonomi, terkait dengan masalah produktifitas dan daya saing, serta daya serap angkatan kerja.

Penanganan masalah yang terjadi diberbagai sektor ini tentunya membutuhkan keterlibatan semua pihak. Dengan adanya kebijakan antar instansi terkait yang sinergis, terencana, dan terkoordinasi dengan baik, serta kerjasama yang harmonis antara pemerintah dengan dunia usaha, masalah pengangguran kedepan diharapkan dapat ditangani secara komprehensif. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan adanya peningkatan akumulasi kapital yang seiring dengan peningkatan partisipasi dan produktivitas angkatan kerja guna mendorong perkembangan kegiatan dunia usaha, sehingga kesempatan/lapangan kerja diharapkan dapat semakin meningkat. Dengan demikian, kualitas pertumbuhan ekonomi Jawa Barat kedepan diharapkan dapat ditingkatkan.

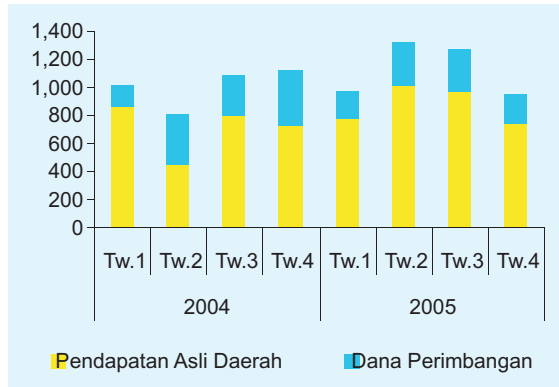
## 6. KEUANGAN DAERAH

Tabel 1.5. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Rp Miliar)

URAIAN	2004			2005				
	Tw. 3	Tw. 4	Total	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3*	Tw. 4**	Total
Pendapatan	1,084	1,129	4,044	977	1,319	1,277	953	4,527
Pendapatan Asli Daerah	801	725	2,847	777	1,011	976	737	3,501
Dana Perimbangan	283	405	1,198	200	308	302	216	1,025
Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
Belanja	964	1,418	3,671	318	1,005	837	1,070	3,229
Belanja Aparatur	270	363	1,029	179	287	311	388	1,164
Belanja Publik	135	409	1,000	45	153	239	218	655
Belanja bagi hasil & bantuan keuangan	526	635	1,571	94	564	268	463	1,389
Belanja tidak terduga	33	11	71	0	1	19	0	21
Surplus/Defisit	120	-289	374	659	314	440	-117	1,297
Pembiayaan	92	-956	-374	-100	-5	0	0	-105
Penerimaan pembiayaan	53	21	668	0	0	0	0	0
Pengeluaran pembiayaan	-39	977	1,042	100	5	0	0	105

Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Grafik 1.16. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Rp Miliar)



Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Selama tahun 2005, sumber penerimaan daerah Provinsi Jawa Barat terbesar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan, masing-masing dengan proporsi 61,41% dan 25,93% dari total penerimaan. Sementara itu, anggaran belanja terbesar, terutama untuk Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, yang proporsinya mencapai 40,34% dari total belanja. Adapun sumber pembiayaan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan

belanja daerah, berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/SILPA, Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah/DCD, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selama tahun 2005, pendapatan, pembiayaan, dan belanja Provinsi Jawa Barat masing-masing tumbuh 87,34%; 13,12%; 15,67%. Secara umum, seluruh

**Halaman ini sengaja dikosongkan**  
**This page is intentionally blank**

## BAB 2 PERKEMBANGAN INFLASI

### 1. KONDISI UMUM

Selama tahun 2005, salah satu tantangan berat dalam perekonomian Jawa Barat adalah tingginya laju inflasi, yang mencapai puncaknya pada triwulan IV-2005. Pergerakan harga secara umum di Jawa Barat yang digambarkan oleh perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) di tujuh kota (Kota Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Bekasi, Bogor, Sukabumi, dan Banjar) menunjukkan bahwa secara triwulanan, laju inflasi gabungan tujuh kota di Jawa Barat pada triwulan IV-2005 meningkat sangat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 1,86% (qtq) menjadi 10,97% (qtq), lebih tinggi daripada inflasi nasional (10,09%).

Faktor determinan inflasi di Jawa Barat pada triwulan ini dari sisi penawaran adalah kenaikan harga BBM pada awal Oktober 2005<sup>4</sup>, sementara dari sisi permintaan adalah meningkatnya konsumsi masyarakat sehubungan faktor musiman yaitu masa hari raya Idul Fitri, Natal, dan tahun baru. Inflasi didominasi oleh pergerakan inflasi administered prices, yang mencapai 25,87% (qtq), dengan andil 5,64% (qtq) terhadap inflasi di Jawa Barat pada triwulan ini.

Kelompok barang dan jasa yang mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan, yakni sebesar 27,10% (qtq); kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 11,87% (qtq); kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 9,67% (qtq); serta kelompok bahan makanan sebesar 7,91% (qtq). Di antara tujuh kota, Kota Bandung mengalami inflasi tertinggi, yaitu 12,56% (qtq).

Selama periode Januari sampai dengan Desember 2005, inflasi tahunan gabungan tujuh kota di Jawa Barat mencapai 18,51% (yoy), lebih tinggi daripada inflasi nasional (17,12%) (lihat Boks 2. Perkembangan Inflasi di Jawa Barat Tahun 2005). Penyebab utama

---

<sup>4</sup> Pada tanggal 1 Oktober 2005, pemerintah melakukan pengurangan subsidi BBM rata-rata 126%.

## PERKEMBANGAN INFLASI

inflasi selama periode tersebut adalah kenaikan harga BBM pada bulan Maret dan Oktober 2005. Kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan merupakan kelompok dengan inflasi tertinggi selama periode tersebut, yakni mencapai 47,40% (yoy). Dibandingkan enam kota lainnya di Jawa Barat, selama tahun 2005 inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kota Banjar, yaitu sebesar 22,04% (yoy).

### 2. PERKEMBANGAN INFLASI DI JAWA BARAT

Perkembangan laju inflasi gabungan tujuh kota di Jawa Barat selama triwulan IV-2005 merupakan yang tertinggi dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya (Grafik 2.1).

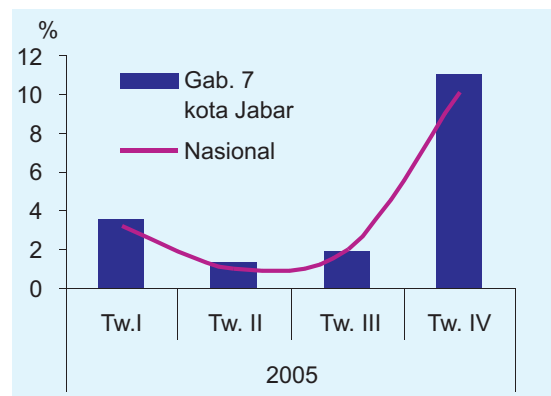
Secara bulanan, inflasi tertinggi terjadi pada bulan Oktober 2005, yang mencapai 8,21% (mtm). Tingginya inflasi disebabkan oleh kenaikan harga BBM pada awal bulan. Kenaikan harga solar dan premium berdampak langsung (first round effect) terhadap inflasi kelompok transpor,

komunikasi, dan jasa keuangan, sehingga mencapai 26,68% (mtm), khususnya inflasi subkelompok transpor (36,65%). Selain itu, kenaikan harga minyak tanah juga secara langsung mendorong inflasi kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar sebesar 8,13% (mtm). Selanjutnya, kenaikan BBM (second round effect) berdampak pula terhadap kenaikan harga bahan makanan karena naiknya biaya distribusi (tarif angkutan). Inflasi kelompok bahan makanan pada bulan tersebut mencapai 7,13% (mtm).

Efek kenaikan harga BBM masih berlanjut pada inflasi bulan November 2005. Meskipun laju inflasi pada bulan November relatif rendah dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu sebesar 1,86% (mtm), inflasi kelompok makanan jadi mencapai 8,28% (mtm). Kenaikan harga makanan jadi disebabkan oleh naiknya harga bahan baku (bahan makanan) dan harga bahan bakar yang sudah terjadi sejak sebulan sebelumnya.

Semula diperkirakan bahwa pada bulan Desember 2005 akan terjadi deflasi di Jawa Barat seiring meredanya dampak kenaikan harga BBM, namun ternyata inflasi masih terjadi

Grafik 2.1. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat dan Nasional Tahun 2005



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

pada bulan tersebut, yaitu sebesar 0,29% (mtm), terutama didorong oleh kenaikan harga kelompok makanan jadi. Harga kelompok makanan jadi pada bulan tersebut sebelumnya diperkirakan tidak mengalami kenaikan, karena laju inflasi kelompok ini sudah sangat tinggi pada dua bulan sebelumnya (Oktober dan November masing-masing 2,24% dan 8,28%) dan harga kelompok barang terkait (bahan makanan) bahkan mengalami deflasi 0,96% (mtm).

**BOKS 2. PERKEMBANGAN INFLASI DI JAWA BARAT TAHUN 2005**

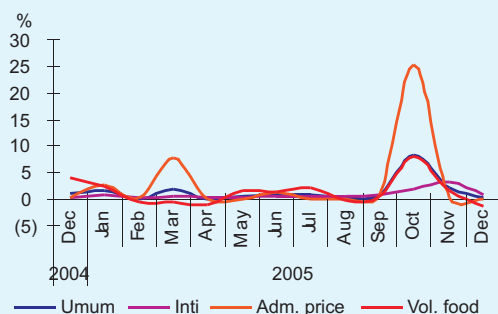
Selama tahun 2005, inflasi gabungan tujuh kota di Jawa Barat mencapai 18,51% (yoy). Penyumbang inflasi terbesar sepanjang tahun 2005 adalah kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan, dengan andil 6,28%. Tiga kelompok lainnya yang memberikan andil di atas 3% adalah kelompok makanan jadi (3,86%), kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar (3,81%), dan kelompok bahan makanan (3,33%).

Kenaikan harga pada komoditas administered prices cukup dominan mewarnai perkembangan inflasi di Jawa Barat sepanjang tahun 2005, khususnya sehubungan dengan kenaikan harga BBM. Inflasi administered prices mencapai 42,51% (yoy), dengan andil 8,74% (yoy) terhadap inflasi gabungan tujuh kota di Jawa Barat selama tahun 2005. Hal ini berarti 47,23% inflasi di Jawa Barat selama tahun 2005 dibentuk oleh inflasi administered prices (grafik 2.2 dan 2.3).

Kenaikan harga BBM yang signifikan sepanjang tahun 2005 telah menyebabkan inflasi pada kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan merupakan yang tertinggi di Jawa Barat pada tahun 2005 hingga 47,40% (yoy). Sementara itu, kenaikan harga elpiji pada awal tahun dan kenaikan harga minyak tanah pada Oktober 2005 telah mendorong inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar hingga 14,48% (yoy).

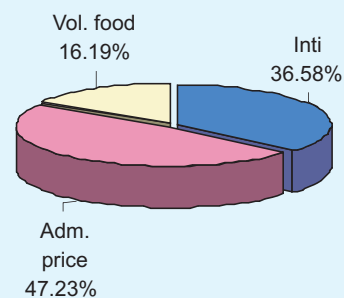
Kenaikan harga BBM juga telah mendorong kenaikan harga kelompok barang dan jasa lainnya,

**Grafik 2.2. Perkembangan Inflasi Bulanan di Jawa Barat Tahun 2005**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

**Grafik 2.3. Disagregasi Inflasi Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Tahun 2005**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

terutama makanan jadi dan bahan makanan. Laju inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau mencapai 18,61% (yoy) terutama sebagai akibat kenaikan subkelompok makanan jadi (22,46%). Kenaikan harga makanan jadi disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku, baik harga bahan makanan maupun harga bahan bakar (minyak tanah, elpiji). Tingginya nilai konsumsi makanan jadi di Jawa Barat

## PERKEMBANGAN INFLASI

menyebabkan andil inflasi kelompok ini terhadap inflasi Jawa Barat cukup tinggi (3,86%).

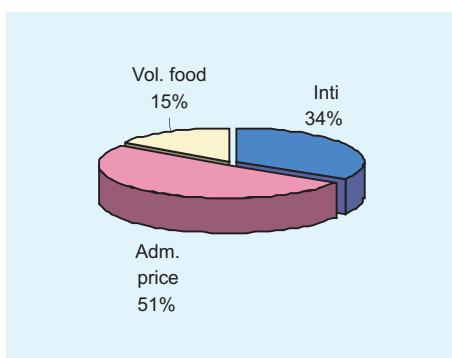
Laju inflasi volatile food pada tahun 2005 lebih lambat dibandingkan inflasi administered prices, yakni 15,15% (yoy) dengan andil 3,00% (yoy). Inflasi volatile food membentuk 16,19% dari inflasi di Jawa Barat pada tahun 2005. Inflasi bahan makanan pada tahun ini yang mencapai 14,37% (yoy), antara lain disebabkan oleh kenaikan biaya distribusi akibat kenaikan harga BBM, selain faktor musiman seperti pada masa hari raya.

Sementara itu, inflasi inti mencapai 11,35% (yoy). Meskipun laju inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi volatile food, andil inflasi inti terhadap inflasi Jawa Barat pada tahun 2005 lebih tinggi, yakni mencapai 6,77%. Relatif tingginya inflasi inti tersebut terkait dengan cukup tingginya level inflasi yang diekspektasikan masyarakat sehubungan dengan rencana-rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM secara signifikan sepanjang tahun 2005.

## DISAGREGASI INFLASI: INFLASI INTI, INFLASI VOLATILE FOOD, INFLASI ADMINISTERED PRICE

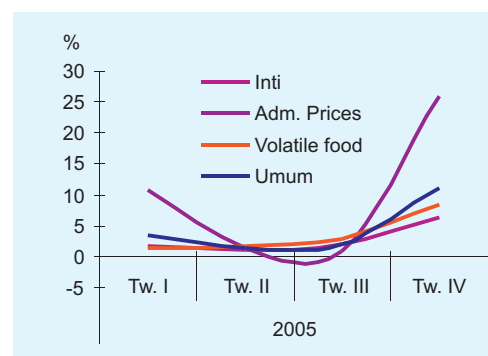
Perkembangan inflasi di Jawa Barat pada triwulan IV-2005 didominasi oleh pergerakan inflasi administered prices, yang mencapai 25,87% (qtq) (Grafik 2.4). Andil inflasi administered prices mencapai 5,64% (qtq) terhadap inflasi di Jawa Barat pada triwulan ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa 51,40% inflasi di Jawa Barat pada triwulan IV-2005 dibentuk oleh inflasi administered prices (Grafik 2.5). Barang dan jasa di dalam kelompok administered prices yang memberikan andil inflasi cukup tinggi adalah tarif angkutan dalam

Grafik 2.4. Disagregasi Inflasi Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Triwulan IV-2005



Keterangan: nama inflasi disingkat, Adm. Price=administered prices; Vol.food=volatile food.  
Sumber: hasil perhitungan KBI Bandung terhadap data BPS Provinsi Jawa Barat.

Grafik 2.5. Pergerakan Inflasi Inti, Administered Price, dan Volatile Food Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Triwulanan (qtq) Tahun 2005



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.



kota dan antarkota serta harga BBM (minyak tanah, premium, solar).

Inflasi volatile food mencapai 8,37% (qtq), dengan andil 1,65% (qtq) terhadap inflasi Jawa Barat (Grafik 2.5). Inflasi volatile food yang cukup tinggi tersebut disebabkan oleh kenaikan biaya distribusi (tarif angkutan) bahan makanan dari sentra produksi ke pasar-pasar karena kenaikan harga BBM, dan juga karena peningkatan permintaan masyarakat terhadap bahan makanan menjelang hari raya Idul Fitri. Bahan makanan yang tergolong volatile food dan memberikan andil inflasi cukup tinggi antara lain beras, daging sapi, cabe merah, daging ayam ras, dan tomat sayur.

Sementara itu laju inflasi inti<sup>5</sup> mencapai 6,29% (qtq) dengan andil 3,68% (qtq) terhadap inflasi Jawa Barat. Dengan demikian, 33,57% dari total inflasi di Jawa Barat berasal dari inflasi inti. Penyebab laju inflasi inti yang relatif tinggi adalah tingginya ekspektasi masyarakat terhadap harga sehubungan dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, sehingga masyarakat memperkirakan bahwa harga barang dan jasa lainnya pun akan meningkat. Barang yang termasuk ke dalam kelompok inflasi inti dan memberikan andil inflasi cukup tinggi adalah makanan jadi.

Perkembangan inflasi di Jawa Barat pada triwulan IV-2005, sejalan dengan ekspektasi masyarakat, baik konsumen dan pelaku usaha, terhadap perkembangan harga seperti ditunjukkan oleh Survei Konsumen (SK), Survei Penjualan Eceran (SPE) dan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), yang akan diuraikan di bawah ini.

### SURVEI KEGIATAN DUNIA USAHA

Hasil SKDU triwulan IV-2005 mengindikasikan bahwa harga jual/tarif selama triwulan IV-2005 secara umum mengalami peningkatan (Grafik 2.6). Hal tersebut tercermin dari peningkatan indeks saldo bersih tertimbang (SBT)<sup>6</sup> dari 28,95 pada triwulan III-2005 menjadi

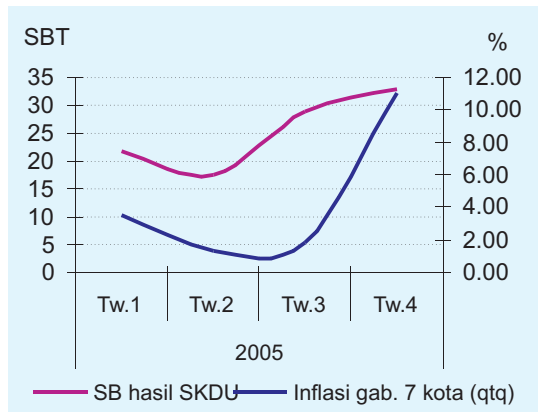
---

<sup>5</sup> Inflasi inti dihitung dengan mengeluarkan komoditas administered (harganya ditetapkan oleh pemerintah) dan volatile foods (komoditas bahan makanan yang pergerakan harganya berfluktuasi cukup tinggi) dari inflasi IHK (lihat buku PEKDA Prov. Jabar Tw III-2005).

<sup>6</sup> SBT adalah hasil perkalian saldo bersih (SB) sektor yang bersangkutan dengan bobot sektor yang bersangkutan sebagai penimbangannya. Saldo bersih (net balance) adalah selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "meningkat" dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "menurun" dan mengabaikan jawaban "sama". SBT positif menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa harga jual meningkat.

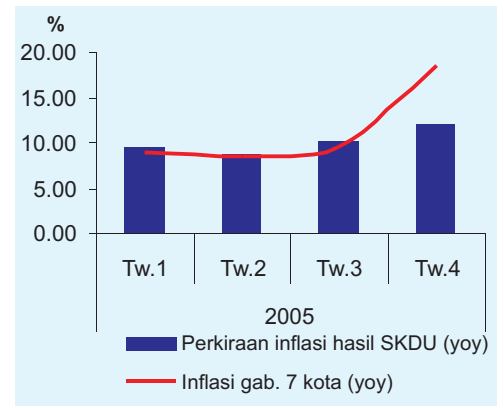
## PERKEMBANGAN INFLASI

Grafik 2.6. Perkembangan Harga Berdasarkan Hasil SKDU dan Perkembangan Inflasi Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat



Sumber: SKDU-KBI Bandung; BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Grafik 2.7. Perkembangan Ekspektasi Pelaku Usaha terhadap Inflasi Tahun 2005 dan Perkembangan Inflasi Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat



Sumber: SKDU-KBI Bandung; BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

32,75 pada triwulan IV-2005.

Dari sembilan sektor ekonomi yang disurvei, pelaku usaha di semua sektor menyatakan bahwa selama triwulan IV-2005 terjadi kenaikan harga jual. Penyumbang terbesar kenaikan harga berasal dari sektor pertanian, sektor pertambangan, serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Kenaikan harga jual terutama disebabkan oleh peningkatan harga bahan baku.

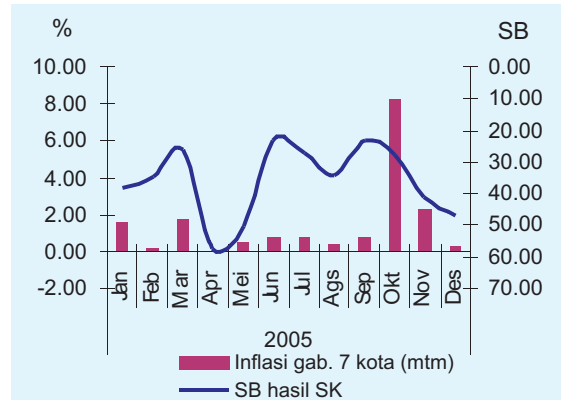
Selain itu, hasil SKDU juga menunjukkan bahwa angka perkiraan inflasi 2005 oleh para responden (pengusaha) lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan inflasi pada survei triwulan sebelumnya, yakni dari 10,25% pada triwulan III-2005 menjadi 11,98% pada triwulan IV-2005 (Grafik 2.7). Ekspektasi para pelaku usaha terhadap inflasi tahun 2005 tersebut

searah dengan nilai inflasi aktual (yoy) gabungan tujuh kota di Jawa Barat pada triwulan IV-2005, yang meningkat signifikan dibandingkan inflasi pada triwulan III-2005.

**SURVEI KONSUMEN**

Hasil SK triwulan III-2005 menunjukkan bahwa jumlah responden, yang memperkirakan bahwa pada triwulan IV-2005 akan terjadi kenaikan harga, mengalami peningkatan (Grafik 2.8). Hal ini tercermin dari nilai saldo bersih<sup>7</sup> (SB) yang masih di bawah 100, yaitu dengan SB rata-rata setiap bulannya 38,44. Nilai SB terendah terjadi untuk perkiraan harga pada bulan Oktober 2005 dan selanjutnya meningkat untuk bulan November dan Desember 2005.

Grafik 2.8. Perkembangan Ekspektasi Konsumen Terhadap Harga

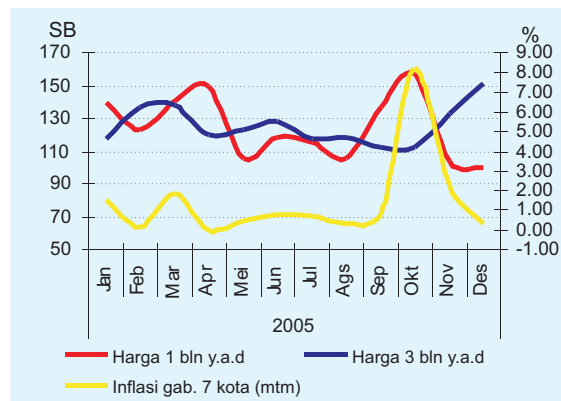


Sumber: Survei Konsumen-KBI Bandung, diolah.

**SURVEI PENJUALAN ECERAN**

Hasil SPE menunjukkan bahwa para pedagang eceran memperkirakan selama

Grafik 2.9. Perkembangan Ekspektasi Penjual Eceran Terhadap Harga dan Perkembangan Inflasi Bulanan Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat



Sumber: SPE-KBI Bandung; BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

<sup>7</sup> Indeks SB= % jumlah responden yang memperkirakan harga akan turun -% jumlah responden yang memperkirakan harga akan naik + 100. Nilai SB sama dengan 100 menunjukkan ekspektasi harga tetap. Nilai SB kurang dari 100 mengindikasikan bahwa sebagian besar responden berpendapat bahwa harga dan jasa secara umum akan meningkat. Sebaliknya, SB di atas 100 berarti bahwa sebagian besar responden berpendapat bahwa akan terjadi penurunan harga. Penurunan angka SB menunjukkan bahwa semakin banyak responden yang memperkirakan bahwa harga barang dan jasa secara umum akan naik.

## PERKEMBANGAN INFLASI

triwulan IV-2005 terjadi kenaikan harga dengan kecenderungan yang meningkat (Grafik 2.9).

Tabel 2.1. Perkembangan Inflasi Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa (%)

No.	Kelompok	Bulanan			Triwulanan	Tahunan
		Okt '05	Nov '05	Des '05	(qtq)	(yoy)
1	Bahan makanan	7.13	1.70	-0.96	7.91	14.37
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	2.24	8.28	1.04	11.87	18.61
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	8.13	0.59	0.83	9.67	14.48
4	Sandang	1.01	0.42	0.77	2.22	6.15
5	Kesehatan	1.43	0.59	0.56	2.61	8.73
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	0.96	0.27	0.16	1.39	7.71
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	26.68	0.29	0.05	27.10	47.40
	Umum	8.21	2.26	0.29	10.97	18.51

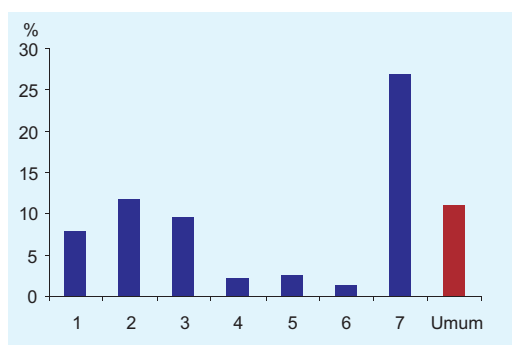
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Hal tersebut ditunjukkan oleh indeks SB yang lebih besar daripada 100 dan cenderung meningkat.

### 2.1. INFLASI MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA

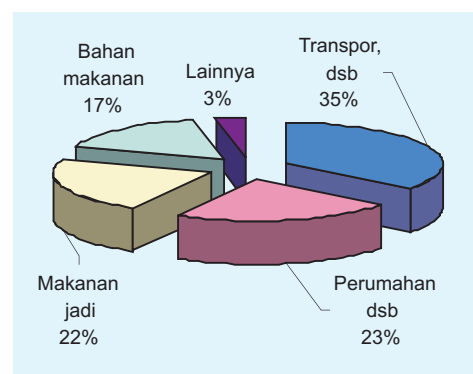
Selama triwulan IV-2005, inflasi gabungan tujuh kota di Jawa Barat secara triwulanan mencapai 10,97% (qtq), lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan III-2005 (1,86%). Inflasi terjadi pada semua kelompok barang dan jasa, dan yang tertinggi terjadi pada kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan yang mencapai 27,10% (qtq), diikuti oleh inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau yang mencapai 11,87% (Tabel 2.1

Grafik 2.10. Inflasi Triwulanan (qtq) Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa Triwulan IV-2005



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah

Grafik 2.11. Pembentukan Inflasi di Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa Triwulan IV-2005



Keterangan: nama kelompok disingkat.  
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah

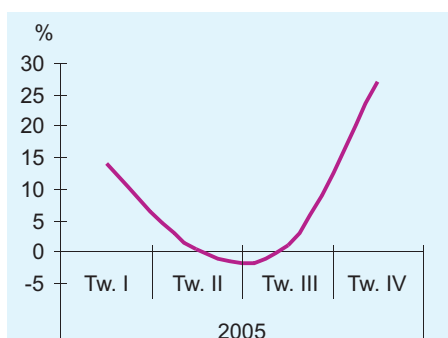
dan Grafik 2.10). Adapun inflasi kelompok perumahan, listrik, gas, dan bahan bakar mencapai 9,67%, sedangkan kelompok bahan makanan sebesar 7,91%. Inflasi kelompok barang dan jasa lainnya, yaitu kelompok sandang, kelompok kesehatan, serta kelompok perumahan, rekreasi, dan olahraga di bawah 3%.

Berdasarkan andilnya terhadap inflasi gabungan tujuh kota di Jawa Barat selama triwulan IV-2005, kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan memberikan andil terbesar. Dari inflasi Jawa Barat yang mencapai 10,97% (qtq), kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan memberi andil 3,90%. Hal ini berarti 35% laju inflasi Jawa Barat pada triwulan IV-2005 didominasi kelompok transpor, sedangkan 65% sisanya dibentuk oleh andil inflasi kelompok barang dan jasa lainnya (Grafik 2.11), yaitu antara lain kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar dengan andil 2,49%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau dengan andil 2,44%, serta kelompok bahan makanan dengan andil 1,82%.

Berdasarkan besarnya andil setiap kelompok barang dan jasa terhadap inflasi gabungan tujuh kota di Jawa Barat pada triwulan IV-2005, secara berurutan dari yang terbesar hingga yang terkecil adalah sebagai berikut:

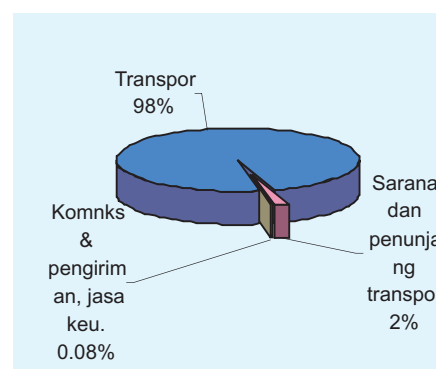
a. Kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan

Grafik 2.12. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah

Grafik 2.13. Pembentukan Inflasi Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan Menurut Subkelompok Triwulan IV-2005



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah

## PERKEMBANGAN INFLASI

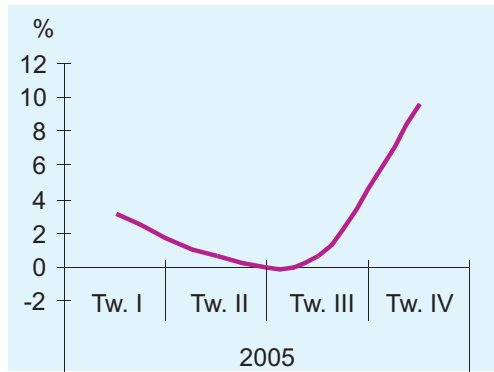
Inflasi triwulanan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan mencapai 27,10% (qtq) dengan andil 3,9%. Inflasi kelompok tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya yang hanya sebesar 1,13% (Grafik 2.12) dan merupakan kelompok dengan inflasi tertinggi di tujuh kota di Jawa Barat. Di antara tujuh kota tersebut, inflasi kelompok transpor yang tertinggi terjadi di Kota Bogor, yaitu sebesar 33,38% (qtq).

Pendorong utama inflasi kelompok ini adalah subkelompok transpor yang mengalami inflasi 36,65% (qtq), dengan andil 3,82% (qtq). Dengan andil tersebut, artinya 98% inflasi kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan disebabkan oleh inflasi kelompok subkelompok transpor (Grafik 2.13).

Faktor penyebab tingginya inflasi subkelompok transpor adalah kenaikan harga premium (naik 87,5% dari Rp2.420,00/liter menjadi Rp4.500,00/liter) dan solar (naik 104,76% dari Rp2.120,00/liter menjadi Rp4.300,00/liter) mulai tanggal 1 Oktober 2005. Kenaikan bahan bakar kendaraan bermotor tersebut menyebabkan kenaikan tarif angkutan dalam kota dan tarif angkutan antarkota secara signifikan. Sebagian besar pengemudi angkutan menetapkan tarif baru pasca kenaikan harga BBM melebihi batas maksimal tarif yang diatur pemerintah, sehingga inflasi tarif angkutan dalam kota dan antarkota masing-masing mencapai 41,05% (qtq) dan 37,50% (qtq). Inflasi angkutan dalam kota yang tertinggi terjadi di Kota Bogor, yaitu sebesar 6,67% (qtq), sedangkan di enam kota lainnya berkisar antara 29,05% hingga 62,50%.

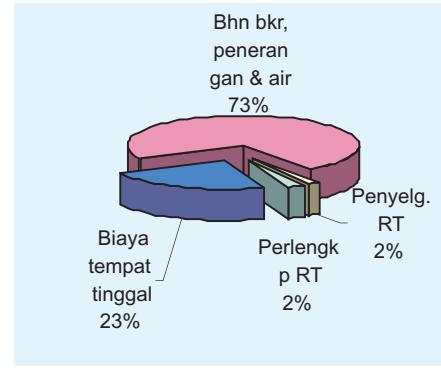
Di dalam kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan tersebut, subkelompok sarana penunjang transpor juga mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, yaitu sebesar 9,31% (qtq). Jasa yang termasuk sarana penunjang transpor ini adalah tarif parkir (inflasi 22,03% (qtq)) dan service pemeliharaan kendaraan bermotor (inflasi 12,52% (qtq)).

Grafik 2.14. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Grafik 2.15 Pembentukan Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Menurut Subkelompok Triwulan IV-2005



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

b. Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar

Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar mengalami inflasi 9,67% (qtq), dengan andil terhadap inflasi Jawa Barat sebesar 2,49%. Laju inflasi tersebut meningkat signifikan dibandingkan inflasi triwulan III-2005 yang hanya sebesar 0,59% (Grafik 2.14). Inflasi kelompok perumahan yang tertinggi terjadi di Kota Banjar, yaitu sebesar 16,57% (qtq).

Subkelompok bahan bakar, penerangan, dan air mendominasi inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar (Grafik 2.15). Pendorong utama kenaikan inflasi subkelompok tersebut adalah kenaikan harga minyak tanah mulai tanggal 1 Oktober 2005 dari Rp700/liter menjadi Rp2.000,00/liter.

Kenaikan harga elpiji juga merupakan salah satu penyebab inflasi kelompok perumahan. Meski Pertamina tidak menaikkan harga elpiji selama triwulan IV-2005, pasca kenaikan harga BBM 1 Oktober 2005, harga elpiji mengalami kenaikan akibat dibebankannya ongkos kirim oleh penjual elpiji kepada konsumen sebesar rata-rata Rp2.000/tabung. Di samping itu, akibat kenaikan harga minyak tanah, permintaan masyarakat terhadap gas elpiji meningkat, karena sebagian rumah tangga yang sebelumnya menggunakan minyak tanah, beralih menggunakan elpiji karena dinilai lebih murah. Isu kelangkaan elpiji juga sempat merebak di wilayah Jawa Barat. Pada minggu pertama Oktober 2005, sempat terjadi kelangkaan elpiji di beberapa daerah di Jawa Barat. Kelangkaan diakibatkan oleh kerusakan sumber gas di Pertamina Unit Pengolahan-IV Cilacap pada tanggal 4-6 Oktober 2005. Karena Pertamina Cilacap bertanggungjawab untuk memasok elpiji di Jateng dan Jatim, akibat kerusakan tersebut Pertamina Balongan

## PERKEMBANGAN INFLASI

(Indramayu) yang biasanya hanya memasok wilayah Jawa Barat, harus memasok Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun, setelah kerusakan di Cilacap teratasi, persediaan elpiji kembali normal.

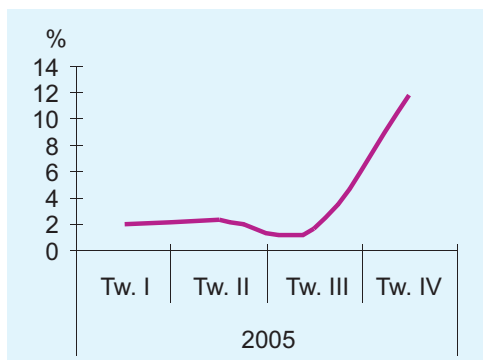
Faktor lain yang mendorong inflasi kelompok perumahan adalah inflasi biaya tempat tinggal (kenaikan upah tukang bangunan bukan mandor dan harga bahan bangunan) juga mendorong inflasi kelompok perumahan.

### c. Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau

Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau mengalami inflasi 11,87% (qtq) dengan andil 2,44%. Laju inflasi kelompok tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya yang sebesar 1,59% (Grafik 2.16). Inflasi kelompok makanan jadi di Kota Bandung merupakan yang tertinggi dibandingkan enam kota lainnya, yakni sebesar 15,91% (qtq).

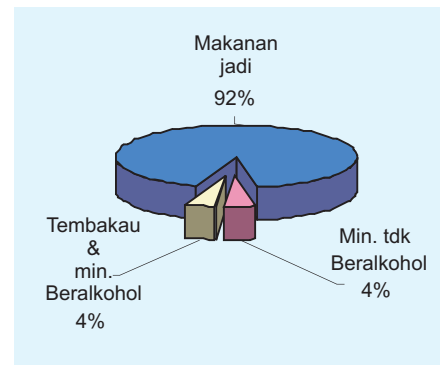
Seluruh komoditas pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau

Grafik 2.16. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah

Grafik 2.17. Pembentukan Inflasi Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau Menurut Subkelompok Triwulan IV-2005



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah

mengalami peningkatan harga, kecuali gula pasir yang mengalami deflasi 0,59% (qtq). Inflasi subkelompok makanan jadi mendominasi inflasi kelompok tersebut, dengan inflasi sebesar 16,91% dan andil inflasi sebesar 2,24%. Dengan kata lain, laju inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 92%-nya disebabkan oleh inflasi subkelompok makanan jadi (Grafik 2.17). Jenis makanan jadi yang memberikan andil inflasi tertinggi adalah nasi rames, mie, kue kering, dan bubur.

Inflasi subkelompok makanan jadi terutama disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku yaitu bahan makanan dan bahan bakar. Hal tersebut terlihat jelas dari laju inflasi

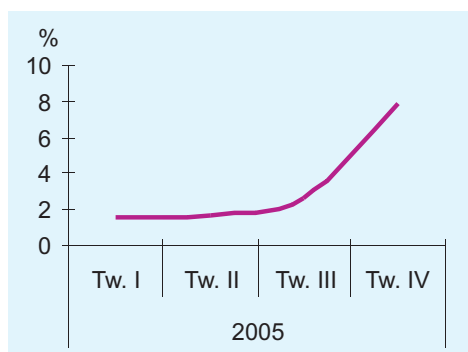


bulanan subkelompok tersebut selama periode Oktober dan November 2005. Sesaat setelah kenaikan harga BBM pada Oktober 2005, inflasi kelompok bahan makanan mencapai 7,13% (mtm), merupakan kelompok dengan inflasi ketiga tertinggi (setelah inflasi kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan serta kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar). Pada bulan yang sama, inflasi subkelompok makanan jadi jauh lebih rendah, yakni hanya 3,22% (mtm), dimana inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau pada saat itu sebesar 2,24% (mtm). Kenaikan harga makanan jadi pada bulan Oktober 2005 diperkirakan terutama karena faktor musiman, yaitu bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri yang telah mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, sedangkan faktor kenaikan harga BBM belum terlalu berpengaruh karena produsen sudah menyiapkan bahan baku sebelum Ramadhan dalam rangkaantisipasi meningkatnya permintaan masyarakat.

Barulah pada bulan November, inflasi subkelompok makanan jadi meningkat signifikan hingga 11,69% (mtm), sebagai akibat harga bahan baku (bahan makanan dan bahan bakar yang merupakan stok baru) yang telah meningkat sejak sebulan sebelumnya.

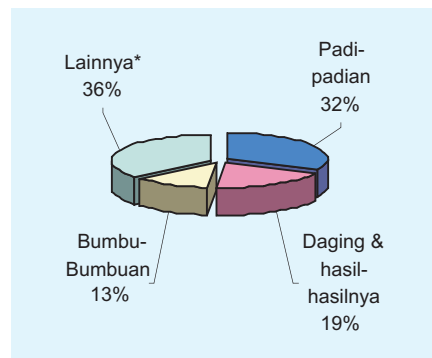
Fenomena kenaikan harga makanan jadi tersebut telah ditelaah oleh KBI Bandung melalui survei yang dilakukan kepada konsumen, produsen, dan pedagang makanan jadi dan bahan makanan di beberapa kabupaten dan kota di Jawa Barat (lihat Boks.3. Kenaikan Harga Bahan Makanan dan Makanan Jadi di Kota dan Kabupaten Bandung, dan Boks.4. Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Industri Makanan Jadi di Jawa Barat).

Grafik 2.18. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Kelompok Bahan Makanan



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Grafik 2.19. Pembentukan Inflasi Kelompok Bahan Makanan Menurut Subkelompok Triwulan IV-2005



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.  
\*Meliputi ikan segar; ikan diawetkan; telur, susu, & hasil-hasilnya; sayuran; kacang-kacangan; buah-buahan; lemak & minyak; lainnya.

### BOKS 3. KENAIKAN HARGA BAHAN MAKANAN DAN MAKANAN JADI DI KOTA DAN KABUPATEN BANDUNG

Pasca kenaikan harga BBM pada tanggal 1 Oktober 2005, kelompok barang dan jasa yang terkena dampak langsung (first round effect) dari kenaikan tersebut adalah kelompok transportasi, khususnya tarif angkutan. Setelah dampak putaran pertama tersebut, Bank Indonesia Bandung telah memperkirakan bahwa selanjutnya kelompok yang akan mengalami peningkatan harga secara signifikan adalah kelompok bahan makanan dan makanan jadi (second round effect), sebagai akibat kenaikan biaya transportasi.

Untuk mengantisipasi second round effect kenaikan harga BBM terhadap harga bahan makanan dan makanan jadi tersebut, maka Bank Indonesia Bandung bekerjasama dengan ISEI Cabang Bandung Koordinator Jawa Barat untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Faktor Penyebab Kenaikan Harga dan Ekspektasi Harga pada Kelompok Bahan Makanan dan Makanan Jadi di Kota/Kabupaten Bandung."

Hasil survei menunjukkan bahwa selama bulan Oktober 2005 hingga pertengahan Desember 2005, terjadi kenaikan harga bahan makanan dan makanan jadi. Persentase kenaikan harga terbesar terjadi pada bulan Oktober, sementara pada bulan Desember persentase kenaikan relatif kecil. Alasan kenaikan harga tersebut adalah kenaikan biaya transportasi, kenaikan harga dari pemasok, serta meningkatnya permintaan karena musim liburan dan hari raya keagamaan.

Hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa second round effect kenaikan harga BBM terhadap kenaikan harga bahan makanan dan makanan jadi memang terjadi, sesuai dengan hipotesa awal. Kenaikan harga BBM juga telah mempengaruhi ekspektasi para produsen dan pedagang yang memperkirakan bahwa kenaikan harga bahan makanan dan makanan jadi masih akan berlanjut hingga bulan Februari 2006. Ekspektasi tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM, namun juga dipengaruhi oleh adanya isu kenaikan TDL dan elpiji. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kenaikan harga yang didorong oleh ekspektasi, diperlukan upaya dan kerjasama semua pihak, khususnya pemda Jawa Barat dan instansi terkait, untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap distribusi, ketersediaan, dan harga bahan makanan dan makanan jadi di Jawa Barat.

#### d. Kelompok bahan makanan

Kelompok bahan makanan mengalami inflasi 7,91% (qtq), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya sebesar 2,66% (Grafik 2.18). Kelompok ini memberikan andil inflasi sebesar 1,82% (qtq) terhadap inflasi Jawa Barat. Inflasi triwulanan kelompok bahan makanan tertinggi terjadi di Kota Sukabumi, yakni sebesar 11,20% (qtq).

Inflasi kelompok tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan tarif angkutan (biaya distribusi) karena kenaikan harga BBM. Selain itu, meningkatnya permintaan menjelang hari raya Idul Fitri juga dimanfaatkan oleh para pedagang untuk menaikkan harga.

Inflasi subkelompok padi-padian mendominasi inflasi kelompok bahan makanan, yaitu sebesar 10,97% (qtq) dengan andil 0,58% (Grafik 2.19). Beras yang termasuk ke dalam subkelompok ini mengalami inflasi 12,82% (qtq) dan memberikan andil inflasi tertinggi, yaitu sebesar 0,57% (qtq). Inflasi beras tertinggi terjadi di Kota Bekasi, yaitu sebesar 15,21% (qtq), sementara di kota-kota lainnya berkisar antara 10,74% sampai dengan 14,04%.

Subkelompok lainnya yang juga mengalami peningkatan harga yang cukup berarti adalah bumbu-bumbuan (11,90%); sayur-sayuran (11,26%); serta daging dan hasil-hasilnya (8,97%). Jenis bahan makanan yang mengalami inflasi tertinggi adalah cabe merah, cabe rawit, gula merah, bakso, daging sapi, dan daging ayam.

Pergerakan inflasi kelompok bahan makanan selama Oktober-Desember 2005 menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada bulan Oktober, inflasi kelompok bahan makanan mencapai 7,13% (mtm) karena kenaikan biaya transportasi dan faktor musiman

#### BOKS 4. DAMPAK KENAIKAN HARGA BBM TERHADAP INDUSTRI MAKANAN JADI DI JAWA BARAT

Kenaikan harga BBM 1 Oktober 2005 yang cukup signifikan tentunya berpengaruh terhadap industri yang menggunakan BBM sebagai sumber energi. Salah satu industri yang terkena dampak kenaikan tersebut adalah industri makanan jadi. Oleh karena itu KBI Bandung melakukan penelitian tentang hal tersebut. Industri makanan jadi dipilih sebagai obyek penelitian dengan pertimbangan bahwa di tingkat konsumsi masyarakat Jawa Barat terhadap makanan jadi relatif tinggi. Oleh karena itu, perubahan harga pada komoditas tersebut akan besar dampaknya terhadap laju inflasi di Jawa Barat. Penelitian mengambil sampel di empat kota/kabupaten yang memiliki jumlah industri makanan jadi relatif besar, yaitu Kota/Kabupaten Cirebon, Kota/Kabupaten Sukabumi, Kota/Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Garut.

Industri makanan jadi di Jawa Barat didominasi oleh usaha berskala kecil (jumlah tenaga kerjanya kurang dari 10 orang), yaitu sebanyak 46%, sedangkan sisanya adalah perusahaan skala menengah dan skala besar. Hasil penelitian di wilayah tersebut menunjukkan hampir seluruh responden (90%) menyatakan bahwa terjadi kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi rata-rata sebesar 30%. Penyebab utama kenaikan biaya produksi adalah kenaikan harga bahan baku (seperti tepung/beras ketan, tepung terigu, tepung tapioka, telur, buah-buahan, kedelai, gula, minyak goreng), biaya distribusi (angkutan), dan kenaikan upah pegawai. Sementara itu kenaikan harga BBM secara langsung terhadap biaya produksi tidak terlalu besar, karena penggunaan BBM hanya sebesar 15% dari biaya produksi. Bahkan, beberapa pengusaha kecil menggunakan kayu bakar sebagai sumber energi karena lebih murah dibandingkan BBM.

Kenaikan biaya produksi tersebut, memaksa para pengusaha untuk menaikkan harga jual. Namun, kenaikan harga hanya berkisar antara 10-15%, tidak sebanding dengan kenaikan biaya produksi. Pengusaha menyadari bahwa daya beli sebagian masyarakat mengalami penurunan, sehingga apabila

## PERKEMBANGAN INFLASI

harga dinaikkan terlalu besar, penjualan dikhawatirkan menurun drastis. Agar tetap dapat memperoleh margin keuntungan, pengusaha juga melakukan pengurangan kualitas ataupun pengurangan kuantitas/berat produk yang dijual/diproduksi.

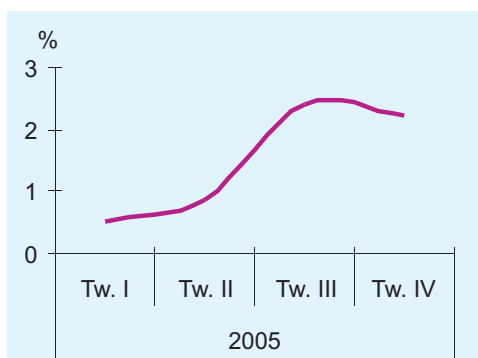
Penurunan daya beli masyarakat tercermin dari volume penjualan produk makanan jadi yang mengalami penurunan rata-rata 27% sejak kenaikan harga BBM. Masyarakat lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok (nasi dan lauk-pauknya), namun mengurangi konsumsi barang lainnya, antara lain makanan jadi (kue, roti, dll.)

(hari raya Idul Fitri). Selanjutnya pada bulan November, laju inflasi kelompok ini melambat hingga menjadi 1,70% (mtm), dan terus menurun hingga terjadi deflasi pada Desember 2005 sebesar 0,96% (mtm). Deflasi pada bulan Desember 2005 terjadi terutama pada bahan makanan yang mengalami kenaikan harga sangat tinggi pada bulan Ramadhan, seperti harga bumbu-bumbuan dan daging, seiring kembali normalnya permintaan masyarakat.

### e. Kelompok sandang

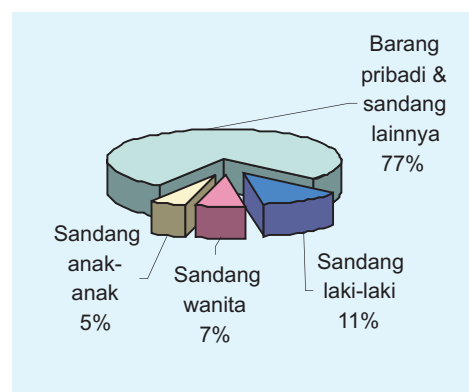
Inflasi gabungan tujuh kota untuk kelompok sandang pada triwulan IV-2005 mencapai 2,22% (qtq) dengan andil 0,12%, sedikit lebih rendah dibandingkan laju inflasi pada triwulan sebelumnya, yang sebesar 2,41% (Grafik 2.20). Inflasi kelompok sandang tertinggi terjadi di

Grafik 2.20. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Kelompok Sandang



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Grafik 2.21 Pembentukan Inflasi Kelompok Sandang Menurut Subkelompok Triwulan IV-2005

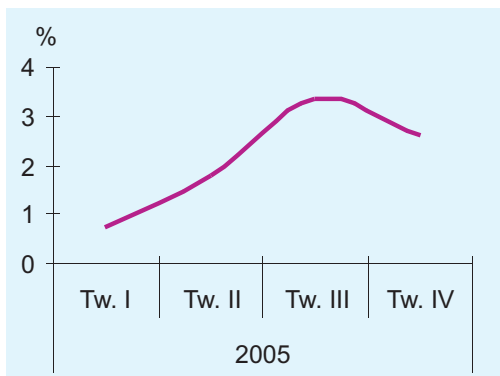


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Kota Banjar, yaitu sebesar 5,86% (qtq).

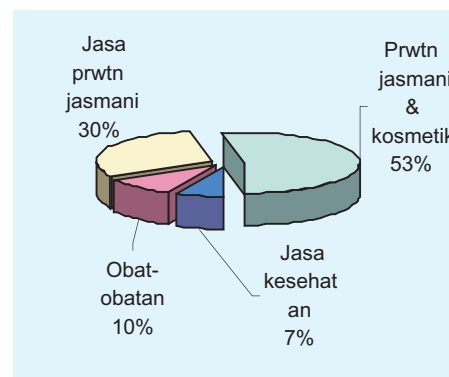
Inflasi subkelompok barang pribadi dan sandang lainnya mendominasi inflasi kelompok sandang (Grafik 2.21). Pendorong inflasi kelompok sandang antara lain berasal dari kenaikan harga emas perhiasan (9,10%), kenaikan ongkos jahit, dan kenaikan harga pakaian. Inflasi emas perhiasan tertinggi terjadi di Kota Bekasi, yaitu sebesar 14,84% (qtq),

Grafik 2.22. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Kelompok Kesehatan



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Grafik 2.23. Pembentukan Inflasi Kelompok Kesehatan Menurut Subkelompok Triwulan IV-2005



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

sedangkan di kota-kota lain berkisar antara 2,83% hingga 8,56%.

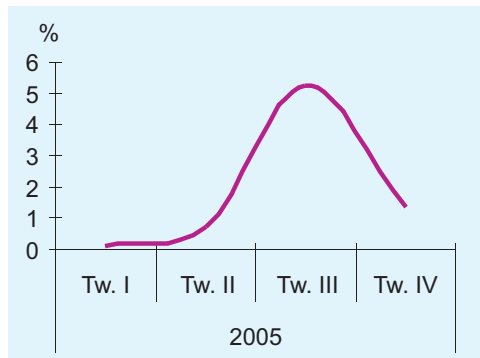
#### f. Kelompok kesehatan

Inflasi kelompok kesehatan mencapai 2,61% (qtq), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya 3,36% (Grafik 2.22). Andil kelompok ini terhadap inflasi relatif rendah, yaitu hanya 0,10%. Inflasi kelompok kesehatan yang tertinggi terjadi di Kota Bekasi (3,60%).

Inflasi kelompok kesehatan didominasi oleh inflasi subkelompok jasa perawatan jasmani (Grafik 2.23), khususnya karena kenaikan tarif jasa salon, obat-obatan, dan kosmetika. Penyebab kenaikan harga pada kelompok kesehatan adalah penyesuaian harga sehubungan kenaikan harga BBM.

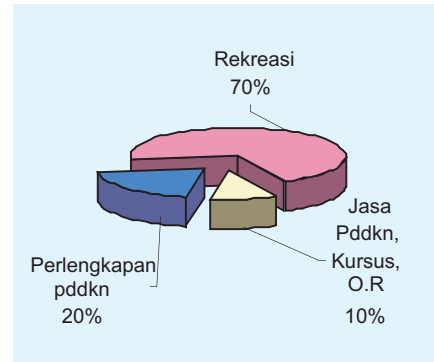
## PERKEMBANGAN INFLASI

Grafik 2.24. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Grafik 2.25. Pembentukan Inflasi Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga Menurut Subkelompok Triwulan IV-2005



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

### g. Kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga

Inflasi kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga merupakan yang terendah dibandingkan kelompok-kelompok lainnya. Inflasi kelompok tersebut adalah sebesar 1,39% (qtq), lebih rendah daripada triwulan sebelumnya yang sebesar 5,24% (Grafik 2.24). Andil kelompok ini terhadap inflasi Jawa Barat sangat kecil, yaitu 0,097%.

Inflasi kelompok pendidikan di Jawa Barat yang tertinggi terjadi di Kota Bandung, yaitu mencapai 3,16% (qtq). Namun demikian, di Kota Banjar dan Bogor kelompok ini mengalami deflasi masing-masing -11,62% dan -2,30% (qtq).

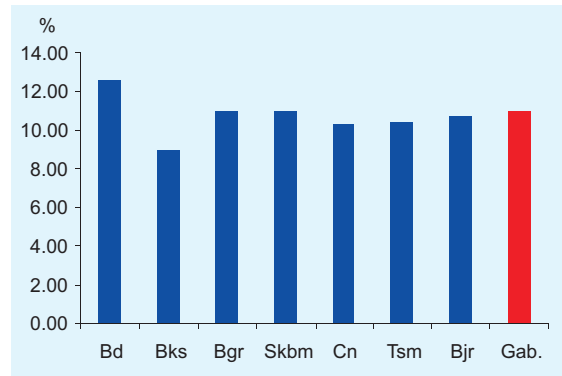
Pendorong utama kenaikan laju inflasi kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga

<sup>8</sup> Kebijakan BOS terbit akibat kebijakan pemerintah untuk menaikkan (pengurangan subsidi) harga BBM pada Maret 2005, dengan maksud untuk mengalihkan subsidi dari orang kaya kepada orang miskin. Bantuan operasional sekolah untuk siswa SD, SMP, SMA, dan SMK di Jawa Barat untuk periode Juli-Desember 2005 disalurkan sekaligus dalam satu tahap pada tanggal 30 Agustus 2005. Total dana yang disalurkan sebesar Rp878,6 miliar untuk 6.674.300 siswa SD, SMP, SMA, SMK, dan lembaga pendidikan lainnya yang sederajat di seluruh Jawa Barat. BOS antara lain bisa digunakan untuk membantu biaya transportasi siswa miskin, membayar honorarium guru, buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk perpustakaan.

## PERKEMBANGAN INFLASI

adalah inflasi subkelompok rekreasi (harga koran, tarif rekreasi, harga TV), perlengkapan pendidikan dan kenaikan tarif kursus (Grafik 2.25). Deflasi terjadi pada tarif SLTP dan SD sehubungan dengan penyaluran dana biaya operasional sekolah (BOS)<sup>8</sup> oleh pemerintah. Pada sekolah-sekolah penerima dana BOS, para siswa mendapat pembebasan beberapa komponen biaya sekolah (seperti iuran bulanan/SPP, uang ujian, dsb.), sehingga terjadi deflasi. Deflasi pada jasa pendidikan SD dan SLTP tersebut menjadi penyebab deflasinya kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga di Kota Banjar dan Bogor.

Grafik 2.26. Inflasi Triwulanan di Tujuh Kota di Jawa Barat dan Gabungannya Triwulan IV-2005



Keterangan: Bd=Bandung, Bks=Bekasi, Bgr=Bogor, Skbm=Sukabumi, Tsm=Tasikmalaya, Bjr=Banjar.  
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

### 2.2. INFLASI DI TUJUH KOTA

Pada triwulan IV-2005, laju inflasi mengalami peningkatan yang sangat signifikan di tujuh kota di Jawa Barat dibandingkan triwulan sebelumnya, sehingga secara gabungan

Tabel 2.2. Inflasi Triwulanan Tujuh Kota di Jawa Barat dan Gabungannya Menurut Kelompok Barang dan Jasa Triwulan IV-2005

No.	Kelompok	Kota							
		Bd	Bks	Bgr	Skbm	Cn	Tsm	Bjr	Gab.
1	Bahan makanan	8.75	6.41	7.16	11.20	9.17	7.51	10.44	7.91
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	15.91	10.91	7.96	8.35	3.71	5.84	8.83	11.87
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	9.49	8.23	10.33	12.17	15.03	13.75	16.57	9.67
4	Sandang	2.17	2.53	1.47	0.82	1.24	4.31	5.86	2.22
5	Kesehatan	2.28	3.60	2.12	2.26	0.98	1.14	2.02	2.61
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	3.16	1.19	-2.30	1.36	1.59	2.86	-11.62	1.39
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	29.52	20.20	33.38	26.38	26.45	31.64	22.53	27.10
	Umum	12.56	9.00	10.98	10.94	10.35	10.39	10.78	10.97

Keterangan: Bd=Bandung, Bks=Bekasi, Bgr=Bogor, Skbm=Sukabumi, Tsm=Tasikmalaya, Bjr=Banjar.  
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

inflasi mencapai 10,97% (qtq). Inflasi tertinggi terjadi di Kota Bandung, yang mencapai 12,56% (qtq) (Grafik 2.26). Setelah itu inflasi di Kota Bogor merupakan yang kedua terbesar (10,98%), diikuti oleh Kota Banjar (10,78%).

## PERKEMBANGAN INFLASI

Di semua kota, inflasi terjadi hampir pada semua kelompok barang dan jasa, kecuali di Banjar dan Bogor yang mengalami deflasi pada kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga (Tabel 2.2). Kelompok barang dan jasa dengan laju inflasi tertinggi di semua kota adalah

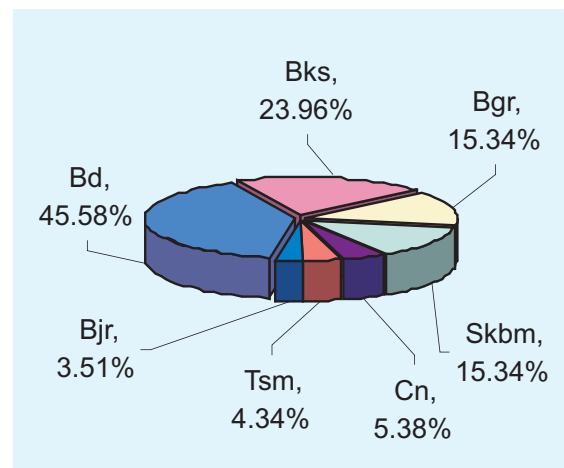
kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan, yaitu berkisar antara 20,20% di Kota Bekasi hingga 33,38% di Kota Bogor.

Perkembangan inflasi gabungan tujuh kota di Jawa Barat sangat dipengaruhi pergerakan harga di Kota Bandung, Bekasi dan Bogor karena nilai konsumsi di kota-kota tersebut lebih tinggi dibandingkan kota-kota lainnya. Oleh karena itu, dalam perhitungan inflasi gabungan tujuh kota, bobot kota<sup>9</sup> terbesar secara berurutan, adalah bobot Kota Bandung (39,82%), Bekasi (29,23%), dan Kota Bogor (15,33%), diikuti oleh Kota Sukabumi, Cirebon, Tasikmalaya, dan Banjar.

Pada triwulan ini kota yang memiliki andil<sup>10</sup> paling besar terhadap inflasi triwulanan gabungan tujuh kota di Jawa Barat adalah Bandung (5,00%), Bekasi (2,63%), dan Bogor (1,68%) (Grafik 2.27). Sementara itu, andil inflasi Tasikmalaya, Sukabumi, Cirebon dan Banjar masing-masing kurang dari 1%.

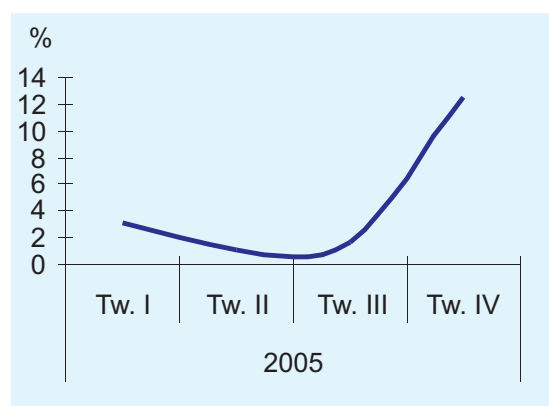
Berdasarkan besarnya andil inflasi setiap kota terhadap inflasi gabungan tujuh kota di Jawa Barat pada triwulan IV-2005,

Grafik 2.27. Pembentukan Inflasi Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Berdasarkan Andil Inflasi Per Kota Triwulan IV-2005



Keterangan: Bd=Bandung, Bks=Bekasi, Bgr=Bogor, Skbm=Sukabumi, Tsm=Tasikmalaya, Bjr=Banjar.  
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Grafik 2.28. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) di Kota Bandung



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

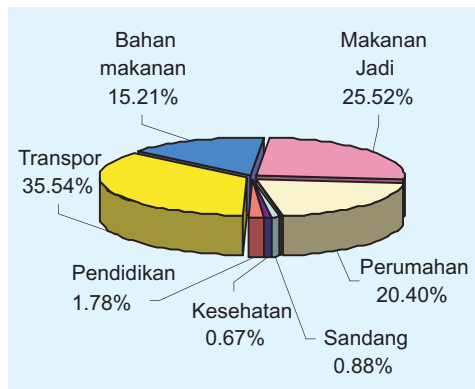
<sup>9</sup> Bobot kota dalam perhitungan inflasi gabungan tujuh kota di Jawa Barat ditentukan berdasarkan nilai konsumsi masyarakat di masing-masing kota. Besarnya bobot merupakan hasil perhitungan BPS.

<sup>10</sup> Andil inflasi = bobot x laju inflasi



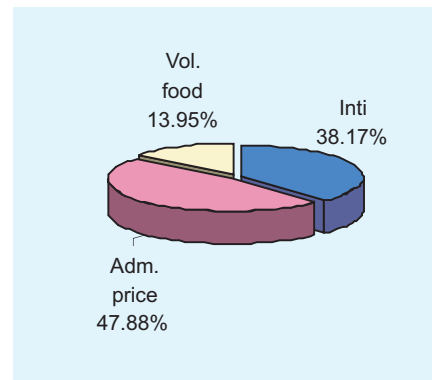
secara berurutan dari yang terbesar hingga yang terkecil adalah sebagai berikut:

Grafik 2.29. Andil Inflasi di Kota Bandung Per Kelompok Barang dan Jasa (qtq) Triwulan IV-2005



Keterangan: nama kelompok disingkat  
 Sumber: Hasil perhitungan KBI Bandung terhadap data BPS Provinsi Jawa Barat.

Grafik 2.30. Disagregasi Inflasi di Kota Bandung Triwulan IV-2005



Sumber: Hasil perhitungan KBI Bandung terhadap data BPS Provinsi Jawa Barat.

a. Kota Bandung

Inflasi di Kota Bandung mencapai 12,56% (qtq) dengan andil 5,00%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, yang sebesar 1,73% (qtq) (Grafik 2.28). Kelompok barang dan jasa yang memberikan andil inflasi tertinggi terhadap inflasi di Kota Bandung adalah kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan (Grafik 2.29), yaitu sebesar 5,04%, atau merupakan 35,54% dari total inflasi Kota Bandung. Dua kelompok lainnya yang juga memberikan andil cukup besar adalah kelompok makanan jadi dan kelompok perumahan. Dilihat dari pembentukan inflasi di Kota Bandung, inflasi administered prices merupakan yang paling dominan, diikuti oleh inflasi inti, dan inflasi volatile food (Grafik 2.30).

Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan (29,52%). Inflasi kelompok ini terutama didorong oleh kenaikan harga premium, solar, dan tarif angkutan baik dalam kota maupun antarkota. Kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau di Kota Bandung merupakan kelompok dengan inflasi kedua tertinggi, yakni sebesar 15,91% (qtq). Inflasi kelompok makanan jadi di Kota Bandung lebih tinggi dibandingkan enam kota lainnya. Kenaikan harga yang paling menonjol pada kelompok ini adalah pada makanan jadi, khususnya nasi rames, mie, dan bubur. Penyebab kenaikan

## PERKEMBANGAN INFLASI

harga pada jenis makanan tersebut adalah kenaikan bahan baku (bahan makanan) dan kenaikan bahan bakar (minyak tanah dan elpiji).

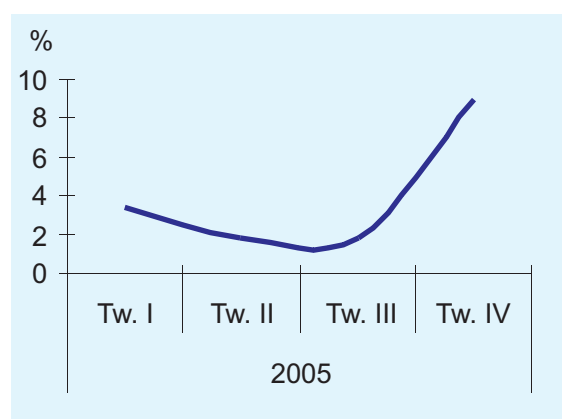
Inflasi makanan jadi di Kota Bandung memiliki karakteristik yang unik dibandingkan kota-kota lainnya di Jawa Barat. Faktor permintaan masyarakat terhadap makanan jadi di Bandung tidak hanya berasal dari masyarakat Kota Bandung sendiri, namun juga didorong oleh tingginya permintaan dari para wisatawan luar kota yang pada setiap akhir pekan dan masa liburan selalu memenuhi Kota Bandung. Situasi tersebut menyebabkan pengusaha makanan jadi di Kota Bandung lebih memiliki keberanian untuk menaikkan harga produknya pasca kenaikan harga BBM, dengan tetap mempertahankan kualitas dan kuantitas makanan. Sementara itu, di kota/kabupaten lainnya, sebagian pengusaha cenderung menggunakan strategi untuk tidak menaikkan harga terlalu tinggi karena khawatir harga tidak terjangkau masyarakat dan akan menyebabkan penurunan permintaan masyarakat. Namun, para pengusaha makanan tersebut menggunakan alternatif strategi yaitu dengan mengurangi kualitas atau kuantitas produknya (lihat Boks 4).

Inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar menempati urutan ketiga terbesar (9,49%) di Kota Bandung. Inflasi kelompok ini disebabkan oleh kenaikan harga minyak tanah, upah tukang bangunan, dan harga bahan bangunan.

Inflasi kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga di Kota Bandung merupakan yang tertinggi dibandingkan kota-kota lain di Jawa Barat. Hal ini disebabkan oleh inflasi pada jasa pendidikan, khususnya biaya pendidikan akademi/perguruan tinggi (5,83% (qtq)). Adapun biaya pendidikan SD di Kota Bandung mengalami deflasi sehubungan penyaluran dana BOS, sama seperti di kota-kota lain.

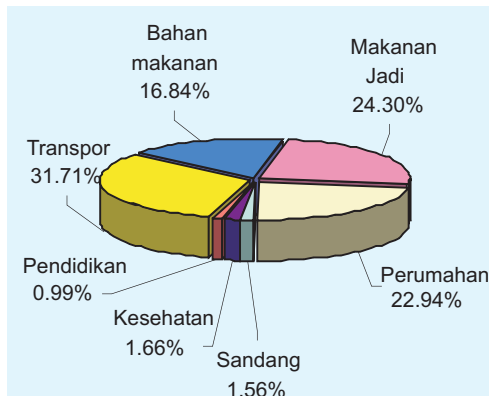
Sementara itu, inflasi dua kelompok barang dan jasa lainnya di Kota Bandung, yaitu kelompok sandang dan kelompok kesehatan masing-masing sebesar 2,17% dan 2,28% (qtq).

Grafik 2.31. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) di Kota Bekasi



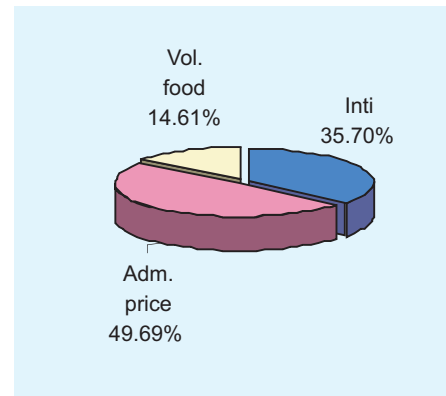
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Grafik 2.32. Andil Inflasi di Kota Bekasi Per Kelompok Barang dan Jasa (qtq) Triwulan IV-2005



Sumber: Hasil perhitungan KBI Bandung terhadap data BPS Provinsi Jawa Barat.

Grafik 2.33. Disagregasi Inflasi di Kota Bekasi Triwulan IV-2005



Sumber: Hasil perhitungan KBI Bandung terhadap data BPS Provinsi Jawa Barat.

b. Kota Bekasi

Inflasi di Kota Bekasi mencapai 9,00%, lebih tinggi dibandingkan inflasi pada triwulan III-2005 (Grafik 2.31), dengan andil 2,63% terhadap inflasi gabungan tujuh kota di Jawa Barat. Kelompok barang dan jasa yang memberikan andil inflasi tertinggi terhadap inflasi di Kota Bekasi adalah kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan (Grafik 2.32), yaitu sebesar 2,85%, atau merupakan 31,71% dari total inflasi Kota Bekasi. Dua kelompok lainnya yang juga memberikan andil cukup besar adalah kelompok makanan jadi dan kelompok perumahan. Dilihat dari pembentukan inflasi di Kota Bekasi, inflasi administered prices merupakan yang paling dominan, diikuti oleh inflasi inti, dan inflasi volatile food (Grafik 2.33).

Di samping memberikan andil inflasi tertinggi, laju inflasi kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan juga merupakan yang tertinggi di Bekasi (20,20% (qtq)), diikuti oleh inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau (10,91% (qtq)). Inflasi kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan disebabkan oleh kenaikan harga BBM dan kenaikan tarif angkutan. Kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau di Kota Bekasi disebabkan oleh kenaikan harga produk makanan jadi seperti nasi rames,

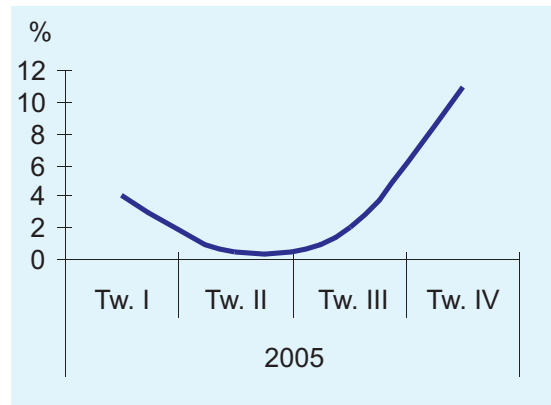
## PERKEMBANGAN INFLASI

kue, mie bakso, minuman ringan, dan rokok. Kenaikan harga makanan jadi antara lain disebabkan oleh kenaikan harga bahan makanan. Inflasi kelompok bahan makanan di Bekasi mencapai 6,41% (qtq), dengan laju inflasi terbesar adalah pada beras, daging sapi dan ayam, serta sayuran.

Kenaikan harga minyak tanah merupakan faktor utama penyebab inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar yang mencapai 8,23% (qtq). Penyebab lainnya adalah kenaikan harga bahan bangunan dan perlengkapan rumah tangga.

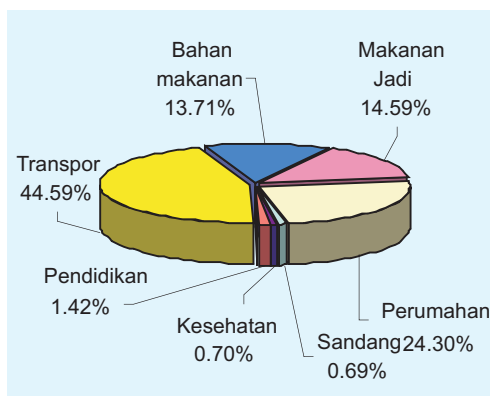
Inflasi kelompok kesehatan; kelompok sandang; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga di Bekasi relatif lebih rendah dibandingkan inflasi keempat kelompok yang telah diuraikan di atas, yakni masing-masing sebesar 3,60%; 2,53%, dan 1,19% (qtq).

Grafik 2.34. Perkembangan Inflasi Bulanan di Kota Bogor



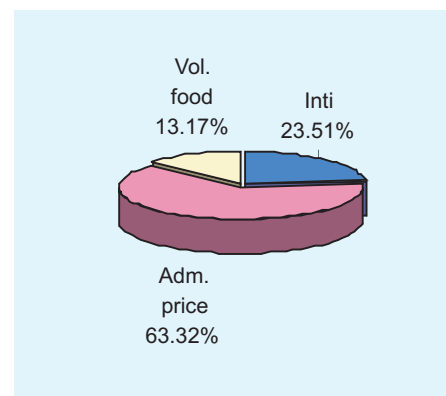
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Grafik 2.35. Andil Inflasi di Kota Bogor Per Kelompok Barang dan Jasa (qtq) Triwulan IV-2005



Sumber: Hasil perhitungan KBI Bandung terhadap data BPS Provinsi Jawa Barat.

Grafik 2.36. Disagregasi Inflasi di Kota Bogor Triwulan IV-2005



Sumber: Hasil perhitungan KBI Bandung terhadap data BPS Provinsi Jawa Barat.

### c. Kota Bogor

Inflasi triwulanan Kota Bogor mencapai 10,98% (Grafik 2.34) dengan andil 1,68% terhadap inflasi gabungan tujuh kota di Jawa Barat pada triwulan IV-2005. Angka inflasi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya yang sebesar 2,07%

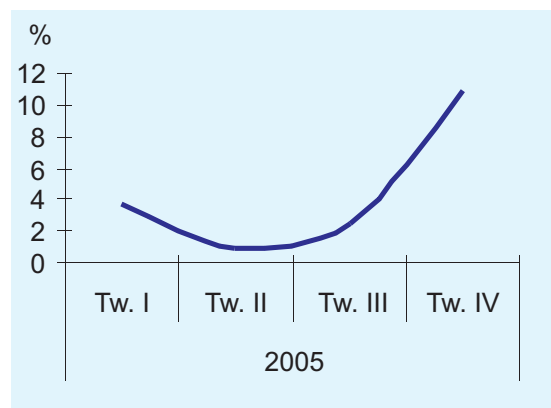
(qtq).

Kelompok barang dan jasa yang memberikan andil inflasi tertinggi terhadap inflasi di Kota Bogor adalah kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan (Grafik 2.35), yaitu sebesar 5,04%, atau merupakan 44,59% dari total inflasi Kota Bogor. Dua kelompok lainnya yang juga memberikan andil cukup besar adalah kelompok perumahan dan kelompok makanan jadi. Dilihat dari pembentukan inflasi di Kota Bogor, inflasi administered prices merupakan yang paling dominan, diikuti oleh inflasi inti, dan inflasi volatile food (Grafik 2.36).

Inflasi tertinggi di Kota Bogor terjadi pada kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan, sebesar 33,38% (qtq). Laju inflasi kelompok tersebut di Bogor merupakan yang tertinggi di antara tujuh kota. Tingginya laju inflasi tersebut disebabkan oleh tingginya inflasi tarif angkutan dalam kota yang pasca kenaikan harga BBM 1 Oktober 2005 mencapai 62,50% (qtq). Inflasi angkutan dalam kota memberikan andil 3,86% (qtq) terhadap inflasi di Bogor selama triwulan IV-2005.

Selanjutnya, inflasi kelompok perumahan, listrik, air, gas, dan bahan bakar menempati urutan kedua tertinggi, yaitu sebesar 10,33% (qtq), diikuti oleh inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau serta inflasi kelompok bahan makanan dengan inflasi masing-masing sebesar 7,96% dan 7,16% (qtq). Sementara itu, inflasi kelompok barang dan jasa lainnya di bawah 3%. Kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga adalah satu-satunya kelompok yang mengalami deflasi, yaitu mencapai -2,30% (qtq) disebabkan oleh deflasi pada jasa pendidikan SLTP dan SD sehubungan

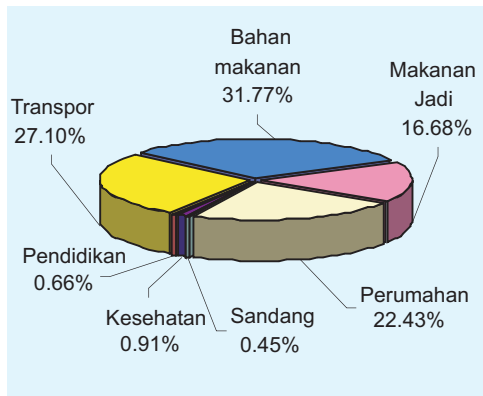
Grafik 2.37. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) di Kota Sukabumi



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

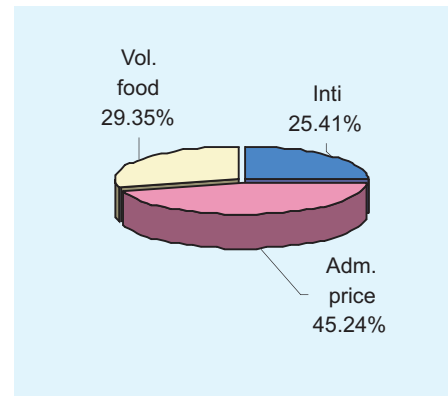
## PERKEMBANGAN INFLASI

Grafik 2.38. Andil Inflasi di Kota Sukabumi Per Kelompok Barang dan Jasa (qtq) Triwulan IV-2005



Sumber: Hasil perhitungan KBI Bandung terhadap data BPS Provinsi Jawa Barat.

Grafik 2.39. Disagregasi Inflasi di Kota Sukabumi Triwulan IV-2005



Sumber: Hasil perhitungan KBI Bandung terhadap data BPS Provinsi Jawa Barat.

dengan penyaluran dana BOS di sekolah-sekolah di Kota Bogor.

### d. Kota Sukabumi

Pada triwulan IV-2005 inflasi di Kota Sukabumi mencapai 10,94% dengan andil 0,59% (Grafik 2.37). Angka inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (2,56%).

Kelompok barang dan jasa yang memberikan andil inflasi tertinggi terhadap inflasi di Kota Sukabumi adalah kelompok bahan makanan (Grafik 2.38), yaitu sebesar 3,48%, atau merupakan 31,78% dari total inflasi Kota Sukabumi. Dua kelompok lainnya yang juga memberikan andil cukup besar adalah kelompok transpor dan kelompok perumahan.

Meskipun inflasi kelompok bahan makanan (11,20% (qtq)) lebih rendah dibandingkan inflasi kelompok transpor (26,38% (qtq)), andil inflasi kelompok bahan makanan lebih tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh relatif tingginya nilai konsumsi bahan makanan dibandingkan kelompok lainnya di Sukabumi, yaitu hampir tiga kali lipat nilai konsumsi untuk kelompok transpor. Di enam kota lainnya, perbandingan nilai konsumsi untuk kelompok bahan

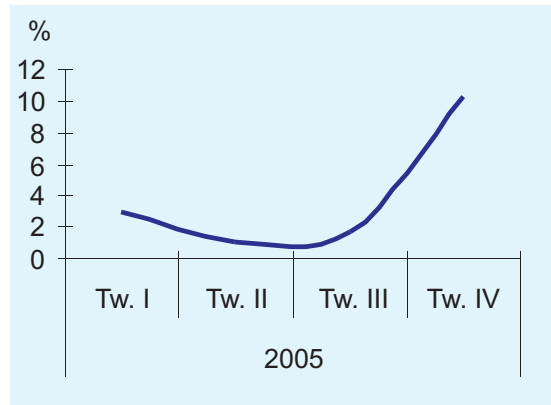
## PERKEMBANGAN INFLASI

makanan dan kelompok transpor kurang dari tiga kali lipat. Sementara itu, dilihat dari pembentukan inflasi di Kota Sukabumi, inflasi administered prices merupakan yang paling dominan, diikuti oleh inflasi inti, dan inflasi volatile food (Grafik 2.39).

Inflasi tertinggi di kota tersebut, seperti telah disebutkan di atas, terjadi pada kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan (26,38% (qtq)), terutama didorong oleh kenaikan tarif angkutan dalam kota dan harga BBM. Selanjutnya, inflasi kelompok perumahan, listrik, air, gas, dan bahan bakar menempati urutan kedua tertinggi, yaitu sebesar 12,17% (qtq), diikuti oleh inflasi kelompok bahan makanan serta inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau dengan inflasi masing-masing sebesar 11,20% dan 8,35%. Sementara itu, inflasi kelompok barang dan jasa lainnya di bawah 3%.

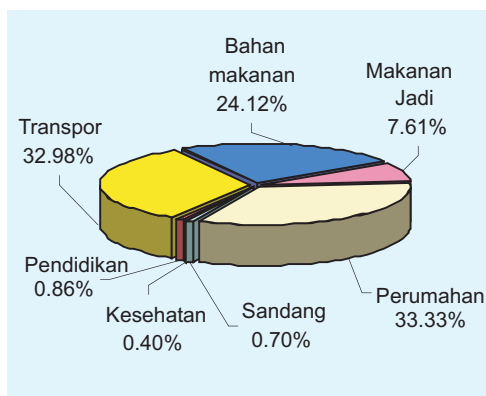
### e. Kota Cirebon

Grafik 2.40. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) di Kota Cirebon



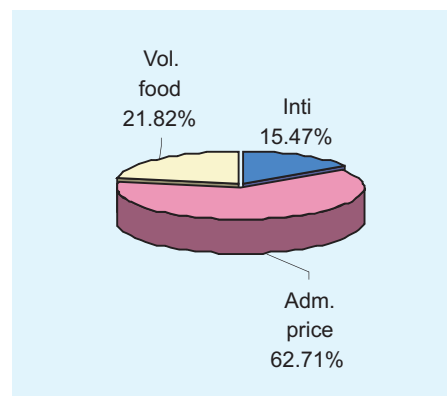
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Grafik 2.41. Andil Inflasi di Kota Cirebon Per Kelompok Barang dan Jasa (qtq) Triwulan IV-2005



Sumber: Hasil perhitungan KBI Bandung terhadap data BPS Provinsi Jawa Barat.

Grafik 2.42. Disagregasi Inflasi di Kota Cirebon Triwulan IV-2005



Sumber: Hasil perhitungan KBI Bandung terhadap data BPS Provinsi Jawa Barat.

## PERKEMBANGAN INFLASI

Inflasi di Kota Cirebon mencapai 10,35% dengan andil 0,48% terhadap inflasi gabungan tujuh kota di Jawa Barat (Grafik 2.40). Inflasi tersebut lebih tinggi daripada inflasi yang terjadi pada triwulan sebelumnya (1,75% (qtq)).

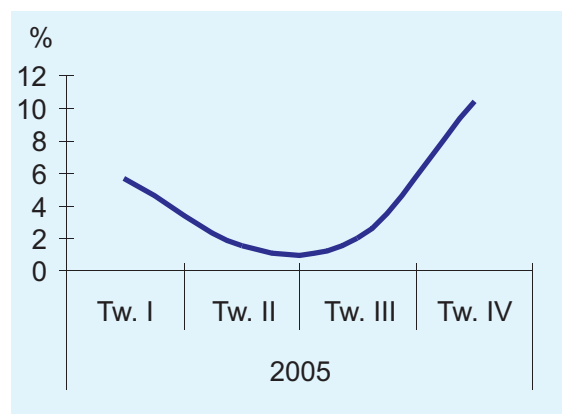
Kelompok barang dan jasa yang memberikan andil inflasi tertinggi terhadap inflasi di Kota Cirebon adalah kelompok perumahan (Grafik 2.41), yaitu sebesar 3,45%, atau merupakan 33,33% dari total inflasi Kota Cirebon. Tingginya andil inflasi kelompok perumahan di Cirebon adalah karena tingginya inflasi minyak tanah di kota tersebut (tertinggi di antara tujuh kota), yaitu sebesar 150,01% (qtq), sehingga andil inflasi minyak tanah saja sebesar 2,70% terhadap inflasi Cirebon. Dua kelompok lainnya yang juga memberikan andil cukup besar adalah kelompok transpor dan kelompok bahan makanan. Dilihat dari pembentukan inflasi di Kota Cirebon, inflasi administered prices merupakan yang paling dominan, diikuti oleh inflasi inti, dan inflasi volatile food (Grafik 2.42).

Berdasarkan besarnya laju inflasi, Inflasi kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan (26,45%) merupakan yang tertinggi di kota tersebut karena naiknya harga BBM dan tarif angkutan. Inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, yang mencapai 15,03% (qtq), merupakan inflasi kedua terbesar di Kota Cirebon. Seperti telah disebutkan di atas, inflasi minyak tanah (yang termasuk ke dalam kelompok perumahan) di Cirebon merupakan yang tertinggi dibandingkan enam kota lainnya dan memberikan andil terbesar terhadap inflasi di Kota Cirebon.

Selanjutnya, inflasi kelompok bahan makanan serta kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau di Cirebon masing-masing mencapai 9,17% dan 3,71% (qtq). Inflasi kelompok bahan makanan

terutama disebabkan oleh kenaikan harga beras, daging, dan bumbu-bumbuan, sedangkan inflasi kelompok makanan jadi terutama didorong oleh kenaikan harga makanan jadi dan rokok. Sementara itu, inflasi kelompok barang dan jasa lainnya kurang dari 2%.

Grafik 2.43. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) di Kota Tasikmalaya

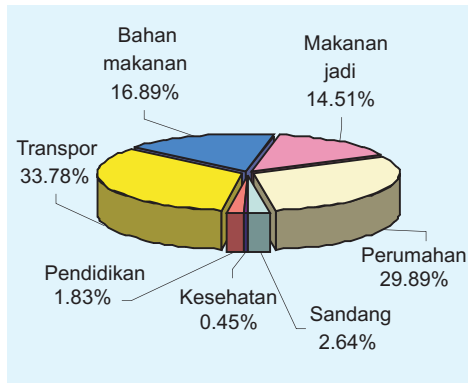


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.



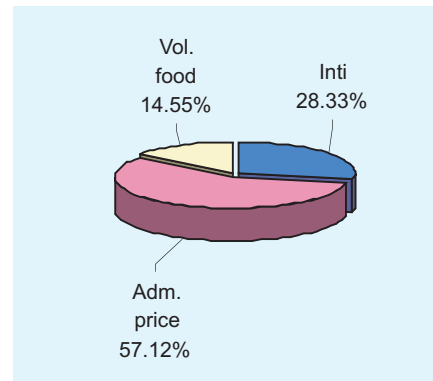
## PERKEMBANGAN INFLASI

Grafik 2.44. Andil Inflasi di Kota Tasikmalaya Per Kelompok Barang dan Jasa (qtq) Triwulan IV-2005



Sumber: Hasil perhitungan KBI Bandung terhadap data BPS Provinsi Jawa Barat.

Grafik 2.45. Disagregasi Inflasi di Kota Tasikmalaya Triwulan IV-2005



Sumber: Hasil perhitungan KBI Bandung terhadap data BPS Provinsi Jawa Barat.

### f. Kota Tasikmalaya

Barang dan jasa di Kota Tasikmalaya mengalami inflasi 10,31% (qtq) dengan andil 0,39%, lebih tinggi daripada inflasi triwulan sebelumnya (Grafik 2.43). Kelompok barang dan jasa yang memberikan andil inflasi tertinggi terhadap inflasi di Kota Tasikmalaya adalah kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan (Grafik 2.44), yaitu sebesar 3,51%, atau merupakan 33,78% dari total inflasi Kota Tasikmalaya. Dua kelompok lainnya yang juga memberikan andil cukup besar adalah kelompok perumahan dan kelompok bahan makanan. Dilihat dari pembentukan inflasi di Kota Tasikmalaya, inflasi administered prices merupakan yang paling dominan, diikuti oleh inflasi inti, dan inflasi volatile food (Grafik 2.45).

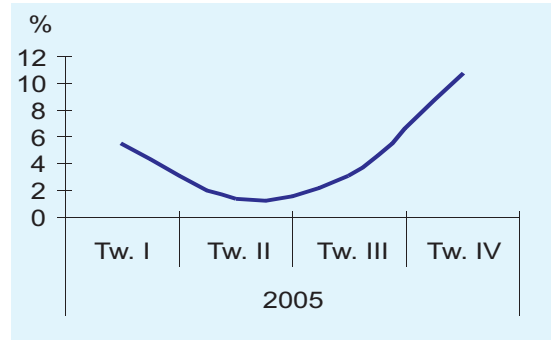
Inflasi di kota tersebut terutama didorong oleh peningkatan harga pada kelompok

## PERKEMBANGAN INFLASI

transpor, komunikasi, dan jasa keuangan (31,64%). Kelompok lainnya yang mengalami inflasi cukup tinggi di Kota Tasikmalaya adalah kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar (13,75%) karena kenaikan harga minyak tanah, bahan bangunan, dan barang/alat pemeliharaan rumah.

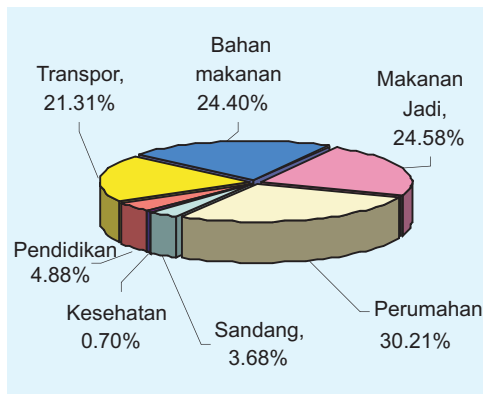
Kelompok yang mengalami inflasi di atas 5% di Tasikmalaya adalah kelompok bahan makanan (7,51%), diikuti oleh inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau (5,84%). Pada kelompok bahan makanan, komoditas yang mengalami kenaikan cukup tinggi antara lain harga beras, sayuran, dan buah-buahan, sedangkan pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau adalah mie, kue, roti, minuman ringan, dan rokok. Sementara itu, inflasi kelompok barang dan jasa lainnya di Tasikmalaya kurang dari

Grafik 2.46. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) di Kota Banjar



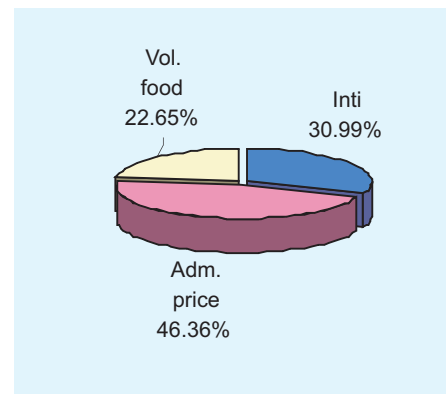
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Grafik 2.47. Andil Inflasi di Kota Banjar Per Kelompok Barang dan Jasa (qtq) Triwulan IV-2005



Sumber: Hasil perhitungan KBI Bandung terhadap data BPS Provinsi Jawa Barat.

Grafik 2.48. Disagregasi Inflasi di Kota Banjar Triwulan IV-2005



Sumber: Hasil perhitungan KBI Bandung terhadap data BPS Provinsi Jawa Barat.

3%.

### g. Kota Banjar

Inflasi di Kota Banjar mencapai 10,78%, dengan andil 0,21% terhadap inflasi Jawa Barat, lebih tinggi dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya (Grafik 2.46)

Kelompok barang dan jasa yang memberikan andil inflasi tertinggi terhadap inflasi di Kota Banjar adalah kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar (Grafik 2.47), yaitu sebesar 3,25%, atau merupakan 30,21% dari total inflasi Kota Banjar. Kelompok lainnya yang juga memberikan andil cukup besar adalah kelompok makanan jadi, kelompok bahan makanan, dan kelompok transpor. Dilihat dari pembentukan inflasi di Kota Banjar, inflasi administered prices merupakan yang paling dominan, diikuti oleh inflasi inti, dan inflasi

**Halaman ini sengaja dikosongkan**  
**This page is intentionally blank**

# BAB 3 PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

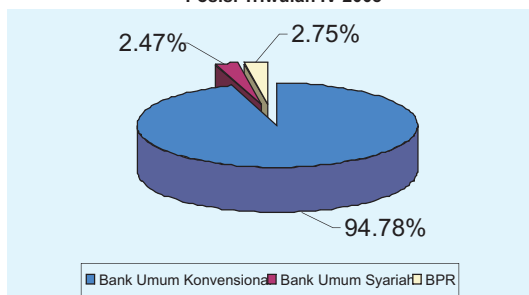
## 1. KONDISI UMUM

Perkembangan makro ekonomi pada triwulan IV-2005, yang ditandai dengan kenaikan inflasi, akibat kenaikan harga BBM sejak awal Oktober 2005, dan meningkatnya suku bunga, telah menimbulkan dampak yang kurang menggembirakan terhadap kinerja dunia usaha, termasuk perbankan di Jawa Barat. Hal ini tercermin pada menurunnya profitabilitas dan efisiensi usaha bank.

Namun demikian, secara umum kinerja perbankan di Jawa Barat tetap menunjukkan perkembangan yang positif. DPK yang dihimpun dan kredit yang disalurkan masih mengalami peningkatan. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) mengalami penurunan. Khusus untuk bank umum yang berkantor pusat di Bandung, total aset dan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) tetap mengalami peningkatan.

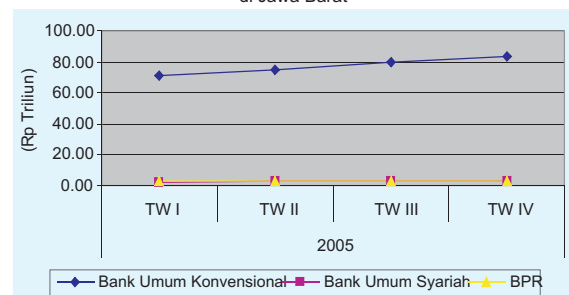
Total aset perbankan di Jawa Barat, yang meliputi bank umum dan BPR, mencapai Rp109,11 triliun, meningkat sebesar Rp3,69 triliun atau tumbuh 3,50% dibanding triwulan sebelumnya. Sebagaimana triwulan-triwulan sebelumnya, pangsa terbesar aset perbankan di Jawa Barat dimiliki oleh bank umum konvensional, yakni sebesar 94,78% (Rp103,41 triliun), sementara pangsa bank umum syariah dan BPR masing-masing hanya sebesar 2,47% (Rp2,70 triliun) dan 2,75% (Rp3 triliun) (Grafik 3.1 dan 3.2).

Grafik 3.1. Komposisi Aset Perbankan di Jawa Barat, Posisi Triwulan IV-2005



Sumber: LBU dan SEKDA KBI Bandung

Grafik 3.2. Perkembangan Aset Perbankan di Jawa Barat

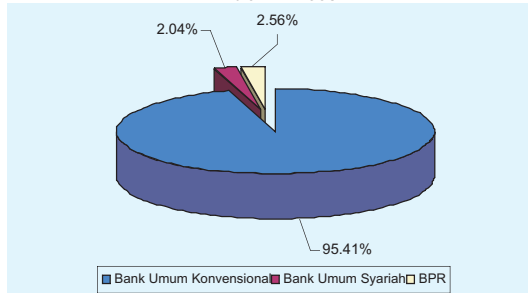


Sumber: LBU dan SEKDA KBI Bandung

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

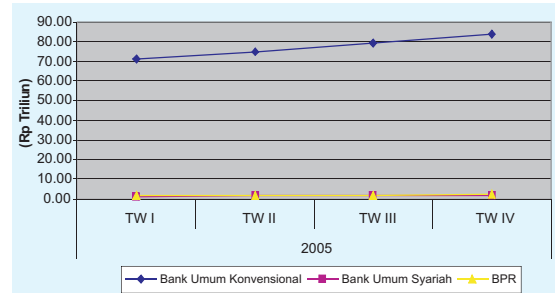
Meningkatnya suku bunga simpanan yang ditawarkan oleh perbankan kepada masyarakat telah mendorong pertumbuhan DPK, baik pada bank umum maupun BPR. Sampai dengan triwulan IV-2005, total DPK perbankan mencapai Rp87,56 triliun, meningkat sebesar Rp4,34 triliun atau tumbuh 5,21% dibanding posisi DPK triwulan III-2005. Dibandingkan dengan pertumbuhan DPK pada triwulan III-2005 yang sebesar 5,63%, pertumbuhan DPK pada triwulan IV-2005 sedikit mengalami penurunan. Pangsa bank umum konvensional dalam penghimpunan DPK mencapai 95,43% (Rp83,54 triliun), sementara bank umum syariah dan BPR masing-masing sebesar 2,04% (Rp1,78 triliun) dan 2,54% (Rp2,22 triliun) (Grafik 3.3 dan 3.4).

Grafik 3.3. Komposisi DPK Perbankan di Jawa Barat, Posisi Triwulan IV-2005



Sumber: LBU dan SEKDA KBI Bandung

Grafik 3.4. Perkembangan DPK Perbankan di Jawa Barat



Sumber: LBU dan SEKDA KBI Bandung

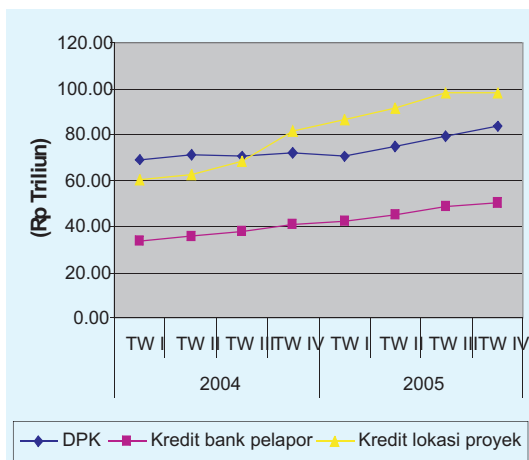
### 1.1. BANK UMUM

Sampai dengan akhir triwulan IV-2005, Total DPK yang dihimpun maupun kredit yang disalurkan bank umum masih mengalami peningkatan. DPK yang dihimpun mencapai Rp83,54 triliun, atau tumbuh 5,32% (qtq), sementara kredit yang disalurkan mencapai Rp50,52 triliun atau tumbuh 3,24% (qtq) (Grafik 3.5). Namun demikian, apabila dibandingkan dengan tren kredit bank umum pemerintah (BUP), bank umum swasta nasional (BUSN) dan bank asing campuran (BAC) triwulan III-2005, masing-masing mengalami perlambatan. Melambatnya pertumbuhan DPK diperkirakan karena penarikan simpanan oleh masyarakat untuk membiayai konsumsi yang meningkat akibat adanya kenaikan harga barang dan jasa. Sementara, penurunan pertumbuhan kredit, yang lebih besar daripada penurunan pertumbuhan DPK, antara lain disebabkan karena sektor riil menunda sebagian rencana ekspansi usahanya akibat kenaikan harga BBM dan suku bunga kredit. Sementara itu, karena kenaikan kredit yang sebesar Rp1,58 triliun lebih kecil daripada kenaikan DPK yang sebesar Rp4,22 triliun, LDR pada triwulan ini mengalami penurunan, dari 61,69% pada triwulan III-2005 menjadi 60,48% pada triwulan IV-2005.

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

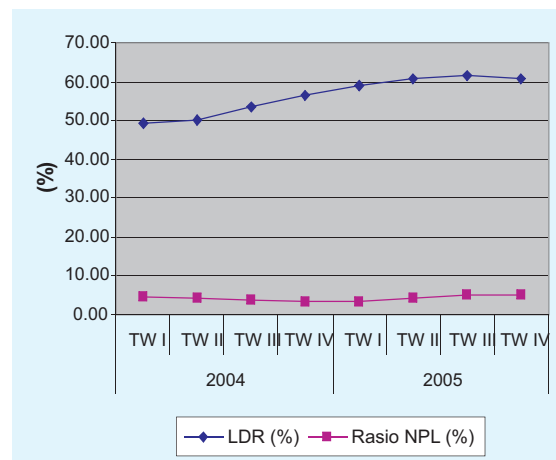
Berbeda halnya dengan LDR yang mengalami penurunan, kualitas kredit pada triwulan ini menunjukkan peningkatan, sebagaimana dapat dilihat dari penurunan rasio NPL gross, dari 4,95% pada triwulan III-2005 menjadi 4,91% pada triwulan IV-2005 (Grafik 3.6). Penurunan rasio NPL gross ini disebabkan karena adanya penurunan pertumbuhan kredit bermasalah, dari 29,31% (qtq) pada triwulan III-2005 menjadi 2,56% (qtq) pada triwulan IV-2005, yang juga lebih kecil dibanding pertumbuhan kredit triwulan IV-2005 yang sebesar

Grafik 3.5.  
Perkembangan DPK dan Kredit



Sumber: LBU dan SEKDA KBI Bandung

Grafik 3.6.  
Perkembangan LDR dan NPL



Sumber: LBU KBI Bandung

3,24% (qtq).

Pada triwulan IV-2005, lebih dari 50% kredit disalurkan untuk kegiatan produktif, yang meliputi kredit investasi sebesar 10,10% dan kredit modal kerja sebesar 41,05%, sementara kredit untuk konsumsi sebesar 48,85%. Jika dilihat berdasarkan lokasi proyek, posisi kredit yang disalurkan oleh bank umum konvensional mencapai Rp98,32 triliun, meningkat sebesar Rp32 miliar atau tumbuh 4,25% dibanding posisi pada triwulan sebelumnya.

### 1.1.1. DANA PIHAK KETIGA

Kenaikan suku bunga dana/simpanan, terutama untuk jenis simpanan deposito, telah mendorong minat masyarakat untuk menyimpan dananya di perbankan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan DPK, yang pada triwulan IV-2005 mencapai Rp83,54 triliun, meningkat Rp4,22 triliun atau tumbuh 5,32% dibanding posisi triwulan sebelumnya. Untuk deposito, pada triwulan laporan tumbuh sebesar 15,06% (qtq), lebih tinggi dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya. Sedangkan giro dan tabungan, masing-masing turun sebesar 4,72%

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

(qtq) dan 1,33% (qtq).

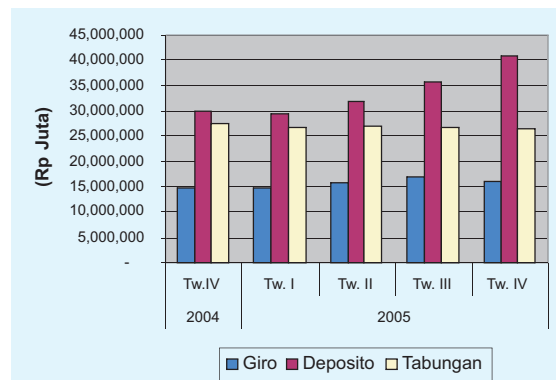
Penurunan simpanan giro diperkirakan antara lain disebabkan oleh penarikan dana untuk membiayai kenaikan biaya produksi. Sementara itu, penurunan tabungan merupakan dampak dari menurunnya pendapatan riil sebagian deposan akibat kenaikan harga-harga sehingga alokasi pengeluaran untuk konsumsi secara kuantitatif meningkat. Bagi deposan yang berpendapatan tetap, dampak kenaikan harga ini akan menurunkan kemampuannya menyisihkan sebagian pendapatan untuk saving, bahkan melakukan penarikan tabungan untuk membiayai konsumsinya. Hal ini didukung survei hasil kerjasama KBI Bandung dan ISEI tahun 2005.

Dibandingkan dengan tabungan, deposito relatif lebih sensitif terhadap perkembangan suku bunga dan alternatif investasi lainnya. Untuk tabungan, penggunaannya cenderung untuk mendukung pembiayaan transaksi/konsumsi dan untuk keperluan berjaga-jaga (precautionary), sementara deposito lebih cenderung sebagai alternatif investasi.

Berdasarkan nominalnya, simpanan dalam bentuk deposito meningkat Rp5,37 triliun, giro turun Rp0,80 triliun, dan tabungan turun Rp0,36 triliun. Dengan demikian, komposisi DPK pada triwulan IV-2005 terdiri dari deposito sebesar Rp41,00 triliun (49,08%), giro Rp16,04 triliun (19,20%) dan tabungan Rp26,50 triliun (31,73%) (Grafik 3.7).

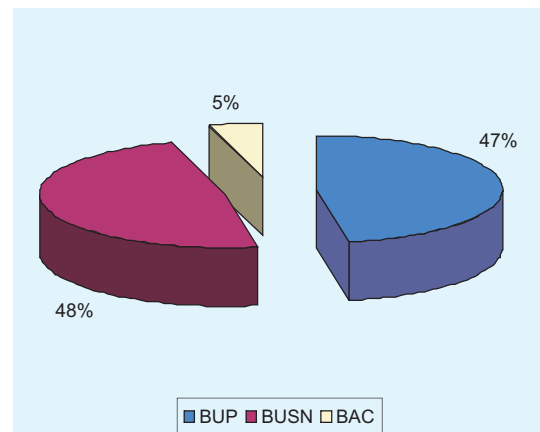
Dilihat dari kelompok bank, sampai dengan akhir triwulan IV-2005, DPK yang berhasil dihimpun oleh Bank Umum Pemerintah (BUP), Bank Umum Swasta Nasional (BUSN), dan Bank Asing Campuran (BAC) masing-masing mencapai Rp39,38 triliun (47,13%), Rp40,19 triliun (48,11%), dan Rp3,98 triliun (4,76%) (Grafik 3.8). Penghimpunan DPK oleh ketiga kelompok

Grafik 3.7. Penghimpunan DPK



Sumber LBU KBI Bandung

Grafik 3.8. Pangsa Penghimpunan DPK Berdasarkan Kelompok Bank, Triwulan IV-2005



Sumber LBU KBI Bandung



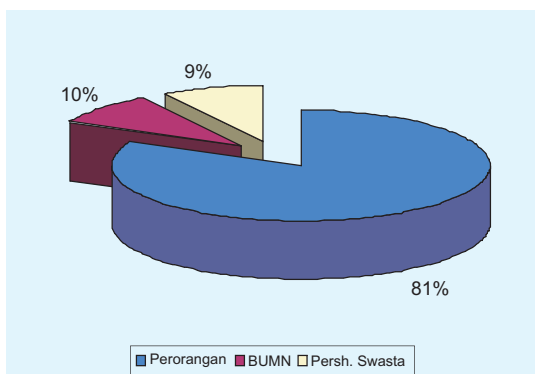
## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

bank tersebut mengalami pertumbuhan dibanding posisi DPK triwulan sebelumnya, masing-masing sebesar 6,93%, 4,11%, dan 2,03%.

Sama halnya dengan triwulan III-2005, pangsa DPK masih didominasi oleh kelompok BUSN. Namun dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan DPK terbesar terjadi pada kelompok BUP. Hal ini antara lain disebabkan karena meningkatnya kegiatan promosi produk yang dilakukan oleh BUP.

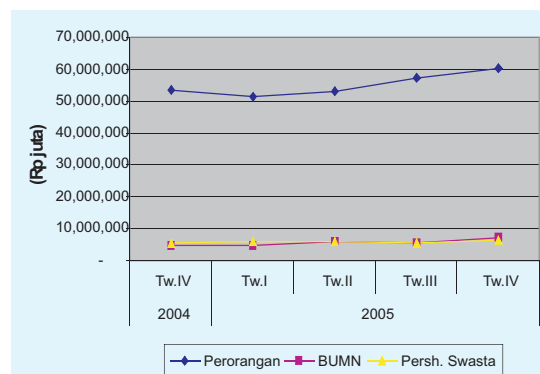
Berdasarkan golongan pemilik, DPK yang dihimpun oleh perbankan di Jawa Barat sebagian besar masih berasal dari nasabah perorangan, dengan posisi sebesar Rp60,29 triliun (72,17%), kemudian BUMN dan perusahaan swasta, masing-masing sebesar Rp7,03 triliun (8,42%) dan Rp6,32 triliun (7,56%) (Grafik 3.9). Dilihat pertumbuhannya, DPK milik

Grafik 3.9. Pangsa DPK Berdasarkan Golongan Pemilik, Triwulan IV-2005



Sumber : LBU KBI Bandung

Grafik 3.10. Perkembangan Posisi DPK Berdasarkan Golongan Pemilik

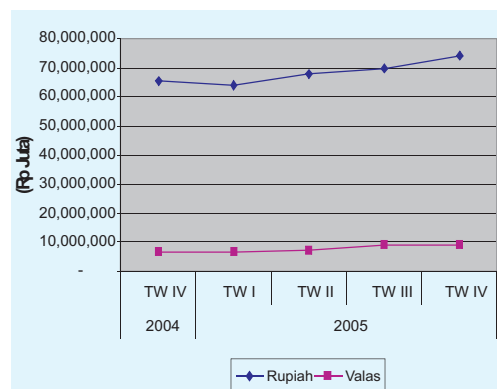


Sumber : LBU KBI Bandung

perorangan tumbuh 5,21%, lebih rendah dari pertumbuhan DPK milik BUMN dan perusahaan swasta, yang masing-masing sebesar 24,34% dan 10,49% (Grafik 3.10).

Berdasarkan valuta, penghimpunan DPK dalam rupiah sampai dengan akhir triwulan IV-2005 mencapai Rp74,30 triliun, tumbuh 6,33% (qtq). Sementara, DPK dalam valuta asing tercatat sebesar Rp9,24 triliun, turun 2,21% dibanding posisi triwulan sebelumnya (Grafik 3.11). Penyebab

Grafik 3.11. Penghimpunan DPK Bank Umum dalam Rupiah dan Valas



Sumber LBU KBI Bandung

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

peningkatan DPK dalam rupiah dan turunnya DPK dalam valuta asing antara lain disebabkan oleh tingginya suku bunga simpanan dalam rupiah, sementara suku bunga simpanan dalam valuta asing relatif tetap.

Peningkatan DPK dalam rupiah terjadi hanya pada deposito sebesar 17,11%, sedangkan giro dan tabungan turun masing-masing sebesar 2,87% dan 1,32%. Meningkatnya simpanan dalam rupiah ini, yang terutama terjadi dalam dua bulan terakhir, merupakan dampak dari kenaikan suku bunga dana dan menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (US\$).

### 1.1.2. PENYALURAN KREDIT

#### 1.1.2.1. PENYALURAN KREDIT BANK PELAPOR<sup>9</sup>

Dalam periode laporan, penyaluran kredit bank umum masih mengalami pertumbuhan sebesar 3,24% (qto). Hal ini diperkirakan antara lain karena suku bunga kredit telah disepakati sebelum kenaikan harga BBM. Selain itu, kredit perbankan lebih banyak disalurkan kepada UMKM untuk jumlah dibawah Rp50 juta, yang relatif kurang sensitif terhadap perubahan suku bunga antara 1-2%.

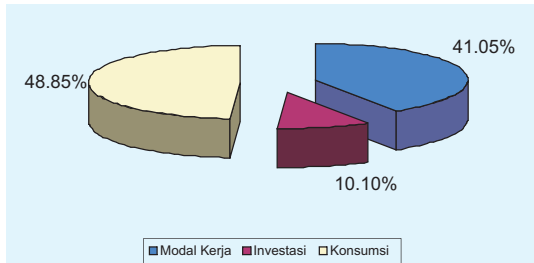
Berdasarkan jenis penggunaannya, sebagian besar kredit bank umum konvensional di Jawa Barat disalurkan untuk kegiatan produktif (modal kerja dan investasi). Sampai dengan triwulan IV-2005, posisi kredit untuk kegiatan produktif ini tercatat sebesar Rp25,84 triliun (51,15%), meningkat Rp1,00 triliun atau tumbuh 4,04% dibanding posisi triwulan sebelumnya. Sementara itu, posisi kredit konsumsi pada triwulan yang sama tercatat sebesar Rp24,68 triliun (48,85%), mengalami kenaikan sebesar Rp579,54 milyar atau tumbuh 2,40% dibanding posisi triwulan sebelumnya (Grafik 3.12 dan 3.13). Mengamati perkembangan kredit konsumsi, yang dari triwulan ke triwulan berikutnya dalam tahun 2005

---

<sup>9</sup> Berdasarkan laporan bank umum yang beroperasi di Jawa Barat

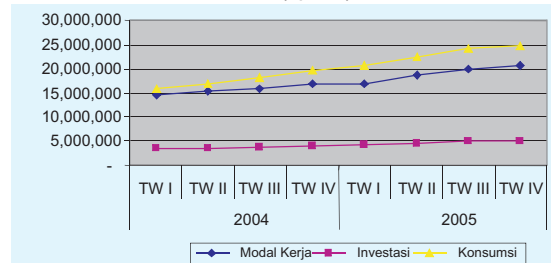
## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

**Grafik 3.12. Distribusi Kredit Bank Umum Konvensional berdasarkan Jenis Penggunaan, Posisi Triwulan IV-2005**



Sumber : LBU KBI Bandung

**Grafik 3.13. Perkembangan Kredit Bank Umum Konvensional di Jawa Barat berdasarkan Jenis Penggunaan (Rp Juta)**

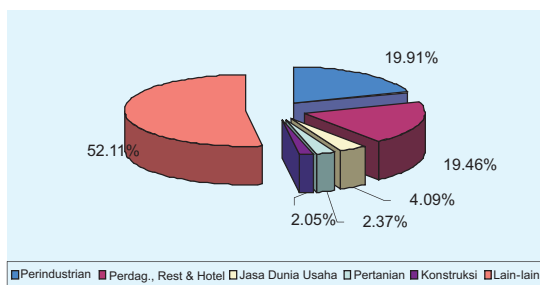


Sumber : LBU KBI Bandung

mengalami penurunan, mengindikasikan bahwa banyak sektor-sektor produktif yang telah dapat dibiayai oleh perbankan.

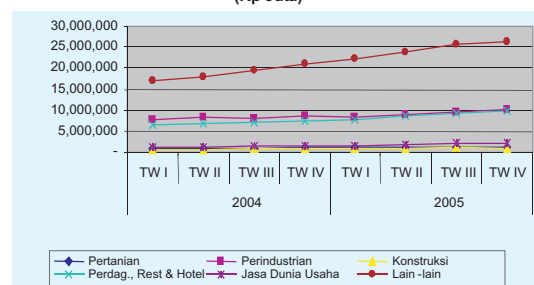
Sebagaimana pada triwulan-triwulan sebelumnya, sebagian besar kredit pada triwulan ini masih disalurkan ke sektor industri pengolahan, dengan posisi mencapai 19,91% dari total kredit. Selanjutnya, sektor ekonomi lainnya yang cukup besar penyerapan kreditnya adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) dan sektor jasa-jasa dunia usaha, yang masing-masing mencapai 19,46% dan 4,09%. Sementara itu, penyaluran kredit ke sektor PHR mengalami peningkatan terbesar, mencapai Rp627,10 milyar atau tumbuh 6,81% dibanding posisi triwulan sebelumnya (qtq). Selanjutnya, diikuti oleh penyaluran kredit ke sektor industri pengolahan dan sektor pertanian, yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar Rp356,72 milyar (3,68%) dan Rp52,92 milyar (4,62%) (Grafik 3.14 dan 3.15). Tingginya pertumbuhan kredit ke sektor PHR pada triwulan ini terkait dengan meningkatnya

**Grafik 3.14. Lima Sektor Ekonomi Penyerap Terbesar Kredit Bank Umum, Posisi Akhir TW IV-2005**



Sumber : LBU KBI Bandung

**Grafik 3.15. Perkembangan Lima Sektor Ekonomi Penyerap Kredit Bank Umum Terbesar (Rp Juta)**



Sumber : LBU KBI Bandung

kegiatan usaha perdagangan dan jasa hotel serta restoran akibat peningkatan permintaan menjelang dan pada saat hari raya Idul Fitri dan Natal/Tahun Baru yang terjadi pada triwulan ini

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Dilihat dari distribusi per kabupten/kota penyaluran kredit ke sektor industri pengolahan, sebagian besar kredit pada triwulan ini disalurkan di Kota Bandung hingga mencapai posisi 75,50% dari total kredit ke sektor industri pengolahan (Rp3,10 triliun), diikuti kemudian dengan Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, dan Kota Cimahi, dengan posisi masing-masing sebesar Rp263,74 miliar (6,42%), Rp243,74 miliar (5,93%), Rp124,89 miliar (3,04%), dan Rp55,54 miliar (1,35%). Untuk penyaluran kredit ke sektor PHR, dominasi wilayah penyalurannya meliputi Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Karawang, dengan posisi masing-masing sebesar Rp3,46 triliun (40,44%), Rp896,67 miliar (10,49%), Rp602,83 miliar (7,05%), Rp586,77 miliar (6,87%), dan Rp338,33 miliar (3,96%). Sementara itu, untuk kredit ke sektor pertanian, lima wilayah penyerap terbesar kredit ke sektor ini adalah Kota Bandung, Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Subang, dan Kota Bogor, dengan posisi masing-masing sebesar Rp135,38 miliar (18,34%), Rp95,84 miliar (12,98%), Rp71,30 miliar (9,66%), Rp55,83 miliar (7,56%), dan Rp45,78 miliar (6,20%).

Sampai dengan triwulan IV-2005, sebagian besar kredit ke sektor industri pengolahan diserap oleh sub sektor industri tekstil, sandang dan kulit, yang mencapai Rp6,04 triliun (60%). Proporsi penyaluran kredit ke sub sektor ini adalah kredit modal kerja sebesar 84,27% dan kredit investasi 15,74%.

Untuk kredit ke sektor PHR, sebagian besar kredit diserap oleh sub sektor perdagangan eceran, hingga mencapai Rp5,44 triliun (55,31%). Kredit ke sub sektor perdagangan eceran ini terutama disalurkan ke usaha perdagangan pakaian, perlengkapan rumah dan kendaraan bermotor, yang mengalami peningkatan permintaan pada triwulan ini karena adanya hari raya Idul Fitri dan Natal/Tahun Baru. Berdasarkan komposisinya, sebagian besar kredit ke sub sektor ini disalurkan untuk modal kerja, mencapai 88,66%, dan selebihnya merupakan kredit investasi (11,34%).

Menilik perkembangan kredit bank umum yang sebagian besar disalurkan ke sektor industri pengolahan dan sektor PHR, menunjukkan bahwa kredit perbankan telah berperan dalam mengembangkan sektor-sektor ekonomi dominan yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Namun demikian, sektor pertanian yang merupakan sektor yang terbesar menyerap tenaga kerja terlihat tidak terlalu menarik perhatian perbankan untuk

### BOKS 5. PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT KE SEKTOR PERTANIAN DI JAWA BARAT

Sampai dengan akhir tahun 2005, kredit yang disalurkan bank umum ke sektor pertanian di Jawa Barat menurun sebesar 10,02%, dari posisi Rp3,47 triliun pada akhir tahun 2004 menjadi Rp3,12 triliun pada akhir tahun 2005. Nilai kredit kepada sektor pertanian ini masih sangat kecil dibanding total kredit yang dikururkan oleh bank umum di Jawa Barat. Dari total kredit sebesar Rp98,32 triliun, hanya 3,18% yang disalurkan ke sektor pertanian, dan lebih rendah dibanding kredit yang disalurkan ke sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR), dengan posisi masing-masing sebesar Rp31,91 triliun dan Rp12,58 triliun. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian besar petani di Jawa Barat masih belum dapat menggunakan sumber pembiayaan dari sektor perbankan, sehingga akselerasi pengembangan sektor pertanian di Jawa Barat belum sepenuhnya dapat dilakukan. Oleh karena itu wajar, apabila kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Jawa Barat jauh lebih kecil dibanding kontribusi sektor industri pengolahan dan sektor PHR.

Masih rendahnya penyaluran kredit ke sektor pertanian terutama terkait dengan kekhawatiran bank akan tingginya potensi terjadinya default, karena sifat produksi di sektor pertanian berpola musiman, sangat tergantung kepada kondisi alam dan rentan terhadap penyakit/hama. Hal ini menyebabkan bank umum di Jawa Barat cenderung menahan diri dalam melakukan ekspansi kredit ke sektor pertanian dan menaikkan tingkat suku bunga kredit ke sektor pertanian, dengan kisaran kenaikan antara 1 sampai dengan 5%. Meskipun demikian, angka statistik ternyata menunjukkan fenomena yang berbeda. Kualitas kredit ke sektor pertanian di Jawa Barat ternyata cukup baik. Jumlah kredit bermasalah (NPL) ke sektor pertanian relatif kecil; sebagaimana ditunjukkan persentase kredit bermasalah (NPL) pada bulan Desember 2005 yang hanya sebesar 0,05% dari total kredit ke sektor pertanian di Jawa Barat (jauh lebih rendah dari persentase kredit bermasalah di sektor industri pengolahan dan sektor PHR); dan pertumbuhannya juga relatif kecil. Dilihat dari wilayah penyalurannya, kredit bank umum ke sektor pertanian di Jawa Barat lebih terkonsentrasi penyalurannya di beberapa kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, dan Kabupaten Indramayu. Daerah-daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah yang potensial dalam menyerap kredit pertanian dari bank umum, karena memiliki persentase di atas 5% (high) dari total kredit ke sektor pertanian di Jawa Barat. Sedangkan daerah lainnya, seperti Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, dan 12 daerah lainnya, dikategorikan sebagai daerah yang kurang potensial, karena persentasenya di bawah 5% (low) dari total kredit ke sektor pertanian di Jawa Barat (lihat tabel).

Apabila hal di atas dikaitkan dengan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sektor pertanian di kabupaten/kota di Jawa Barat, maka dapat diketahui peran dari kredit pertanian terhadap LPE sektor pertanian di setiap kabupaten/kota di Jawa Barat, yang dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok yaitu (lihat grafik):

- Kuadran I adalah kabupaten/kota yang mempunyai kredit pertanian dan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian rendah;
- Kuadran II adalah kabupaten/kota yang mempunyai kredit pertanian rendah, tapi laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian tinggi;
- Kuadran III adalah kabupaten/kota yang mempunyai kredit pertanian tinggi, tapi laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian rendah; dan
- Kuadran IV adalah kabupaten/kota yang mempunyai kredit pertanian dan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian tinggi.

Grafik Pemetaan Kab/Kota Berdasarkan LPE Sektor Pertanian dan Kredit Pertanian

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Dari pemetaan di atas, dapat dilihat bahwa beberapa daerah telah mendapat kucuran kredit

PDRB Sektor Pertanian

	Kuadran I	Kuadran IV
Low	Kab. Cirebon, Kab. Subang, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, dan Kota Sukabumi	Kab. Bandung dan Kab. Indramayu
	Kuadran II	Kuadran III
High	Kab. Garut, Kab. Ciamis, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Tasikmalaya, Kab. Kuningan, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Cirebon	Kab. Bekasi, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Bogor dan Kota Bandung
	Low	High Kredit Sektor Pertanian

pertanian yang memadai, namun laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian daerah tersebut tidak sejalan dengan besarnya kredit pertanian yang disalurkan. Sebaliknya, beberapa daerah sebenarnya mempunyai laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian yang tinggi, namun tidak mendapat dukungan pembiayaan yang cukup dari perbankan. Hal ini tentunya merupakan peluang bagi perbankan untuk melakukan ekspansi kredit ke sektor pertanian, terutama di daerah-daerah yang berada di kuadran II, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Selanjutnya, dilihat dari penyaluran kredit ke sub sektor di sektor pertanian, kredit pertanian di Jawa Barat lebih terkonsentrasi penyalurannya ke tiga sub sektor, yaitu sub sektor tanaman perkebunan, sub sektor tanaman pangan dan sub sektor peternakan. Sedangkan dua sub sektor lainnya, yaitu sub sektor perikanan dan sub sektor kehutanan, relatif kecil menerima kucuran kredit. Besarnya proporsi kredit ke ketiga sub sektor di sektor pertanian ini mencapai lebih dari 90% terhadap total kredit pertanian di Jawa Barat, sementara dua sub sektor lainnya hanya menerima kucuran kredit sekitar 10%. Sementara itu, dilihat dari pertumbuhan masing-masing sub sektor, sub sektor kehutanan mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 129,46%, dan diikuti oleh sub sektor peternakan yang tumbuh sebesar 44,17%. Khusus untuk sub sektor peternakan, nampaknya isu flu burung yang selama ini melanda Jawa Barat belum berdampak signifikan terhadap penyaluran kredit ke sub sektor ini.

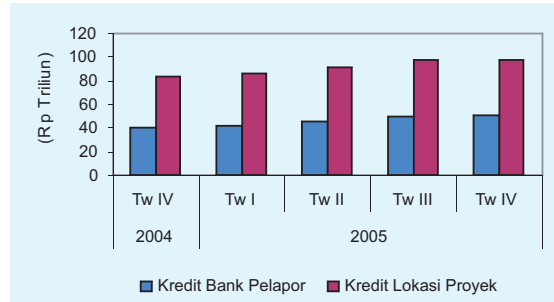
## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

menyalurkan kreditnya (lihat Boks 5. Perkembangan Penyaluran Kredit Ke Sektor Pertanian di Jawa Barat).

### 1.1.2.2. PENYALURAN KREDIT BERDASARKAN LOKASI PROYEK<sup>10</sup>

Posisi kredit yang disalurkan berdasarkan lokasi proyek di Jawa Barat pada triwulan IV-2005 mencapai Rp98,32 triliun, sedikit meningkat (0,03%) dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar Rp98,29 triliun.

Grafik : 3.16. Perkembangan Kredit Bank Pelapor dan Lokasi Proyek



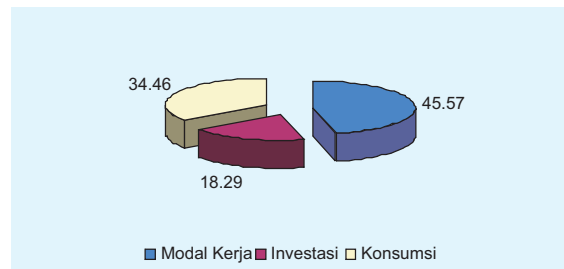
Sumber : LBU dan SEKDA KBI Bandung

Sedangkan secara tahunan (yoy) meningkat sebesar 17,89%. Jumlah kredit tersebut jauh melebihi DPK yang dihimpun oleh bank umum yang beroperasi di Jawa Barat yang hanya mencapai Rp83,54 triliun. Dari total kredit tersebut, Rp47,80 triliun (48,62%) berasal dari perbankan di luar Jawa Barat (Grafik 3.16). Letak geografis Jawa Barat yang berbatasan dengan Ibu Kota Jakarta, memungkinkan bank-bank yang berada di Jakarta untuk

menyalurkan kreditnya guna membiayai proyek-proyek yang berada di wilayah Jawa Barat antara lain Kota Depok, Kota/Kabupaten Bekasi, dan Kota/Kabupaten Bogor.

Dari tujuan penggunaannya, kredit berdasarkan lokasi proyek sebagian besar

Grafik 3.17. Pangsa Kredit Lokasi Proyek Berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: SEKDA KBI Bandung

<sup>10</sup> Kredit berdasarkan lokasi proyek adalah kredit yang disalurkan oleh bank umum baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Jawa Barat yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan kredit di Jawa

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

disalurkan untuk kegiatan produktif (investasi dan modal kerja), yakni sebesar Rp63,86 triliun (64,95%). Sementara, untuk kegiatan konsumsi sebesar Rp34,46 triliun (35,05%) (Grafik 3.17).

Sebagaimana pada triwulan sebelumnya, berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit lokasi proyek sebagian besar masih disalurkan ke sektor industri

pengolahan. Pada triwulan IV-2005, posisi kredit yang disalurkan ke sektor industri pengolahan mencapai Rp31,91 triliun (32,46%). Tingginya penyerapan kredit oleh industri pengolahan ini sejalan dengan dominasi industri tersebut dalam PDRB Jawa Barat. Selain sektor industri pengolahan, sektor lainnya yang cukup besar menyerap kredit berdasarkan lokasi proyek adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa-

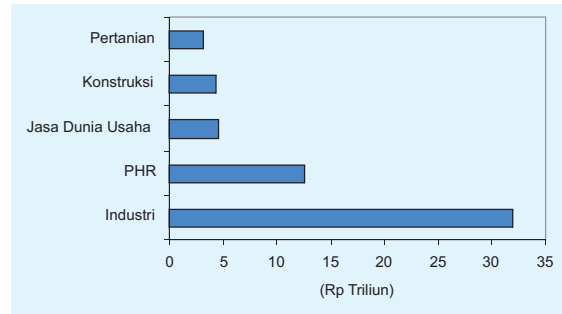
jasa dunia usaha serta sektor konstruksi, yakni masing-masing sebesar 12,81%, 4,64%, dan 4,41% (Grafik 3.18).

### 1.1.2.3. PERSETUJUAN KREDIT BARU

Meskipun kondisi makro ekonomi pada triwulan IV-2005 kurang menggembirakan, namun sejalan dengan bussiness plan perbankan tahun 2005 dalam penyaluran kredit ke berbagai sektor, komitmen

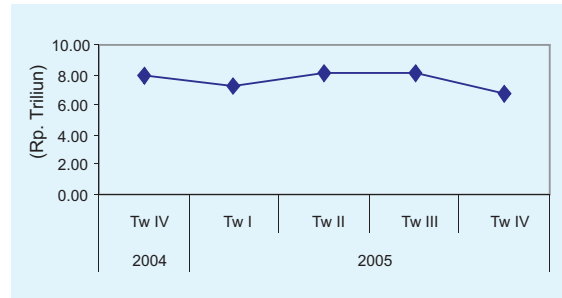
perbankan di Jawa Barat untuk menyalurkan kredit kepada dunia usaha masih cukup besar. Hal ini terlihat pada persetujuan kredit baru pada triwulan IV-2005 yang sebesar Rp6,70 triliun. Secara triwulan persetujuan tersebut mengalami penurunan sebesar 17,32%, namun secara tahunan mengalami peningkatan sebesar 10,76%, dari Rp27,26 triliun pada 2004 menjadi Rp30,20 triliun pada 2005. Besarnya persetujuan kredit baru tersebut, juga

Grafik 3.18. Sektor Dominan Penyerap Kredit Lokasi Proyek



Sumber: SEKDA KBI Bandung

Grafik 3.19. Perkembangan Persetujuan Kredit Baru



Sumber: SEKDA KBI Bandung



## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

memperlihatkan bahwa perbankan di Jawa Barat memiliki peranan yang besar dalam pembiayaan pembangunan (Grafik 3.19).

### 1.1.3. RASIO KREDIT BERMASALAH/NPLS

Berdasarkan sektor ekonomi, kredit yang memiliki rasio NPL tertinggi adalah kredit yang disalurkan ke sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air, masing-masing sebesar 12,46% dan 9,53%, sedangkan yang memiliki NPL terendah adalah kredit yang disalurkan ke sektor konstruksi dan sektor PHR, masing-masing sebesar 3,31% dan 4,51%.

Berdasarkan wilayah per kabupaten/kota, kredit bermasalah (NPL) terjadi hampir di seluruh wilayah, namun dengan rasio NPL yang berbeda. Sebagaimana yang terjadi pada

Tabel 3.1. Lima Wilayah Kabupaten/Kota dengan NPL Tertinggi

Wilayah	Nominal (Dalam Juta)		Rasio
	Total Kredit	NPL	NPL (%)
Kab. Tasikmalaya	219,008	16,816	7.68
Kota Bandung	24,986,878	1,666,017	6.67
Kota Bogor	3,448,826	177,705	5.15
Kab. Purwakarta	1,037,609	52,273	5.04
Kota Cirebon	3,246,946	160,047	4.93

Sumber : LBU KBI Bandung

triwulan sebelumnya, rasio NPL terbesar pada triwulan ini masih terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Bogor dan Kabupaten Purwakarta (Tabel 3.1).

Sementara itu, sebagaimana pula yang terjadi pada triwulan sebelumnya, rasio NPL

Tabel 3.2. Lima Wilayah Kabupaten/Kota dengan NPL Terendah

Wilayah	Nominal (Dalam Juta Rp.)		Rasio
	Total Kredit	NPLs	NPLs (%)
Kab. Majalengka	312,621	563	0.18
Kab. Kuningan	367,864	3,426	0.93
Kab. Bogor	792,023	8,014	1.01
Kab. Cianjur	890,147	12,117	1.36
Kota Cimahi	913,262	12,506	1.37

Sumber : LBU KBI Bandung

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

terendah masih terjadi di Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kota Cimahi (Tabel 3.2).

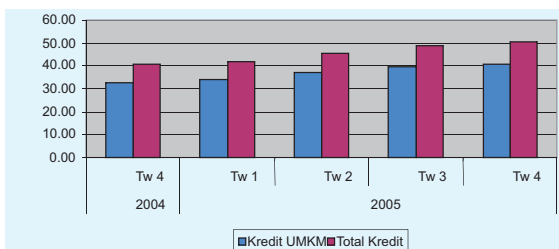
### 1.1.4. KREDIT UMKM

Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam periode laporan meningkat sebesar Rp1,12 triliun (2,83%), melambat dibanding kenaikan kredit UMKM triwulan sebelumnya, yang mencapai Rp2,66 triliun (7,19%). Penyaluran kredit UMKM oleh bank umum ini telah memainkan peranan penting dalam penyediaan dana yang dibutuhkan baik untuk permodalan maupun pengembangan UMKM. Sampai dengan akhir triwulan IV-2005, posisi kredit UMKM di Jawa Barat telah mencapai Rp40,75 triliun atau sebesar 80,66% dari posisi total kredit yang disalurkan bank umum konvensional di Jawa Barat (grafik 3.14). Perkembangan positif ini bukan hanya terjadi pada kenaikan jumlah nominal kredit, tetapi juga terjadi pada kenaikan jumlah debitur, dari 1,8 juta debitur pada akhir tahun 2004 menjadi 2,01 juta debitur pada akhir tahun 2005.

Dilihat dari skala kredit UMKM, sebagian besar kredit disalurkan ke skala mikro, dengan posisi per-Desember 2005 tercatat sebesar Rp21,58 triliun (52,94%), meningkat sebesar Rp610 miliar atau tumbuh 2,89% dibanding posisi triwulan sebelumnya (qtq). Sedangkan kredit kepada usaha kecil tercatat sebesar Rp9,28 triliun (22,78%), yang mengalami kenaikan sebesar Rp150 miliar atau tumbuh 1,63% (qtq), sementara kredit skala menengah tercatat sebesar Rp9,89 triliun (24,28%), meningkat sebesar Rp370 miliar atau tumbuh 3,84% dibanding posisi triwulan sebelumnya (qtq) (Grafik 3.20).

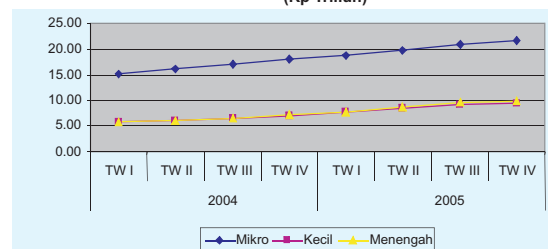
Apabila dilihat dari rasio kredit UMKM terhadap total kredit, maka dari 55 bank umum

Grafik 3.20. Perkembangan Kredit UMKM Bank Umum dan Total Kredit Bank Umum (Rp Triliun)



Sumber : LBU KBI Bandung

Grafik 3.21. Perkembangan Kredit UMKM berdasarkan Skala Usaha Yang Dibiayai (Rp Triliun)



Sumber : LBU KBI Bandung

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

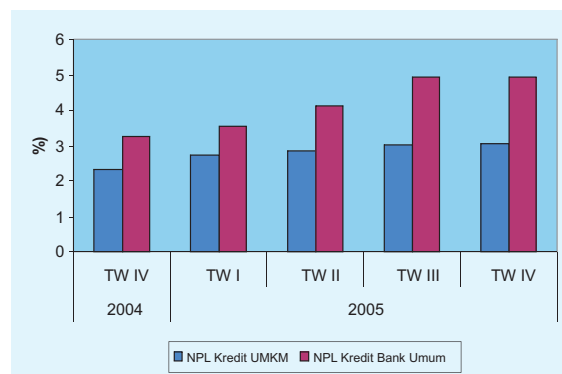
yang ada di Jawa Barat, sebanyak 45 bank (81,81%) memiliki rasio kredit UMKM terhadap total kredit diatas 50%, sedangkan sisanya sebanyak 10 bank (18,18%) memiliki rasio dibawah 50%.

Berdasarkan keragaman kredit tersebut, terlihat bahwa kinerja perbankan di Jawa Barat dalam menyalurkan kredit kepada UMKM sudah cukup baik. Namun demikian, apabila dilihat dari rasio antara jumlah pengusaha UMKM yang telah menerima kredit (2,01 juta debitur) dengan jumlah pengusaha UMKM yang ada di Jawa Barat (7,2 juta), sebesar 27,92%, dapat diasumsikan bahwa masih banyak pengusaha UMKM yang belum mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan. Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia bekerja sama dengan pihak terkait lainnya senantiasa mengupayakan berbagai langkah untuk meningkatkan akses UMKM ke sumber pembiayaan perbankan (lihat Boks 6. Upaya Pengembangan UMKM).

Sebagaimana pada triwulan sebelumnya, sebagian besar kredit UMKM pada triwulan ini masih disalurkan ke sektor PHR, dengan posisi pada triwulan IV-2005 mencapai Rp8,55 triliun (20,97%). Kredit ke sektor PHR ini, sebagian besar diserap oleh subsektor perdagangan eceran, yang pada triwulan IV-2005 mencapai Rp4,90 triliun (57,39%). Sementara itu, penyaluran kredit UMKM ke sektor industri pengolahan, penyaluran kredit UMKM terbesar kedua setelah kredit UMKM ke sektor PHR, tercatat sebesar Rp4,11 triliun (10,08%). Sebagian besar kredit ke sektor industri pengolahan ini diserap oleh subsektor industri tekstil, sandang, dan kulit, dengan posisi pada triwulan IV-2005 mencapai Rp2,02 triliun (49,21%). Untuk penyaluran kredit UMKM ke sektor-sektor lainnya, rata-rata posisinya masih dibawah Rp1 triliun, termasuk ke sektor pertanian.

Meskipun sebagian besar kredit yang disalurkan oleh bank umum konvensional di Jawa Barat adalah kredit UMKM, rasio NPL

Grafik 3.22. Perkembangan NPL Kredit Bank Umum dan NPL Kredit UMKM



Sumber : LBU KBI Bandung

### BOKS 6. UPAYA PENGEMBANGAN UMKM

Berkaitan dengan pengembangan UMKM di Jawa Barat, Bank Indonesia Bandung dari waktu ke waktu selalu mencari terobosan-terobosan yang dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah UMKM yang dapat dibiayai pengembangan usahanya oleh perbankan. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Bank Indonesia Bandung bersama-sama dengan pihak terkait pada triwulan IV-2005 ini adalah melakukan perumusan dan mendesain pola/model pembiayaan untuk mendukung rencana akselerasi pembiayaan UMKM dalam rangka pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan. Implementasi model pembiayaan yang bersifat linkage program ini direncanakan akan dilaksanakan pertama kali oleh PT Bank Jabar bermitra dengan PD BPR. Sementara itu, model yang akan diterapkan adalah pola channeling yang dimodifikasi, yang selain akan dapat memperbesar daya serap kredit, karena model ini tidak akan mempengaruhi modal dan kondisi keuangan PD BPR, juga dapat meminimalisir risiko PT Bank Jabar, karena penerapan pola ini dilengkapi dengan modifikasi persyaratan-persyaratan.

Kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Bank Indonesia Bandung bersama-sama dengan P3UKM pada triwulan ini adalah melakukan pengembangan konsep kemitraan antara usaha-usaha produksi tepung tapioka setengah jadi di Kabupaten Ciamis dengan para pengusaha pabrik krupuk udang di Kabupaten Indramayu. Pengembangan konsep kemitraan ini dilatarbelakangi permasalahan adanya monopoli pembelian tepung tapioka di Kabupaten Ciamis, yang dilakukan oleh para tengkulak yang memodali usaha-usaha produksi tepung tapioka setengah jadi, yang pada gilirannya menyebabkan rendahnya harga jual tepung tapioka setengah jadi di kabupaten tersebut. Sementara itu, para pengusaha produsen krupuk udang di Kabupaten Indramayu menghadapi permasalahan kekurangan pasokan bahan baku tepung, karena belum adanya pabrik pengolahan tepung tapioka di Kabupaten Indramayu, yang pada akhirnya menyebabkan tingginya harga beli tepung tapioka di kabupaten tersebut. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, Bank Indonesia Bandung bersama-sama dengan P3UKM mendesain suatu pola kemitraan dalam bentuk pembangunan pabrik-pabrik pengolahan tepung tapioka di Kabupaten Indramayu, yang bahan bakunya akan dipasok dari usaha-usaha produksi tepung tapioka setengah jadi di Kabupaten Ciamis. Dengan terwujudnya hal tersebut, jalur distribusi tepung tapioka akan dapat diperpendek (tidak melalui tengkulak),

gross kredit UMKM hanya sebesar 3,06%, lebih rendah dibanding rasio NPL kredit bank umum (4,91%). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kredit UMKM relatif lebih baik dibanding kualitas total kredit secara keseluruhan. (Grafik 3.22).

#### 1.1.5. KREDIT EKSPOR

Sebagai upaya mendorong peningkatan ekspor non-migas produk unggulan Jawa Barat, seperti komoditas TPT serta alat angkut, mesin dan peralatan, bank umum di Jawa Barat cukup berperan dalam membantu pembiayaan ekspor produk-produk tersebut. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan kredit ekspor sebesar Rp114,87 milyar (5,68%), dari Rp2,02

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

triliun pada triwulan III-2005 menjadi Rp2,14 triliun pada triwulan IV-2005. Kenaikan kredit ekspor ini diperkirakan akan menjadi salah satu pendorong peningkatan ekspor pada triwulan mendatang.

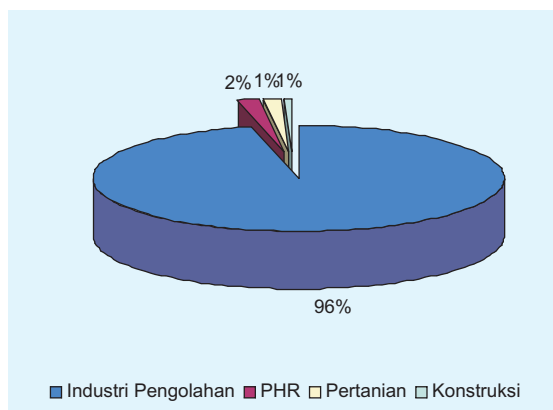
Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit ekspor masih didominasi penyerapannya oleh sektor industri pengolahan, dengan posisi pada triwulan IV-2005 mencapai Rp2,05 triliun (96,10%) (Grafik 3.23). Adapun sub sektor penyerap

kredit ekspor terbesar pada sektor ini adalah sub-sektor industri tekstil, sandang dan kulit, dengan posisi mencapai Rp1,80 triliun (84,25%). Hal ini tidak terlepas dari peranan komoditas TPT Jawa Barat, yang memang banyak diorientasikan sebagai produk ekspor. Dilihat dari wilayah penyaluran kredit, kredit ekspor ke sub-sektor industri tekstil, sandang dan kulit tersebut terkonsentrasi penyerapannya di Kota Bandung (75,85%).

Sebagaimana pada triwulan-triwulan sebelumnya, berdasarkan distribusi per kabupaten/kota, penyaluran kredit ekspor oleh bank umum konvensional di Jawa Barat masih terkonsentrasi di Kota Bandung, hingga mencapai 91,54% (Grafik 3.24). Terkonsentrasinya penyaluran kredit ekspor ke Kota Bandung ini disebabkan karena 84,25% dari total kredit ekspor yang disalurkan merupakan kredit ke sektor tekstil, sandang dan pakaian, dimana sentra produksi dari industri-industri sektor tersebut banyak yang berlokasi di Bandung dan mengajukan kredit ke bank umum konvensional yang beroperasi di Kota Bandung.

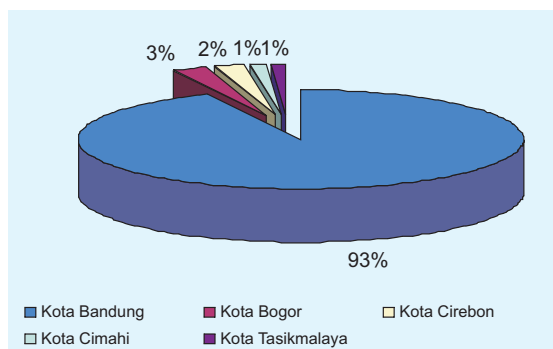
Sementara itu, dilihat dari distribusi rasio NPL per kabupaten/kota, nilai nominal NPL kredit ekspor terbesar terjadi di Kota Bandung. Hal ini sejalan dengan tingginya penyaluran

Grafik 3.23. Sektor Ekonomi dengan Pangsa Terbesar dalam Penyerapan Kredit Ekspor



Sumber : LBU KBI Bandung

Grafik 3.24. Pangsa Posisi Penyaluran Kredit Ekspor per Kabupaten/Kota



Sumber : LBU KBI Bandung

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

kredit ekspor di kota tersebut. Rasio NPL kredit ekspor di kota Bandung pada triwulan IV-2005 tercatat sebesar 15,46%, meningkat dibanding triwulan sebelumnya (14,10%), yang menunjukkan relatif masih tingginya resiko penyaluran kredit ekspor di kota tersebut.

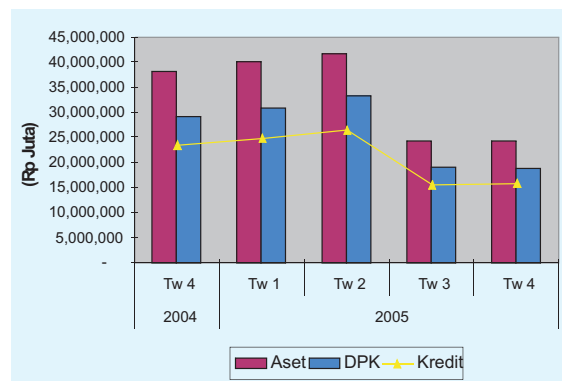
### 1.2. KINERJABANK UMUM YANG BERKANTOR PUSAT DI BANDUNG

Kinerja tujuh bank umum yang berkantor pusat di Bandung pada triwulan IV 2005 menunjukkan perkembangan yang positif dan relatif sejalan dengan perkembangan bank umum di Jawa Barat. Hal ini terlihat dari membaiknya beberapa indikator diantaranya adalah meningkatnya total aset, peran intermediasi perbankan yang tercermin dari LDR, tingkat kesehatan dan membaiknya kualitas kredit yang disalurkan serta meningkatnya pendapatan

bunga bersih/net interest margin (NIM). Namun, dilihat dari sisi penghimpunan dana masyarakat, tujuh bank umum tersebut mengalami sedikit penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Total aset tujuh bank umum yang berkantor pusat di Bandung pada triwulan IV-2005 mencapai Rp24,39 triliun, atau mengalami sedikit kenaikan yaitu sebesar 0,71% dibandingkan triwulan sebelumnya (qtq). Kenaikan ini didorong antara lain oleh

Grafik 3.25. Perkembangan Kinerja Keuangan Bank Umum yang Berkantor Pusat di Bandung



Sumber : LBU KBI Bandung

adanya peningkatan penyaluran kredit pada triwulan berjalan yang tumbuh sebesar 1,02% (qtq) (Grafik 3.25)

Penyaluran kredit oleh tujuh bank umum yang berkantor pusat di Bandung adalah sebesar Rp15,78 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 1,02% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp15,62 triliun. Dilihat dari jenis penggunaannya, sebagian besar kredit yang disalurkan masih terkonsentrasi untuk tujuan konsumsi. Kredit yang diberikan kepada usaha produktif adalah sebesar 17,13% dari total kredit (terdiri dari kredit modal kerja sebesar 12,44% dan kredit investasi sebesar 4,69%), sedangkan sisanya adalah kredit yang diberikan untuk tujuan konsumsi.

DPK yang berhasil dihimpun mencapai sebesar Rp18,78 triliun, atau mengalami sedikit penurunan sebesar 1,21% dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari total DPK yang

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

dihimpun, sebagian besar merupakan jenis simpanan deposito yaitu sebesar Rp10,13 triliun, kemudian diikuti oleh jenis simpanan giro dan tabungan yaitu masing-masing sebesar Rp6,03 triliun dan Rp2,62 triliun.

Dari sisi peran intermediasi, tujuh bank berkantor pusat di Bandung menunjukkan peningkatan peran intermediasi yang tercermin dari peningkatan LDR sebesar 83,99%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 82,13%.

Peningkatan penyaluran kredit diatas dan beberapa fenomena ekonomi seperti tingginya laju inflasi selama triwulan IV 2005, nampaknya belum berpengaruh terhadap kualitas kredit yang disalurkan oleh tujuh bank berkantor pusat di Bandung. Bahkan, kualitas kredit cenderung meningkat. Nilai NPL pada triwulan ini 0,82%, lebih baik dibandingkan dengan nilai NPL pada triwulan sebelumnya yaitu sebesar 1,02%.

Selanjutnya, dari sisi profitabilitas (yang tercermin dari NIM), tujuh bank umum yang berkantor pusat di Bandung tetap mampu menghasilkan keuntungan walaupun mendapat persaingan yang cukup ketat dari bank umum yang berkantor pusat di luar Bandung dan lembaga keuangan non bank. NIM tujuh bank umum yang berkantor pusat di Bandung mengalami peningkatan dari 7,24% menjadi 9,99% pada triwulan IV 2005.

Meskipun demikian, apabila dilihat dari tingkat efisiensi usaha dan rasio ROA, kondisi ekonomi yang terjadi selama triwulan IV 2005 sedikit banyak mempengaruhi tingkat efisiensi usaha dan pencapaian rasio ROA dari tujuh bank yang berkantor pusat di Bandung. Tingkat efisiensi usaha tujuh bank yang berkantor pusat di Bandung sedikit mengalami penurunan yang tercermin dari meningkatnya rasio BOPO dari 75,51% menjadi 78,71%. Sementara itu, rasio ROA mengalami penurunan dari 2,30% menjadi sebesar 2,14%.

Penurunan tingkat efisiensi usaha dan rasio ROA tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap struktur permodalan tujuh bank umum yang berkantor pusat di Bandung. Hal ini terlihat dari nilai CAR yang berada pada kisaran 10,72%-32,94%, masih diatas ketentuan nilai CAR (sebesar 8%) yang diwajibkan oleh Bank Indonesia dan bahkan nilai CAR ini masih lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu pada kisaran 10,35%-30,33%.

### 1.3. BANK UMUM SYARIAH

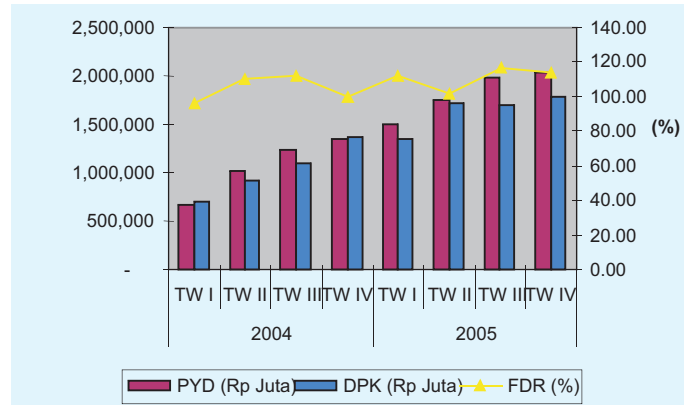
Selama triwulan IV 2005, perbankan syariah di Jawa Barat masih menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana terlihat pada triwulan sebelumnya. Namun

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

demikian, laju pertumbuhan indikator kinerja perbankan syariah cenderung melambat. Hal ini terlihat dari relatif rendahnya pertumbuhan beberapa indikator utama perbankan syariah seperti total aset, pembiayaan yang diberikan (PYD), dan DPK. Hal ini mengakibatkan nilai financing to deposit ratio (FDR) perbankan syariah mengalami penurunan. Walaupun demikian, kualitas pembiayaan yang diberikan mengalami perbaikan yang tercermin dari menurunnya nilai non-performing financing (NPF).

Total aset perbankan syariah di Jawa Barat pada triwulan ini adalah sebesar Rp2,70

Grafik 3.26. Perkembangan Kegiatan Intermediasi Bank Umum Syariah di Jawa Barat (Rp Juta)



Sumber: LBU KBI Bandung

triliun, atau tumbuh sebesar 0,89% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu sebesar Rp2,67 triliun.

Dari sisi pembiayaan yang diberikan (PYD), perbankan syariah di Jawa Barat mencatat nilai sebesar Rp2,03 triliun, atau tumbuh 2,34% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar Rp1,98 triliun. Sedangkan dari sisi DPK yang dihimpun, perbankan syariah di Jawa Barat mencatat nilai sebesar Rp1,78 triliun, atau tumbuh sebesar 4,84% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Rendahnya pertumbuhan PYD dan DPK menyebabkan nilai FDR mengalami sedikit penurunan. Nilai FDR pada triwulan ini adalah sebesar 113,74%, atau turun sebesar 2,38% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 116,51%. Walaupun demikian, nilai FDR perbankan syariah ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai LDR dari bank umum di Jawa Barat.

Dilihat dari kualitas PYD, perbankan syariah di Jawa Barat mengalami perbaikan



## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

kualitas PYD yang tercermin dari menurunnya nilai NPF. Pada triwulan IV 2005, nilai NPF adalah sebesar 3,39% lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 3,58% (Grafik 3.26).

### 1.4. BANK ASING DAN CAMPURAN

Kinerja kelompok Bank Asing dan Bank Campuran (BAC) pada triwulan IV 2005 menunjukkan perkembangan yang positif, walaupun pangsaanya masih relatif kecil bila dibandingkan dengan bank umum di Jawa Barat. Perkembangan ini terlihat dari membaiknya beberapa indikator seperti meningkatnya total aset, kredit yang disalurkan, DPK, dan LDR.

Total aset BAC pada triwulan IV-2005 mencapai Rp4,59 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar 9,14% dibandingkan triwulan sebelumnya (qtq) sebesar Rp4,211 triliun. Kenaikan ini didorong antara lain oleh adanya peningkatan penyaluran kredit pada triwulan berjalan yang tumbuh sebesar 7,74% (qtq).

Sementara itu, peran intermediasi BAC yang dicerminkan dari nilai LDR, juga menunjukkan peningkatan. Nilai LDR kelompok BAC pada triwulan IV 2005 adalah sebesar 46,61%, atau tumbuh sebesar 2,46% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 44,13%.

Penyaluran kredit BAC adalah sebesar Rp1,85 triliun atau mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp1,72 triliun. Dilihat dari jenis penggunaannya, sebagian besar kredit tersebut disalurkan untuk tujuan modal kerja dengan nilai sebesar Rp1,45 triliun, sedangkan untuk investasi dan konsumsi masing-masing sebesar Rp0,16 triliun dan Rp0,24 triliun.

Dilihat dari penghimpunan DPK, BAC mencatat nilai sebesar Rp3,98 triliun, atau tumbuh sebesar 2,03% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp3,89 triliun. Pertumbuhan ini lebih ditopang oleh adanya pertumbuhan pada jenis simpanan deposito yang tumbuh sebesar 8,11%, sedangkan untuk jenis simpanan tabungan dan giro masing-masing mengalami penurunan sebesar 17,01% dan 15,44%. Nilai dari jenis simpanan

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

deposito pada kelompok BAC sangat dominan yaitu dengan proporsi sebesar 79,81% atau dengan nilai sebesar Rp3,17 triliun. Sementara nilai untuk jenis simpanan giro dan tabungan masing-masing sebesar 0,55 triliun dan 0,25 triliun.

### 1.5. BANK PERKREDITAN RAKYAT

Pada triwulan IV-2005, jumlah BPR yang beroperasi di Jawa Barat tercatat sebanyak 291 BPR<sup>11</sup>, terdiri dari 278 BPR konvensional dan 13 BPR Syariah. Lokasi kantor BPR tersebut tersebar di wilayah Kantor Bank Indonesia (KBI) Bandung sebanyak 177 BPR, KBI Cirebon 67 BPR dan KBI Tasikmalaya 47 BPR, dengan total aset sampai dengan triwulan IV-2005 mencapai Rp3,09 triliun, DPK sebesar Rp2,24 triliun dan kredit yang disalurkan Rp2,16 triliun

Berdasarkan wilayah kerja, total aset BPR di wilayah kerja KBI Bandung tercatat sebesar Rp2,61 triliun, DPK yang dihimpun Rp1,92 triliun, dan kredit yang disalurkan Rp1,80 triliun dengan NPL sebesar 9,86%. Di wilayah kerja KBI Tasikmalaya, total aset tercatat sebesar Rp191 miliar, DPK Rp136 miliar, dan kredit yang disalurkan Rp156 miliar. Sementara di KBI Cirebon total aset tercatat sebesar Rp284 miliar, DPK Rp186 miliar, dan kredit yang disalurkan Rp194 miliar.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme para bankir dalam mengelola BPR, yang pada gilirannya akan memperkuat kapasitas dan kelembagaan BPR, KBI Bandung sejak April 2005 sampai dengan triwulan IV-2005 telah melakukan pelatihan sertifikasi profesional direktur BPR untuk tujuh angkatan, termasuk pelaksanaan ujian bagi ke-tujuh angkatan tersebut (lihat Boks 7. Program Sertifikasi Profesional Direktur Bank Perkreditan Rakyat (BPR)). Selain itu, untuk mendukung pengembangan daya saing BPR,

---

<sup>11</sup>Tidak termasuk wilayah Depok, Bogor dan Bekasi

### BOKS 7. PROGRAM SERTIFIKASI PROFESIONAL DIREKTUR BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

Program sertifikasi profesional direktur bank perkreditan rakyat (BPR) merupakan program kerjasama antara Bank Indonesia dengan Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) ProFI, yang bertujuan untuk menciptakan industri BPR yang sehat dan kuat. Melalui program ini, kompetensi dan profesionalisme para bankir dalam mengelola BPR akan semakin meningkat, dan pada gilirannya akan memperkuat kapasitas dan kelembagaan BPR.

Program sertifikasi profesional ini merupakan salah satu kebijakan yang telah disusun dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API), di mana kebijakan tersebut sejalan dengan upaya untuk menciptakan landasan kuat guna mendukung proses percepatan penyehatan perbankan nasional yang di dalamnya termasuk BPR. Dengan adanya program ini, akan didapat manfaat yang optimal, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Terdapat empat modul utama dalam program sertifikasi tersebut, yakni: Ketrampilan Manajemen BPR, Keahlian Manajemen BPR, Ketrampilan Manajemen Operasional, dan Keahlian Manajemen Strategik. Dua modul pertama merupakan modul wajib bagi calon direktur, sedangkan selebihnya merupakan program wajib bagi direktur BPR. Modul-modul tersebut antara lain mencakup : manajemen akuntansi, manajemen perkreditan, aspek hukum perkreditan, manajemen aset-liabilitas (ALMA), penilaian potensi pasar dan pemasaran produk/jasa, peraturan dan pengawasan ekstern, pengendalian dan pemeriksaan internal, manajemen sumber daya manusia, dan peran pengembangan BPR.

Program pelatihan sertifikasi tersebut wajib diikuti oleh direktur dan calon direktur BPR. Ketentuan sertifikasi ini merupakan ketentuan terkait dengan Kelembagaan dan Ketentuan Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) BPR.

Ditargetkan pada 31 Desember 2006, 1 direktur dalam setiap BPR telah memiliki sertifikat, sedang pada tahun 31 Desember 2008 ditargetkan seluruh direktur BPR sudah mendapatkan sertifikat, namun apabila pada waktu telah ditentukan tidak terpenuhi maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri. Khusus untuk BPR baru yang mengajukan permohonan pendirian, calon direktur harus memiliki sertifikat.

khususnya melalui peningkatan infrastruktur BPR, KBI Bandung bersama dengan Perhimpunan BPR Indonesia (Perbarindo) Jawa Barat telah melakukan pembahasan mengenai rencana pembentukan lembaga Apex BPR (lembaga pelindung BPR) di Jawa Barat, yang salah satu fungsinya adalah sebagai Lembaga Dana Penyangga BPR (pooling of funds) untuk membantu BPR mengatasi kesulitan likuiditas karena mismatch.

## 2. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

Selama triwulan IV-2005, aliran uang kartal di wilayah kerja KBI Bandung menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Pada bulan Oktober 2005, saat terdapat kenaikan permintaan masyarakat akan barang-barang untuk keperluan lebaran, aliran uang keluar (outflow) dari Bank Indonesia lebih besar daripada aliran uang masuk (inflow). Begitu pula halnya dengan

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

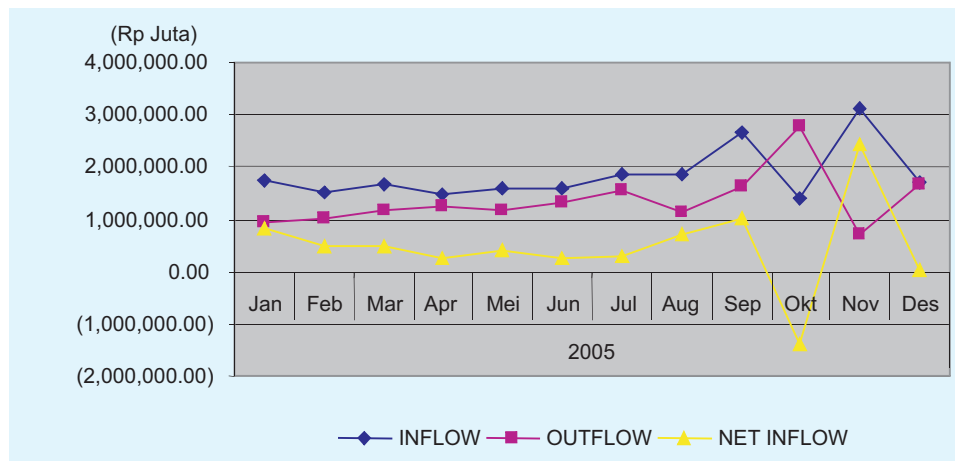
yang terjadi pada bulan Desember 2005, outflow mengalami lagi kenaikan yang relatif tinggi karena hari raya Natal dan Tahun Baru, meskipun secara keseluruhan posisinya masih net inflow (inflow lebih besar daripada outflow).

Sementara itu, transaksi pembayaran antarbank yang diselesaikan melalui sistem pembayaran non-tunai pada triwulan ini, mengalami penurunan, seiring dengan menurunnya aktivitas perekonomian yang dilakukan dunia usaha dan masyarakat pada triwulan IV-2005, yang antara lain disebabkan oleh kenaikan biaya produksi, akibat kenaikan harga BBM, tingginya suku bunga dan penurunan daya beli.

### 2.1. PENGEDARAN UANG KARTAL

Sebagaimana yang terjadi pada triwulan-triwulan sebelumnya, pada triwulan IV-2005 kegiatan pengedaran uang kartal melalui KBI Bandung masih menunjukkan posisi net inflow (Grafik 3.27). Nilai nominal uang kartal yang masuk ke KBI Bandung (inflow) pada triwulan ini

Grafik 3.27 . Perkembangan Inflow dan Outflow Uang Kartal di Wilker KBI Bandung



Sumber: KBI Bandung

tercatat Rp6,23 triliun, turun 2,33% dibandingkan inflow triwulan sebelumnya (Rp6,38 triliun). Sementara itu, nilai nominal uang kartal yang keluar dari KBI Bandung (outflow) meningkat dari Rp4,35 triliun pada triwulan III-2005 menjadi Rp5,18 triliun pada triwulan IV-2005, tumbuh signifikan 18,12%. Namun demikian, secara keseluruhan posisi pengedaran uang

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

kartal KBI Bandung pada triwulan IV-2005 masih mengalami net inflow sebesar Rp1,06 triliun.

Tabel 3.3. Perkembangan Outflow Uang Kertas dan Uang Logam Di Wilker KBI Bandung

Jenis Pecahan	Tw III-2005		Tw IV-2005		Pertumbuhan (%)	
	Nominal (Rp Juta)	Bilyet/ Keping	Nominal (Rp Juta)	Bilyet/ Keping	Nominal (Rp Juta)	Bilyet/ Keping
Uang Kertas						
100,000	1,986,260.00	19.86	2,331,619.80	23.32	17.39	17.39
50,000	2,097,790.00	41.96	2,530,798.75	50.62	20.64	20.64
20,000	100,970.00	5.05	120,443.30	6.02	19.29	19.29
10,000	23,370.00	2.34	57,912.74	5.79	147.81	147.81
5,000	115,040.00	23.01	104,919.83	20.98	-8.80	-8.80
1,000	21,700.00	21.70	25,514.71	25.51	17.58	17.58
<b>Total</b>	<b>4,345,130.00</b>	<b>113.91</b>	<b>5,171,209.13</b>	<b>132.24</b>	<b>19.01</b>	<b>16.09</b>
Uang Logam						
1,000	230.00	0.23	500.00	0.50	117.39	117.39
500	4,300.00	8.60	3,039.52	6.08	-29.31	-29.31
200	360.00	1.80	360.90	1.80	0.25	0.25
100	110.00	1.10	289.03	2.89	162.75	162.75
50	40.00	0.80	46.50	0.93	16.25	16.25
25	0.02	0.00	0.51	0.02	2450.00	2450.00
<b>Total</b>	<b>5,040.02</b>	<b>12.53</b>	<b>4,236.46</b>	<b>12.22</b>	<b>-15.94</b>	<b>-2.45</b>

Sumber: KBI Bandung

Selama triwulan IV-2005, uang kertas yang keluar (outflow) sebanyak 132,24 juta bilyet (Rp5,17 triliun) dan uang logam sebanyak 12,22 juta keping (Rp4,24 miliar). Dibandingkan dengan triwulan III-2005, secara nominal, uang kertas yang keluar (outflow) tumbuh 19,01%, sedangkan uang logam menurun 15,94%.

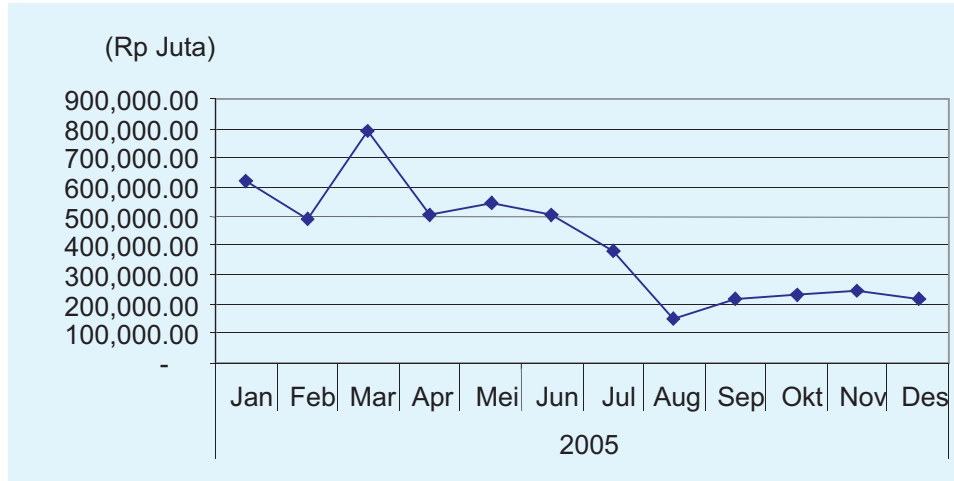
Berdasarkan nilai pecahannya, dibandingkan dengan triwulan III-2005, permintaan uang kertas dan logam yang mengalami peningkatan relatif tinggi (di atas 100%) adalah pecahan uang kertas Rp10.000,- dan uang logam Rp100,- serta Rp1.000,- (Tabel 3.3).

### 2.2. PENYEDIAAN UANG KARTAL LAYAK EDAR

Dalam rangka memelihara kualitas uang yang diedarkan di masyarakat (clean money

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Grafik. 3.2 8. Perkembang an PTTB di KBI Bandung



Sumber: KBI Bandung

policy), KBI Bandung secara berkala melakukan pemusnahan atau kegiatan pemberian tanda tidak berharga (PTTB) terhadap uang yang sudah tidak layak edar (lusuh/rusak). Pada triwulan IV-2005, jumlah uang kartal yang tidak layak edar dan telah dimusnahkan di KBI Bandung sebesar Rp0,69 triliun, menurun 7,09% dibandingkan jumlah PTTB triwulan III-2005 sebesar Rp0,75 triliun. Sementara itu, rasio PTTB terhadap inflow pada triwulan IV-2005 sebesar 11,13%, menurun 4,88% dibandingkan rasio triwulan III-2005 sebesar 11,70%. Hal ini mengindikasikan semakin pahamnya masyarakat bagaimana memperlakukan uang dengan baik.

### 2.3. PENUKARAN UANG PECAHAN KECIL

Sebagai suatu upaya untuk menjamin tersedianya uang dalam jumlah nominal yang cukup dan jenis pecahan yang sesuai, KBI Bandung menyediakan loket penukaran uang dan bekerja sama dengan Perusahaan Penukaran Uang Pecahan Kecil (PPUPK) dalam menyalurkan uang pecahan kecil kepada masyarakat luas. Daerah operasional PPUPK tersebut meliputi wilayah Sukabumi, Subang, Garut, Sumedang, Cianjur, dan Purwakarta. Dengan tersedianya fasilitas penukaran tersebut, masyarakat dapat menukarkan uangnya dengan uang pecahan kecil yang diinginkan tanpa dipungut biaya.

Pada triwulan IV-2005, nilai uang yang telah ditukarkan oleh PPUPK kepada masyarakat sebesar Rp31 miliar. Berdasarkan jenis pecahannya, uang kertas yang paling banyak ditukarkan adalah pecahan Rp5.000,- mencapai nilai Rp26,04 miliar (83,71%),

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

sementara untuk uang logam adalah pecahan Rp500,- senilai Rp0,51 miliar (1,65%).

### 2.4. LALU LINTAS PEMBAYARAN NON TUNAI

Tabel 3.4. Perkembangan Penyelesaian Transaksi Pembayaran Melalui Kliring Lokal dan RTGS di Jawa Barat Triwulan IV-2005 (Rp Triliun)

Setelmen	2004	2005		Pertumbuhan	
	Tw. IV	Tw. III	Tw. IV	qtq	yoy
Kliring Lokal					
Nominal	29.4	34.81	21.99	-36.83	-25.20
Volume	1,894,795	2,240,722	1,173,851	-47.61	-38.05
RTGS					
Nominal	28.75	34.89	34.52	-1.06	20.07
Volume	29,361	30,924	27,545	-10.93	5.32
Total					
Nominal	58.15	69.7	56.51	-18.92	-2.82
Volume	1,924,156	2,271,646	1,201,396	-47.11	-37.56

Sumber: KBI Bandung

Transaksi pembayaran non-tunai yang diselesaikan melalui kliring pada triwulan IV-2005 mengalami penurunan, baik secara nominal maupun volume dibandingkan dengan triwulan III-2005. Begitu pula dengan transaksi pembayaran yang diselesaikan melalui sistem RTGS, mengalami pula penurunan, meskipun secara tahunan mengalami kenaikan. Penurunan transaksi melalui kliring dan RTGS tersebut seiring dengan menurunnya aktivitas perekonomian yang dilakukan dunia usaha dan masyarakat pada triwulan IV-2005, yang antara lain disebabkan oleh kenaikan biaya produksi, akibat kenaikan harga BBM, tingginya suku bunga dan penurunan daya beli.

### 2.5. UANG PALSU

Jumlah temuan uang rupiah palsu pada triwulan IV-2005 meningkat dibandingkan dengan triwulan III-2005. Berdasarkan jenis pecahan, uang kertas Rp50.000,- emisi tahun 1999 merupakan jenis uang terbanyak yang dipalsukan, yakni 671 lembar atau 55,92% dari total temuan uang palsu. Untuk mengurangi peredaran uang palsu tersebut, KBI Bandung terus melakukan berbagai upaya, antara lain dengan melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada kalangan perbankan, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum; serta

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

menyediakan sarana informasi kepada masyarakat dalam bentuk hotline service.

### 2.6. PEMBELIAN/PENJUALAN UANG KERTAS ASING OLEH PEDAGANG VALUTA ASING

Pada triwulan IV-2005, berdasarkan data dari 14 Pedagang Valuta Asing (PVA) di wilayah Bandung dan sekitarnya, nilai pembelian Uang Kertas Asing (UKA) dan Traveller's Cheque (TC) sebesar USD 104 juta, menurun 16,13% dibandingkan pembelian pada triwulan III-2005 (sebesar USD124 juta). Sementara itu, penjualan UKA dan TC sebesar USD113 juta, juga menurun 8,87% dibandingkan penjualan pada triwulan III-2005 (sebesar USD124 juta). Penurunan yang signifikan dari pembelian dan penjualan UKA dan TC tersebut salah satunya disebabkan oleh beralihnya minat masyarakat dalam berinvestasi, di mana mereka lebih tertarik untuk menabung dalam denominasi rupiah terkait dengan tingginya suku bunga belakangan ini



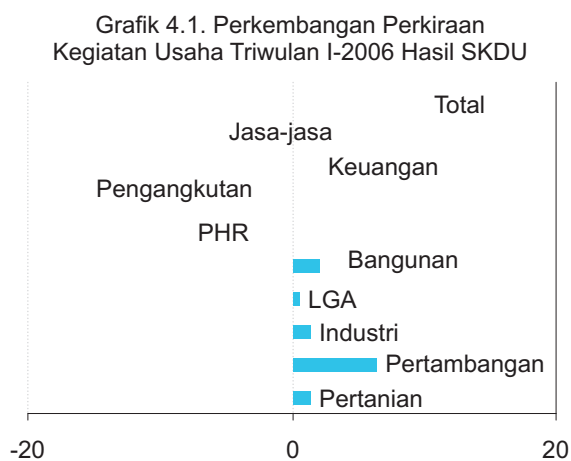
# BAB 4

## PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

### 1. PROSPEK EKONOMI MAKRO

Pada triwulan I-2006, perekonomian Jawa Barat diperkirakan tumbuh positif, terutama didorong oleh berlangsungnya masa panen raya pada sektor pertanian. Sektor pertanian yang memiliki pangsa sekitar 13% terhadap PDRB diperkirakan akan mengalami pertumbuhan positif dengan berlangsungnya masa panen raya produk tabama, yaitu padi. Kegiatan yang berlangsung dalam rangka masa panen ini akan mempengaruhi kegiatan di sektor perdagangan dan sektor pengangkutan.

Meskipun demikian, secara umum kegiatan usaha di sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) dan sektor pengangkutan justru akan mengalami penurunan karena



kembalinya permintaan di kedua sektor ini pada kondisi normal setelah pada triwulan IV-2005 mengalami peningkatan sehubungan dengan berlangsungnya perayaan hari besar keagamaan (hari raya Idul Fitri, Natal dan tahu baru). Peningkatan kegiatan yang terjadi di sektor PHR dan sektor pengangkutan terkait dengan masa panen raya tidak terjadi secara langsung karena produk tabama tersebut masih memerlukan pengolahan lebih lanjut untuk siap diperdagangkan di pasar.

Hal tersebut sejalan dengan hasil SKDU yang menyatakan bahwa hampir seluruh sektor diperkirakan akan mengalami pertumbuhan positif. Hanya ada dua sektor yang diperkirakan mengalami pertumbuhan negatif, yaitu sektor pengangkutan dan sektor PHR (Grafik 4.1).

Hasil SKDU menunjukkan bahwa sektor industri, sektor bangunan dan sektor

## PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

keuangan akan mengalami pertumbuhan positif terutama disebabkan oleh meningkatnya permintaan, yang diindikasikan oleh adanya peningkatan pesanan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Meskipun demikian, pertumbuhan di sektor industri dan bangunan diperkirakan tidak terlalu tinggi mengingat awal tahun biasanya merupakan masa persiapan penyusunan target dan strategi kebijakan perusahaan. Terlebih lagi kondisi dunia usaha dan daya beli masyarakat secara relatif belum pulih seperti sediakala.

Berkaitan dengan kenaikan harga BBM pada awal triwulan IV-2005, sebagian besar pelaku usaha menyatakan akan meningkatkan harga jual produknya pada triwulan I-2006 karena adanya kenaikan harga bahan baku dan biaya operasional. Hal ini akan mengakibatkan beban konsumen semakin meningkat mengingat tingginya inflasi IHK yang sudah terjadi.

Di sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan I-2006 diperkirakan masih didukung konsumsi dan investasi. Investasi, baik dalam bentuk penambahan barang modal maupun penggantian mesin, diperkirakan masih terus berlangsung didorong oleh tingginya pertumbuhan kredit investasi yang disalurkan dan tingginya persetujuan nilai investasi PMA/PMDN pada tahun 2005 yang lalu. Sementara konsumsi masih dominan karena adanya perbaikan pendapatan masyarakat dampak dari penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai dan penyesuaian gaji karyawan dan Upah Minimum Regional.

Di sisi keuangan pemerintah, pengeluaran pemerintah pada triwulan I-2006 diperkirakan mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan IV-2005 terkait dengan belum cairnya dana anggaran untuk proyek-proyek. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah di triwulan I-2006 sebagian besar merupakan pengeluaran rutin untuk administrasi pegawai.

Di sisi tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang terserap diperkirakan dapat mengalami sedikit penurunan. Daya serap tenaga kerja di beberapa industri pada sektor industri pengolahan diperkirakan mengalami penurunan, antara lain di industri TPT, industri kertas dan barang cetakan, serta industri barang kayu. Daya serap tenaga kerja di sektor bangunan/konstruksi, yang pada triwulan-triwulan sebelumnya mengalami peningkatan,

pada triwulan mendatang diperkirakan akan mulai mendatar. Peningkatan daya serap tenaga kerja diperkirakan juga terjadi pada subsektor tanaman bahan makanan dan subsektor tabama yang dipengaruhi oleh faktor musiman (masa panen).

2. PERKIRAAN INFLASI

Laju inflasi gabungan tujuh kota di Jawa Barat pada triwulan I-2006 diperkirakan sebesar 2-3% (qtq), lebih rendah dibandingkan inflasi pada triwulan IV-2005. Perlambatan disebabkan oleh mulai meredanya dampak kenaikan harga BBM tahun 2005 terhadap kenaikan harga barang dan jasa.

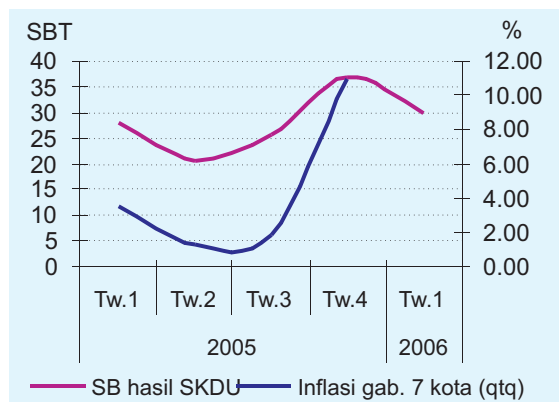
Faktor determinan inflasi pada triwulan I diperkirakan berasal dari volatile foods yakni bahan makanan. Harga bahan makanan khususnya beras terus mengalami kenaikan sejak pertengahan Desember 2006. Namun demikian, tekanan inflasi terhadap harga beras akan berkurang seiring panen raya pada bulan Februari dan Maret 2006 dan adanya impor beras seperti yang telah direncanakan pemerintah.

Dari sisi permintaan, tekanan diperkirakan berasal dari kenaikan gaji PNS/TNI/polri rata-rata 15% serta penyaluran dana BLT (bantuan langsung tunai) tahap II kepada masyarakat miskin, yang rencananya akan direalisasikan pemerintah pada triwulan I-2006. Namun, peningkatan pendapatan masyarakat tersebut, diperkirakan tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap inflasi, mengingat daya beli sebagian besar masyarakat telah mengalami penurunan sejak tahun sebelumnya.

Perkiraan inflasi pada triwulan I-2006 tersebut di atas didukung oleh hasil beberapa survei yang dilaksanakan KBI Bandung, yaitu SKDU, SK, dan SPE, di bawah ini.

Hasil SKDU mengindikasikan ekspektasi pengusaha bahwa harga-harga masih akan meningkat meski tidak akan setinggi triwulan IV-2005. Hal tersebut tercermin dari penurunan angka saldo bersih tertimbang (SBT) dari 36,96 menjadi 29,79 (Grafik 4.2). Dari sembilan sektor ekonomi

Grafik 4.2. Perkembangan Harga Berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha dan Inflasi Aktual Tahunan di Jawa Barat



Sumber: Hasil SKDU KBI Bandung, BPS Provinsi Jawa Barat, diolah

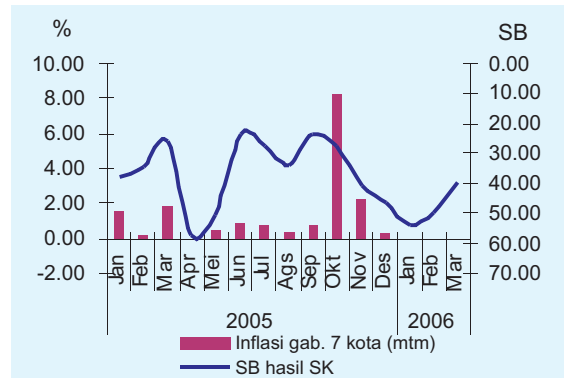
## PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

yang disurvei, semua sektor diperkirakan mengalami peningkatan harga jual. Penyumbang terbesar kenaikan harga berasal dari sektor pertanian, sektor pertambangan, dan sektor industri pengolahan.

Sebagian besar responden SK memperkirakan bahwa masih akan terjadi kenaikan harga barang/jasa pada triwulan I-2006 (Grafik 4.3). Hal ini tercermin dari nilai saldo bersih untuk yang masih dibawah 100, yang berarti bahwa responden masih pesimis terhadap kondisi harga barang dan jasa secara umum pada triwulan I-2006. Namun, jumlah responden yang memperkirakan harga akan naik pada periode Januari lebih sedikit dibandingkan bulan Februari dan Maret 2006.

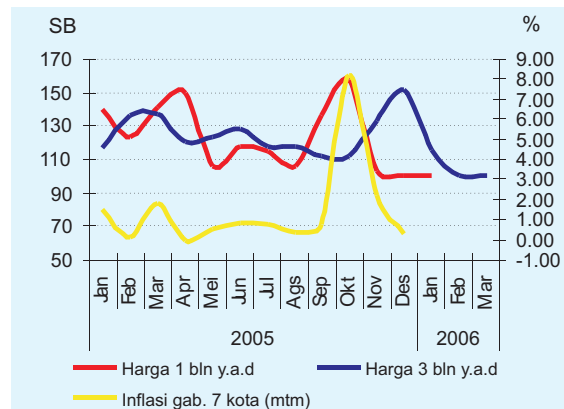
Seperti halnya SKDU da SK, SPE juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda.

Grafik 4.3. Perkembangan Ekspektasi Konsumen terhadap Harga



Sumber: Survei Konsumen-BI Bandung, BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Grafik 4.4. Perkembangan Ekspektasi Pedagang Eceran terhadap Harga dan Perkembangan Inflasi Bulanan Aktual Gabungan Tujuh Kota Di Jawa Barat



Sumber: Survei Konsumen-KBI Bandung, BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Hasil SPE menunjukkan bahwa mayoritas responden memperkirakan bahwa harga barang secara umum pada bulan Oktober-Desember 2005 akan naik (indeks SB masing-masing di atas 100) dengan kecenderungan yang meningkat (Grafik 4.4).

### 3. PROSPEK PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Pada triwulan I-2006, fungsi intermediasi perbankan di Jawa Barat diperkirakan

mengalami peningkatan. DPK yang berhasil dihimpun dan penyaluran kredit perbankan di Jawa Barat, masih akan tetap tumbuh. Suku bunga, merupakan salah satu faktor utama peningkatan DPK pada triwulan I-2006.

Meskipun lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu, penyaluran kredit dalam triwulan I 2006 akan dimulai melambat. Sementara itu, sektor UMKM yang cenderung dapat bertahan pada masa-masa krisis akan tetap menjadi pilihan utama perbankan dalam menyalurkan kreditnya, termasuk perbankan syariah.

Kendala utama penyaluran kredit pada triwulan I-2006 diperkirakan terkait dengan relatif masih tingginya suku bunga kredit, iklim usaha belum kondusif, dan melemahnya daya serap dunia usaha. Kendala lainnya yang akan dihadapi perbankan dalam jangka pendek kedepan, adalah relatif tingginya tingkat NPLs rata-rata perbankan, menurunnya keuntungan dan meningkatnya beban biaya operasional. NPLs diperkirakan akan mengalami peningkatan, karena penurunan kemampuan debitur untuk membayar cicilan. Penurunan kemampuan mengangsur tersebut antara lain disebabkan penghasilan debitur berpenghasilan tetap akan lebih banyak digunakan untuk konsumsi karena kenaikan harga BBM dan barang kebutuhan pokok lainnya.

Kondisi sistem pembayaran di Jawa Barat pada triwulan I-2006, diperkirakan akan mengalami peningkatan volume dan nominal transaksi tunai maupun non tunai. Peningkatan terkait dengan kenaikan UMR dan pembayaran uang muka dari berbagai kegiatan ekonomi, termasuk aliran dana untuk pembangunan proyek-proyek pemerintah pada tahun 2006.

**Halaman ini sengaja dikosongkan**  
**This page is intentionally blank**

LAMPIRAN

# LAMPIRAN

## 1. DATA EKONOMI MAKRO

Tabel 1.A. PDRB Sisi Produksi Harga Konstan Tahun Dasar 1993 (Rp Miliar)

NAMA SEKTOR	2004*				2005*			
	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4
1. Pertanian	2,032	2,047	2,107	2,068	2,283	2,102	2,115	2,099
2. Pertambangan	721	721	728	741	731	737	737	734
3. Industri Pengolahan	6,300	6,289	6,414	6,576	6,646	6,757	6,764	6,806
4. Listrik, Gas, Air Bersih	537	554	574	582	573	561	562	570
5. Bangunan/Konstruksi	580	585	593	608	621	647	650	651
6. Perdagangan, Hotel	3,059	2,759	2,804	2,894	3,003	3,034	3,102	3,129
7. Pengangkutan & Kom.	912	961	1,002	1,042	1,018	1,025	1,031	1,051
8. Keuangan	790	805	817	844	851	852	883	873
9. Jasa Jasa	1,588	1,579	1,607	1,658	1,688	1,712	1,735	1,759
<b>PDRB</b>	<b>16,519</b>	<b>16,300</b>	<b>16,646</b>	<b>17,013</b>	<b>17,414</b>	<b>17,427</b>	<b>17,579</b>	<b>17,672</b>

\* Angka Perkiraan

Tabel 1.B. Pertumbuhan PDRB triwulanan (%)

NAMA SEKTOR	2004*				2005*			
	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4
1. Pertanian	3.88	0.75	2.67	-1.84	10.65	-7.95	0.64	-0.79
2. Pertambangan	-3.54	0.10	0.69	1.69	-1.05	0.84	0.01	-0.38
3. Industri Pengolahan	-3.11	-0.18	1.74	2.52	1.31	1.68	0.10	0.62
4. Listrik, Gas, Air Bersih	-1.15	3.23	3.32	1.45	-1.25	-2.14	0.13	1.45
5. Bangunan/Konstruksi	-1.19	0.73	1.25	2.45	0.70	2.60	0.48	0.25
6. Perdagangan, Hotel	7.59	-9.82	1.38	3.23	4.01	0.70	2.24	0.86
7. Pengangkutan & Kom.	-3.15	5.36	4.01	4.02	-2.04	0.66	0.61	1.92
8. Keuangan	2.63	1.86	1.25	3.35	0.96	3.72	3.66	-1.12
9. Jasa Jasa	1.77	-0.57	1.55	3.16	2.70	0.79	1.36	1.40
<b>PDRB</b>	<b>0.41</b>	<b>-1.33</b>	<b>1.88</b>	<b>2.20</b>	<b>2.60</b>	<b>0.07</b>	<b>0.88</b>	<b>0.53</b>

\* Angka Perkiraan

Tabel 1.C. Nilai Ekspor Nonmigas Menurut Klasifikasi SITC (USD Juta)

NAMA KELOMPOK	2004				2005			
	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4
0 - FOOD AND LIVE ANIMALS	71	83	87	93	84	100	94	91
1 - BEVERAGES AND TOBACCO	1	1	2	1	2	2	2	2
2 - CRUDE MATERIALS, INEDIBLE	52	64	71	71	73	72	69	78
3 - MINERAL FUELS, LUBRICANTS ETC	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - ANIMAL & VEGETABLE OILS & FATS	11	11	12	12	11	12	10	12
5 - CHEMICAL	299	213	206	211	253	233	212	235
6 - MANUFACTURED GOODS	991	1,037	1,056	965	1,089	1,088	1,075	1,056
7 - MACHINERY & TRANSPORT EQP	1,403	1,323	1,562	1,111	1,385	1,465	1,528	1,581
8 - MISC. MANUFACTURED ARTICLES	744	823	895	725	785	782	860	755
9 - COMMODITIES & TRANSACTION NES	4	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>3,577</b>	<b>3,556</b>	<b>3,890</b>	<b>3,189</b>	<b>3,683</b>	<b>3,755</b>	<b>3,849</b>	<b>3,811</b>



Tabel 1.D. Volume Ekspor Nonmigas Menurut Klasifikasi SITC (ribu ton)

NAMA KELOMPOK	2004				2005			
	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4
0 - FOOD AND LIVE ANIMALS	91	110	65	50	54	59	63	57
1 - BEVERAGES AND TOBACCO	4	4	4	4	5	5	4	4
2 - CRUDE MATERIALS, INEDIBLE	60	68	62	63	67	72	73	78
3 - MINERAL FUELS,LUBRICANTS ETC	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - ANIMAL & VEGETABLE OILS&FATS	24	21	27	30	26	27	24	28
5 - CHEMICAL	385	205	164	155	206	199	190	194
6 - MANUFACTURED GOODS	1,521	1,646	1,797	1,451	1,603	1,449	1,487	1,409
7 - MACHINERY & TRANSPORT EQP	159	136	154	117	138	139	160	150
8 - MISC. MANUFACTURED ARTICLES	123	122	125	103	120	124	122	109
9 - COMMODITIES & TRANSACTION NES	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2,367</b>	<b>2,313</b>	<b>2,399</b>	<b>1,973</b>	<b>2,218</b>	<b>2,074</b>	<b>2,124</b>	<b>2,029</b>

Tabel 1.E. Nilai Impor Nonmigas Menurut Klasifikasi SITC (USD Juta)

NAMA KELOMPOK	2004				2005			
	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4
0 - FOOD AND LIVE ANIMALS	0	0	0	0	0	0	0	1
1 - BEVERAGES AND TOBACCO	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - CRUDE MATERIALS, INEDIBLE	10	2	7	11	8	14	26	13
3 - MINERAL FUELS,LUBRICANTS ETC	0	0	0	0	0	0	0	1
4 - ANIMAL & VEGETABLE OILS&FATS	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - CHEMICAL	5	2	3	10	7	9	11	38
6 - MANUFACTURED GOODS	9	6	7	19	17	35	18	17
7 - MACHINERY & TRANSPORT EQP	144	99	120	174	151	260	264	165
8 - MISC. MANUFACTURED ARTICLES	18	4	3	9	3	5	5	13
9 - COMMODITIES & TRANSACTION NES	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>186</b>	<b>114</b>	<b>140</b>	<b>223</b>	<b>187</b>	<b>325</b>	<b>323</b>	<b>247</b>

Tabel 1.F. Volume Impor Nonmigas Menurut Klasifikasi SITC (ribu ton)

NAMA KELOMPOK	2004				2005			
	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4
0 - FOOD AND LIVE ANIMALS	0	0	0	0	0	1	0	0
1 - BEVERAGES AND TOBACCO	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - CRUDE MATERIALS, INEDIBLE	21	4	13	28	31	49	60	36
3 - MINERAL FUELS,LUBRICANTS ETC	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - ANIMAL & VEGETABLE OILS&FATS	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - CHEMICAL	4	2	2	7	9	9	9	5
6 - MANUFACTURED GOODS	14	9	12	15	17	38	27	17
7 - MACHINERY & TRANSPORT EQP	17	10	14	22	21	27	27	20
8 - MISC. MANUFACTURED ARTICLES	3	2	1	2	1	1	2	1
9 - COMMODITIES & TRANSACTION NES	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>27</b>	<b>42</b>	<b>74</b>	<b>80</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>79</b>

## LAMPIRAN

Tabel 1.G. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemprov Jabar (Rp Miliar)

Uraian	2004			2005				
	T.3	T.4	Total	T.1	T.2	T.3*	T.4**	Total
Pendapatan	1,084	1,129	4,044	977	1,319	1,277	953	4,527
Pendapatan Asli Daerah	801	725	2,847	777	1,011	976	737	3,501
Dana Perimbangan	283	405	1,198	200	308	302	216	1,025
Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
Belanja	964	1,418	3,671	318	1,005	837	1,070	3,229
Belanja Aparatur	270	363	1,029	179	287	311	388	1,164
Belanja Publik	135	409	1,000	45	153	239	218	655
Belanja bagi hasil & bantuan keuangan	526	635	1,571	94	564	268	463	1,389
Belanja tidak terduga	33	11	71	0	1	19	0	21
Surplus/Defisit	120	-289	374	659	314	440	-117	1,297
Pembiayaan	92	-956	-374	-100	-5	0	0	-105
Penerimaan pembiayaan	53	21	668	0	0	0	0	0
Pengeluaran pembiayaan	-39	977	1,042	100	5	0	0	105

## 2. DATA INFLASI

Tabel 2.A. Perkembangan Laju Inflasi Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa (%)

No.	Kelompok	Bulanan			Triwulanan	Tahunan
		Okt '05	Nov '05	Des '05	(qtq)	(yoy)
1	Bahan makanan	7.13	1.70	-0.96	7.91	14.37
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	2.24	8.28	1.04	11.87	18.61
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	8.13	0.59	0.83	9.67	14.48
4	Sandang	1.01	0.42	0.77	2.22	6.15
5	Kesehatan	1.43	0.59	0.56	2.61	8.73
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	0.96	0.27	0.16	1.39	7.71
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	26.68	0.29	0.05	27.10	47.40
Umum		8.21	2.26	0.29	10.97	18.51

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Tabel 2.B. Perkembangan Laju Inflasi di Tujuh Kota di Jawa Barat (%)

No.	Kelompok	Bulanan			Triwulanan	Tahunan
		Okt '05	Nov '05	Des '05	(qtq)	(yoy)
1	Bandung	8.22	3.37	0.63	12.56	19.56
2	Bekasi	6.38	2.10	0.36	9.00	16.88
3	Bogor	10.46	0.42	0.05	10.98	18.47
4	Sukabumi	11.28	1.59	-1.87	10.94	19.11
5	Cirebon	9.30	1.39	-0.42	10.35	16.82
6	Tasikmalaya	9.44	0.24	0.63	10.39	20.83
7	Banjar	8.84	3.07	-1.26	10.78	22.04
Umum		8.21	2.26	0.29	10.97	18.51

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

## LAMPIRAN

Tabel 2.C. Perkembangan Inflasi Bulanan (mtm) Bulan Oktober 2005 di Tujuh Kota di Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa (%)

No.	Kelompok	Kota							Gab.
		Bd	Bks	Bgr	Skbm	Cn	Tsm	Bjr	
1	Bahan makanan	6.40	5.28	7.72	17.34	9.18	9.00	12.44	7.13
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	0.39	2.26	6.44	3.96	0.47	3.54	2.29	2.24
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	7.66	6.80	9.31	10.68	14.02	11.66	14.75	8.13
4	Sandang	1.37	0.52	0.82	-0.18	0.69	2.99	4.01	1.01
5	Kesehatan	1.53	1.83	1.19	0.13	0.43	0.15	1.74	1.43
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	2.23	0.10	0.36	0.00	0.00	2.05	-12.12	0.96
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	29.00	20.28	32.22	25.76	26.49	31.20	22.98	26.68
Umum		8.22	6.38	10.46	11.28	9.30	9.44	8.84	8.21

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Tabel 2.D. Perkembangan Inflasi Bulanan (mtm) Bulan November 2005 di Tujuh Kota di Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa (%)

No.	Kelompok	Kota							Gab.
		Bd	Bks	Bgr	Skbm	Cn	Tsm	Bjr	
1	Bahan makanan	3.48	0.48	0.43	0.89	1.34	-1.11	3.58	1.70
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	12.92	8.07	1.45	4.36	3.71	1.25	6.42	8.28
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	0.23	0.81	0.92	1.34	0.74	0.48	1.27	0.59
4	Sandang	-0.14	1.19	0.23	0.50	0.39	0.01	0.95	0.42
5	Kesehatan	0.31	0.91	0.83	0.17	0.53	0.39	0.14	0.59
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	0.85	1.09	-3.27	0.98	1.59	0.21	0.39	0.27
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	0.46	0.32	-0.18	0.42	-0.01	0.37	-0.13	0.29
Umum		3.37	2.10	0.42	1.59	1.39	0.24	3.07	2.26

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Tabel 2.E. Perkembangan Inflasi Bulanan (mtm) Bulan Desember 2005 di Tujuh Kota di Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa (%)

No.	Kelompok	Kota							Gab.
		Bd	Bks	Bgr	Skbm	Cn	Tsm	Bjr	
1	Bahan makanan	-1.23	0.59	-0.94	-6.07	-1.33	-0.25	-5.17	-0.96
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	2.26	0.36	-0.03	-0.13	-0.47	0.96	-0.02	1.04
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	1.46	0.53	0.01	0.00	0.14	1.39	0.32	0.83
4	Sandang	0.94	0.80	0.42	0.50	0.15	1.28	0.82	0.77
5	Kesehatan	0.43	0.82	0.08	1.96	0.02	0.60	0.14	0.56
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	0.06	0.00	0.64	0.38	0.00	0.58	0.18	0.16
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	-0.05	-0.38	1.06	0.08	-0.02	-0.03	-0.23	0.05
Umum		0.63	0.36	0.05	-1.87	-0.42	0.63	-1.26	0.29

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

## LAMPIRAN

Tabel 2.F. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) di Tujuh Kota di Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa Pada Triwulan IV-2005

No.	Kelompok	Kota							Gab.
		Bd	Bks	Bgr	Skbm	Cn	Tsm	Bjr	
1	Bahan makanan	8.75	6.41	7.16	11.20	9.17	7.51	10.44	7.91
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	15.91	10.91	7.96	8.35	3.71	5.84	8.83	11.87
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	9.49	8.23	10.33	12.17	15.03	13.75	16.57	9.67
4	Sandang	2.17	2.53	1.47	0.82	1.24	4.31	5.86	2.22
5	Kesehatan	2.28	3.60	2.12	2.26	0.98	1.14	2.02	2.61
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	3.16	1.19	-2.30	1.36	1.59	2.86	-11.62	1.39
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	29.52	20.20	33.38	26.38	26.45	31.64	22.53	27.10
Umum		12.56	9.00	10.98	10.94	10.35	10.39	10.78	10.97

### 3. DATA PERBANKAN

Tabel 3.A. Indikator Kinerja Bank Umum di Jawa Barat (Rp Triliun) Bank Umum Konvensional

Pos Tertentu	2004				2005				Pertumbuhan	
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	y-o-y	q-t-q
Total Aset	82.93	87.11	87.40	92.06	91.14	95.73	99.77	103.41	12.33	3.65
DPK	68.77	71.19	70.46	72.31	70.89	74.90	79.32	83.54	15.53	5.32
Kredit bank pelapor	33.77	35.65	37.79	40.65	41.86	45.45	48.94	50.52	24.28	3.24
Kredit lokasi proyek	71.13	75.97	79.01	83.40	86.32	91.77	95.67	98.32	20.33	0.03
LDR (%)	49.11	50.08	53.63	56.22	59.05	60.68	61.69	60.48	7.58	-1.98
Rasio NPL (%)	4.56	4.15	3.68	3.25	3.54	4.12	4.95	4.95	52.41	0.17

Bank Umum Syariah (RpTriliun)

No.	Keterangan	2004				2005				Pertumbuhan	
		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	yoy	qtq
1	Aset	0.98	1.36	1.69	1.93	2.01	2.44	2.67	2.70	39.63	0.89
2	Pembiayaan	0.67	1.01	1.23	1.36	1.51	1.75	1.98	2.03	49.33	2.34
3	Dana Pihak Ketiga	0.70	0.92	1.10	1.36	1.35	1.71	1.70	1.78	31.13	4.84
4	FDR (%)	96.50	110.52	112.43	99.87	111.56	101.87	116.51	113.74	13.89	-2.38

## LAMPIRAN

Tabel 3.B. DPK, Kredit, dan NPLs Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Rp Juta)

KABUPATEN/KOTA	DPK	KREDIT	LDR	NPL	
				NOMINAL	%
Kab. Tasikmalaya	88,020	219,008	248.82	16,816	7.68
Kab. Majalengka	131,887	312,621	237.04	563	0.18
Kab. Ciamis	181,322	384,153	211.86	7,290	1.90
Kab. Kuningan	242,737	367,864	151.55	3,426	0.93
Kab. Garut	703,843	1,021,651	145.15	28,233	2.76
Kab. Subang	608,652	864,651	142.06	25,974	3.00
Kab. Sumedang	514,423	728,722	141.66	18,225	2.50
Kab. Purwakarta	735,333	1,037,609	141.11	52,273	5.04
Kota Banjar	283,041	397,956	140.60	14,704	3.69
Kab. Indramayu	600,112	697,756	116.27	21,540	3.09
Kota Tasikmalaya	1,956,317	2,010,358	102.76	66,754	3.32
Kab. Cianjur	944,743	890,147	94.22	12,117	1.36
Kab. Bandung	1,024,057	885,184	86.44	33,720	3.81
Kab. Bekasi	3,205,427	2,597,751	81.04	55,189	2.12
Kota Cimahi	1,245,093	913,262	73.35	12,506	1.37
Kab. Sukabumi	617,591	449,325	72.75	11,189	2.49
Kota Cirebon	4,497,185	3,246,946	72.20	160,047	4.93
Kota Sukabumi	1,466,497	1,043,562	71.16	24,290	2.33
Kab. Bogor	1,187,802	792,023	66.68	8,014	1.01
Kota Bekasi	2,090,062	1,392,213	66.61	20,330	1.46
Kab. Karawang	2,096,971	1,169,197	55.76	29,769	2.55
Kota Bandung	47,751,459	24,986,878	52.33	1,666,017	6.67
Kota Bogor	8,613,187	3,448,826	40.04	177,705	5.15
Kota Depok	2,752,375	662,501	24.07	15,178	2.29
Jawa Barat	83,538,136	50,520,164	60.48	2,481,869	4.91

## LAMPIRAN

Tabel 3.C. Penyaluran Kredit UMKM per Kabupaten/Kota di Jawa Barat periode Desember 2005 (Rp Juta)

No.	Kabupaten/Kota	NPL			NPL UMKM	Kredit UMKM	NPL UMKM (%)
		Kredit Mikro	Kredit Kecil	Kredit Menengah	Nominal		
1	Kota Bandung	205,757	130,882	284,091	620,730	17,153,641	3.62
2	Kota Cirebon	36,349	20,430	30,285	87,064	2,906,976	3.00
3	Kota Bogor	30,434	18,692	25,430	74,556	2,882,668	2.59
4	Kab. Bekasi	46,455	5,438	3,296	55,189	2,345,500	2.35
5	Kota Tasikmalaya	13,285	25,823	22,264	61,372	1,759,569	3.49
6	Kota Bekasi	10,778	6,841	2,711	20,330	1,367,891	1.49
7	Kab. Karawang	14,115	10,600	-	29,769	1,028,448	2.89
8	Kab. Garut	13,216	11,852	3,165	28,233	1,009,751	2.80
9	Kab. Purwakarta	49,766	2,507	5,054	52,273	993,778	5.26
10	Kota Sukabumi	7,416	12,928	3,946	24,290	984,785	2.47
11	Kab. Cianjur	8,658	2,943	516	12,117	879,453	1.38
12	Kab. Bandung	10,638	7,509	8,388	26,535	877,999	3.02
13	Kota Cimahi	9,505	3,001	-	12,506	863,637	1.45
14	Kab. Subang	22,595	2,189	1,190	25,974	855,651	3.04
15	Kab. Bogor	3,635	4,379	-	8,014	792,023	1.01
16	Kab. Indramayu	15,787	5,103	650	21,540	697,756	3.09
17	Kab. Sumedang	6,625	9,959	1,641	18,225	693,341	2.63
18	Kota Depok	8,324	1,401	5,453	15,178	561,159	2.70
19	Kab. Sukabumi	3,874	5,644	1,671	11,189	445,666	2.51
20	Kota Banjar	6,643	6,455	1,606	14,704	397,956	3.69
21	Kab. Ciamis	3,450	3,840	-	7,290	369,324	1.97
22	Kab. Kuningan	337	3,089	-	3,426	352,864	0.97
23	Kab. Majalengka	563	-	-	563	312,621	0.18
24	Kab. Tasikmalaya	9,859	6,957	-	16,816	219,008	7.68
Jawa Barat		538,064	308,462	401,357	1,247,883	40,751,465	3.06

### SURVEI KONSUMEN (SK)

Ruang lingkup SK meliputi ekspektasi konsumen sektor rumah tangga mengenai kondisi perekonomian, perkembangan harga, kondisi keuangan konsumen, dan rencana konsumsi (pembelanjaan) konsumen. Informasi yang diperoleh dari hasil survei digunakan sebagai prompt indicator mengenai tendensi/arah permintaan konsumen.

Pengolahan data hasil survei dilakukan dengan menggunakan metode Balance Score: saldo bersih (net balance), yang disajikan dalam angka indeks. Saldo bersih dihitung dari selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban meningkat dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban menurun. Angka indeks diatas 100 menunjukkan respon optimis lebih banyak dibandingkan respon pesimis, sebaliknya angka dibawah 100 menunjukkan respon pesimis lebih banyak dibandingkan respon optimis.

### SURVEI PENJUALAN ECERAN (SPE)

Ruang lingkup SPE meliputi penjualan di tingkat eceran dari seluruh barang, yang diklasifikasikan kedalam beberapa kelompok yang mengacu pada Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI), dan ekspektasi terhadap tingkat harga dan suku bunga kredit. Informasi yang diperoleh dari hasil survei digunakan untuk melihat pergerakan dan kecenderungan pengeluaran masyarakat (consumption spending) serta sebagai salah satu indikator dini perkembangan perekonomian, khususnya dari sisi permintaan.

Pengolahan data hasil survei dilakukan dengan menggunakan metode balance score, dengan net balance yang menggambarkan kecenderungan peningkatan atau penurunan penjualan, serta ekspektasi pelaku usaha (retailer) terhadap tingkat harga dan suku bunga kredit periode yang akan datang. Data hasil SPE kuantitatif dinyatakan dalam bentuk indeks riil yang menunjukkan perbandingan total penjualan eceran riil bulan berjalan terhadap total penjualan eceran riil pada bulan dasar (Oktober 2000 = 100), dan, apabila terdapat perubahan data yang ekstrim akibat perubahan responden

## LAMPIRAN

### SURVEI HARGA PROPERTI RESIDENSIAL (SHPR)

Ruang lingkup SHPR meliputi harga jual rumah, harga jual tanah, jumlah rumah yang dibangun dan jumlah rumah yang dijual oleh perusahaan pengembang perumahan (primary market) yang melakukan transaksi penjualan. Informasi yang diperoleh dari hasil survei digunakan untuk melihat perkembangan harga dan kuantitas properti residensial, baik yang terjadi pada triwulanan berjalan maupun perkiraan harganya untuk triwulan mendatang.

Pengolahan data hasil survei dilakukan dengan membandingkan harga dan kuantitas properti triwulan berjalan dengan periode sebelumnya, yang disajikan dalam bentuk indeks harga properti residensial. Perkembangan indeks harga properti residensial ini juga digunakan sebagai salah satu komponen penghitung dalam penelitian inflasi harga

### SURVEI KEGIATAN DUNIA USAHA (SKDU)

Ruang lingkup SKDU meliputi kegiatan dunia usaha, seperti produksi, investasi, penyerapan tenaga kerja, termasuk ekspektasi mengenai hal tersebut di setiap sektor ekonomi (sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan & perikanan; sektor pertambangan & penggalian; sektor listrik, gas & air bersih; sektor industri pengolahan; sektor bangunan/konstruksi; sektor perdagangan, hotel & restoran; sektor pengangkutan & komunikasi; sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa. Informasi yang diperoleh dari hasil survei digunakan sebagai indikasi dan salah satu pendekatan/proksi perkembangan kegiatan ekonomi di sektor riil, baik pada triwulan berjalan maupun triwulan yang akan datang.

Pengolahan data hasil survei menggunakan metode saldo bersih dengan menghitung selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "meningkat" dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "menurun." Hasil net balance setiap sektor kemudian dikalikan dengan bobot sektor yang dihitung dari pangsa sektor tersebut dalam PDB tahun 1993, sehingga diperoleh saldo bersih tertimbang (weighted net balance). Jumlah saldo bersih tertimbang seluruh sektor menjadi proksi dari kegiatan usaha sektor riil.



### **SURVEI HARGA: “ Analisis Faktor Penyebab Kenaikan Harga dan Ekspektasi Harga pada Kelompok Bahan Makanan dan Makanan Jadi”**

Ruang lingkup survei ini meliputi kenaikan harga kelompok bahan makanan dan makanan jadi pada bulan Oktober, November, dan Desember, serta ekspektasi kenaikan harga pada bulan Desember, sampai bulan Februari 2006. Informasi yang diperoleh dari hasil survei digunakan untuk mengetahui (i) faktor penyebab kenaikan harga kelompok bahan makanan dan makanan jadi, (ii) bagaimana ekspektasi produsen terhadap harga kelompok bahan makanan dan makanan jadi dan pada tingkat berapa ekspektasi kenaikan harga tersebut, serta (iii) faktor pembentuk ekspektasi tersebut.

Pengolahan data hasil survei dilakukan dengan menggunakan program SPSS untuk mendukung metode analisis deskriptif, yang memberikan gambaran tentang kondisi riil hasil penelitian, baik terhadap rumah tangga produksi (produsen, grosir, dan retailer) maupun rumah tangga konsumsi. Sesuai dengan tujuannya, diharapkan melalui survei ini dapat diperjelas mengenai sejumlah variabel yang sebelumnya diduga secara arbitrer menjadi penyebab kenaikan harga pada kelompok barang makanan jadi dan kelompok barang bahan makanan. Disamping itu, survei ini juga diharapkan mampu menerangkan kadar ekspektasi produsen/pelaku ekonomi dan konsumen mengenai kenaikan harga di kedua kelompok barang tersebut mengenai perubahan harganya di bulan-bulan yang akan datang.

### **SURVEI INDUSTRI MAKANAN JADI DI JAWA BARAT**

Ruang lingkup survei ini meliputi volume/jumlah produksi, tenaga kerja, biaya produksi, harga jual, dan profit perusahaan di industri makanan jadi Jawa Barat, sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2005. Informasi yang diperoleh dari hasil survei digunakan untuk mengetahui (i) karakteristik serta perkembangan industri makanan jadi di Jawa Barat, (ii) dampak kenaikan harga BBM terhadap industri makanan jadi di Jawa Barat antara lain terhadap volume/jumlah produksi, harga jual, serta profit perusahaan.

Pengolahan data hasil survei dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan terhadap data primer yang berhasil diperoleh dari hasil survei di lapangan terhadap perusahaan makanan jadi di Jawa Barat, serta dari data sekunder yang telah ada sebelumnya. Metode sampel yang digunakan adalah sampel bertujuan atau purposive sample berdasarkan area industri makanan jadi. Mengingat industri makanan jadi tersebar di hampir seluruh wilayah kota/kab di Jawa Barat, maka pengambilan sampel ditujukan hanya pada perusahaan makanan jadi yang dominan dan menjadi ciri khas di Jawa Barat yaitu antara lain wajit (Garut), kerupuk kulit

**Halaman ini sengaja dikosongkan**  
**This page is intentionally blank**